

FINAL REPORT
HASIL ASSESMENT
KABUPATEN BIAK DAN TELUK WONDAMA



Perkumpulan LINGKUNGAN HIDUP PAPUA
[pt. YALHIMO]

Jln. Gunung Salju No.18, Fanindi – Bengkel Tan, PO Box. 105, Manokwari 98312
Telp/Fax: 062 0986 213185; E -mail: yalhimo@manokwari.wasantara.net.id

Laporan ini merupakan hasil kajian terhadap perikehidupan masyarakat dan keberadaan lembaga kemasyarakatan dalam kapasitasnya mendukung usaha peningkatan perikehidupan masyarakat. Kajian tersebut dilakukan secara independen, namun demikian UNDP turut serta dalam memberikan pengarahan dan masukan kepada organisasi baik pada proses awal maupun pada proses persiapan laporan. Adapun data yang dikumpulkan, analisa dan isu-isu yang disampaikan tidak sepenuhnya mewakili pandangan dari UNDP.

This report represents the result of an assessment of community livelihoods and civil society organisations' capacity to support improvements in community livelihoods. The assessment was carried out independently of the UNDP, however UNDP advisors provided initial guidance to the organizations that conducted the assessments and gave feedback on the preparation of the report. As such, the information gathered, analysis and issues associated herewith do not necessarily represent the views of UNDP.

BAB I. PENDAHULUAN

Gambaran Umum Papua ¹

Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik) Papua, populasi Papua tahun 2002 sebesar 2.387.427 orang, 40% diantaranya (atau sekitar 900.000 orang) adalah pendatang (suku non-Papua). Dari jumlah itu, tercatat 62% diantaranya adalah penduduk angkatan kerja (berusia 15-65 tahun). Dari jumlah angkatan kerja, hanya sekitar 78% diantaranya yang sempat mengenyam pendidikan, itupun hanya 20% yang sampai pada sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi. BPS Papua juga mencatat bahwa jumlah lowongan kerja berbanding pencari kerja yang tersedia adalah sekitar 1: 2500. Artinya, ada persoalan mendasar tentang pemenuhan hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan di tanah Papua.

Penyebaran penduduk khusus wilayah kepada burung dari total jumlah penduduk Papua 40% (950.333 jiwa) dimana 70 % terdistribusi paling banyak pada perkampungan.

BPS Papua juga mencatat minimnya sarana kesehatan yang tersedia di Papua. Sampai tahun 2002, di seluruh wilayah Papua, tercatat hanya ada 23 rumah sakit (12 RS umum, 5 RS swasta, dan 6 RS TNI) dengan kapasitas 1.821 tempat tidur. Hanya terdapat 103 apotik yang tersebar di wilayah Papua, 58 diantaranya terkonsentrasi di Kota Jayapura dan Sorong, tak ada apotik tersedia di Kabupaten Paniai, dan Kab Puncak Jaya.

Memprihatinkan pula melihat catatan kondisi kesehatan di Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat sampai tahun 2002, hanya mampu mendata sekitar 525.679 penderita yang tertangani. Dari data yang ada, sekitar 20% diantaranya adalah penderita penyakit saluran pernapasan, sekitar 30% adalah kasus penderita penyakit yang sering muncul pada situasi dimana orang tak mampu makanan dan kondisi hidup sehat (mis anemia, defisiensi gizi, penyakit kulit karena jamur, tukak lambung, pneumonia, disentri). 20% lain adalah penderita malaria. LP3AP, sebuah ornop pemerhati hak-hak perempuan dan anak mencatat bahwa angka kematian bayi tahun 2002 adalah 832/1000.

Dinamika politik dan ekonomi di Papua yang diklaim oleh pemerintah sudah mengalami kemajuan ternyata tidak terlihat nyata di kampung-kampung. Akses dan pelayanan kesehatan masyarakat di kampung tetap saja buruk. Angka kematian ibu dan anak terus meningkat. Dinas kesehatan propinsi Papua pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa rata-rata kematian Ibu adalah 1.161/tahun, sedangkan angka kematian anak dapat dilihat pada table berikut :

¹ Hasil Review HAM di Papua (2004), difokuskan pada beberapa lembaga di Jayapura seperti; Aliansi Demokrasi untuk Papua, Elsham, LP3AP, Foker LSM Papua, SKP Papua, dan PDP-Papua. Data pada keadaan umum ini merupakan hasil kompilasi data dari Pemerintah dan LSM. Dilakukan oleh J. Septer Manufandu (YALHIMO) dan Anton Prasetyo (DEMOS Jakarta).

Tabel 1. Tingkat kematian Bayi di Papua Pada Tahun 2001

Abortus %	Lahir Mati %	Kematian Neonatus (1bln)	Kematian Bayi (1 thn)	Kematian Balita
12,06	11,86	92/1000	186/1000	9000/100,000

Sumber : Dinas Kesehatan propinsi Papua, 2001

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kematian bayi untuk abortus 12,06 % dari 1000 perempuan, lahir mati 11,86 % , kematian bayi (1 thn) 186 dari 1000 bayi dan kematian balita 9000 dari 100,000 balita.

Angka penderita HIV/AIDS juga melonjak tajam dari 44 kasus (tahun 1993), menjadi 818 kasus (tahun 2002). Konon ILO-Jakarta mencatat bahwa provinsi Papua adalah provinsi terawan dalam konteks kuantitas kasus HIV/AIDS.

Dalam isu pendidikan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua mencatat sampai tahun 2003 tidak terdapat sarana pendidikan dan ketersediaan guru yang memadai. Rasio perbandingan tenaga guru dan murid rata-rata adalah 1: 45 (satu orang guru bertanggung jawab mengajar 45 orang murid), dimana yang paling kritis adalah pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas (termasuk SLTA kejuruan) yaitu 1:68. Hal ini sewajarnya saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang perhatian Pemerintah RI terhadap kualitas pendidikan di wilayah Papua. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Tingkat perbandingan antara jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid dan rasio perbandingan guru dan murid di Papua pada tahun 2003

	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru:Murid
TK	634	610	14,069	1:23
SD	2407	17,984	373,336	1:40
SLTP	356	4,136	88,290	1:49
SLTA	157	2,679	56,312	1:68

*Sumber: BPS Provinsi Papua 2003

Hal ini menunjukan jauhnya pemenuhan hak atas pendidikan dan kerja bagi penduduk di Papua. Disamping itu juga menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang menginginkan terjadinya konflik di antara masyarakat.

Masalah pendidikan bagi rakyat sampai saat ini belum juga bias dikatakan baik, semangat Otonomi Khusus Papua yang memberikan penekanan pada perbaikan pendidikan di Papua masih belum menampakkan hasilnya. Anak-anak di kampung-kampung masih saja harus lebih banyak libur dari pada belajar di sekolah karena guru yang tidak ada, walaupun ada guru maka fasilitas sekolah tetap saja kurang atau bahkan tidak ada. Proses belajar-

mengajar dikampung sangat sering hanya terjadi ketika ujian semester dilakukan dan hanya memenuhi legalitas administrasi untuk pengisian raport.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik sah secara turun-temurun terhadap sumberdaya alam dan proses-proses pengelolaannya tetap saja masih belum mendapat pengakuan dari pemerintah. Marjinalisasi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam terus saja berlanjut.

Relasi antar masyarakat adat juga terlihat semakin renggang, hal ini dapat di buktikan dengan menguatnya semangat primordial di masyarakat Papua. Semangat primordial yang terbangun saat tidak saja dikotomi Papua dan Non Papua namun sudah berkembang dan menguat antar suku-suku yang ada di Papua sendiri. Contoh paling kongrit adalah ketika proses penerimaan pegawai negeri sipil dilakukan di masing-masing kabupaten. Masing-masing suku ingin menunjukkan “*powernya*” untuk merebut pengaruh yang lebih besar. Dengan sangat beragamnya suku-suku di Papua dapat dipandang sebagai sebuah kekuatan namun disisi yang lain merupakan potensi yang dapat digunakan oleh siapapun untuk memecah-belah orang Papua.

Selama masa Orde Baru, masyarakat asli Papua yang berjumlah 256 suku ini menjadi penonton setia, menyaksikan perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri mengelola kekayaan alamnya secara besar-besaran. Perusahaan-perusahaan dengan seenaknya menguasai hutan, laut dan sungai bahkan sampai kekayaan yang tersembunyi di dalam tanah pun habis dikerok. Tetapi entah siapa yang mengizinkan dan menjual tanah Papua kepada pihak investor dari dalam dan luar negeri, sampai dengan hari ini pun masih merupakan tanda tanya besar bagi masyarakat adat. Karena dari tahun ke tahun, perusahaan HPH (Hak Penguasaan Hutan), IPK (Izin Penebangan Kayu), ISL (Izin Sawmell Lahan) dan Perkebunan HTI (Hutan Tanaman Industri), Pengolahan sagu, sampai dengan Izin eksploitasi hasil laut (ikan, udang, kepiting) dan izin produksi pertambangan (emas, tembaga, minyak bumi dan gas bumi) semakin marak di Papua dan lebih spesifik di kepala burung.

Situasi CSO dan CBO Kepala Burung Papua

Sampai dengan tahun 2004 jumlah LSM yang beraktivitas di kepala burung Papua sebanyak 20 LSM yang kelihatan menjalankan aktivitasnya, namun demikian jumlah ini akan bertambah lebih banyak apabila didasarkan pada data yang terdaftar pada masing-masing pemerintah daerah.

Sebagian besar NGO tersebut bergerak untuk pengembangan masyarakat pada tingkat kampung dan sebagian kecil lainnya bergerak untuk advokasi dan lainnya. Penyebaran LSM paling banyak berada di Manokwari. Pendirian LSM-LSM tersebut atas dasar keprihatinan mereka terhadap kondisi yang terjadi daerahnya masing-masing, namun demikian kapasitas dalam mendorong perubahan masih sangat lemah terutama dalam

pengembangan kapasitas kelembagaan, pendanaan dan dalam kaitannya dengan memfasilitasi perubahan yang ingin di dorong.

Situasi LSM dikawasan kepala burung selain di pengaruhi oleh perkembangan social politik. Dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh lembaga-lembaga luar yang datang dari luar Papua (Nasional dan Internasional). Issue-issue yang di "*garap*" oleh LSM dan organisasi masyarakat sipil di kepala burung tidak jarang yang menyesuaikan dengan Lembaga-lembaga luar tersebut, karena lembaga-lembaga luar tersebut memiliki sumberdaya yang memadai. Tidak jarang juga lembaga lokal hanya dijadikan pelaksana proyek dari lembaga luar tersebut.

Community Base Organization (CBO) dan sepak terjangnya, di wilayah kepala burung sangat memberikan andil yang cukup strategis dalam membangun kekuatan rakyat, misalkan kelompok-kelompok keagamaan, lembaga-lembaga adat, kelompok usaha bersama (sejenis koperasi) yang dibangun pada tingkat kampung, distrik dan kabupaten. Sepak terjangnya sangat dominan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, sebagai contoh Lembaga Adat misalkan, bisa diartikan sebagai DPR kampung tempat dimana masyarakat adat membicarakan dan mengelola serta memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka serta ketahanan kedaulatan wilayah hukum adat masyarakat adat di kampung, demikian CBO yang lain dibangun oleh rakyat sendiri sesuai dengan tujuan pendiriannya.

BAB. II
KEADAAN UMUM KABUPATEN,
PROFIL KAMPUNG
DAN
ANALISIS PERIKEHIDUPAN BERKELANJUTAN

Sebagai bahan acuan dalam menganalisis perikehidupan berkelanjutan di kampung-kampung wilayah assessment, maka sangat penting memahami kondisi kabupaten dimana kampung tersebut berada.

A. KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kondisi Geografis

Sebelum adanya pemekaran kabupaten, Teluk Wondama merupakan bagian dari Kabupaten Manokwari dengan status sebagai Distrik, namun sebagai implementasi dari dinamika pemerintahan maka Distrik Wasior dan beberapa distrik lain disekitarnya dimekarkan menjadi kabupaten baru yang disebut Kabupaten Teluk Wondama dengan ibukota Rasiei, yang berada di Distrik Wasior Selatan.

Kabupaten ini berada pada leher kepala burung pulau Papua dengan luas wilayah mencapai: 5.788 Km², terdiri dari Distrik Rumberpon, Wamesa, Windesi, Wasior, Wasior Utara dan Wasior Selatan. Topografi 30 % Pegunungan/dataran Tinggi yang terdiri dari 50 % Dataran Rendah 20 % Bergelombang. Kabupaten Teluk Wondama Terdiri dari 6 (Enam) Distrik yaitu, Distrik Rumberpon, Wamesa, Windesi, Wasior, Wasior Utara, dan Wasior Selatan secara administratif Kabupaten Teluk Wondama berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Distrik Ransiki Kabupaten. Manokwari dan Teluk Cenderawasih
Sebelah Timur	: Distrik Yaur Kabupaten. Nabire dan Teluk Cenderawasih
Sebelah Selatan	: Distrik Yaur Kabupaten. Nabire
Sebelah Barat	: Distrik Kuri dan Idoor Kabupaten Teluk Bintuni

Kependudukan

Mengingat kabupaten ini baru terbentuk maka segala informasi-informasi akurat masih sangat terbatas, Penduduk di kabupaten tersebut mencapai 13.175 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga berkisar 3100 KK, Kepadatan Penduduk : 2,24 Jiwa/Km². Jika dilihat dari pembagian penduduk berdasarkan etnisitas maka dapat dibagi dalam dua bagian besar yaitu suku besar/suku asli dan suku minoritas/suku pendatang. Suku asli adalah Suku Wamesa dan suku Soub, sedangkan suku papua lainnya seperti Biak, Serui, Sorong, Jayapura, serta non-Papua seperti Bugis, Makassar, dan Jawa.

Sarana dan Prasarana

a. Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan yang dapat digunakan untuk kepentingan mobilisasi adalah sebuah Bandara Perintis yang berada di daerah Wasior kecamatan dengan luasan 600 x 30 meter, selain itu terdapat juga sebuah pelabuhan yang disebut dengan Pelabuhan Wasior. Merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, yang telah diperbaharui dengan ukuran 70 x 8 Meter, berkapasitas 1.500 DWT, dengan spesifikasi konstruksi beton dan kayu. Selain pelabuhan Wasior terdapat sebuah pelabuhan lain yang cukup baru yang terdapat di Distrik Windesi . Pelabuhan ini berukuran 73 x 8 Meter, dengan konstruksi beton (permanent).

b. Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten ini berupa sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Unit di Wasior, Sekolah Dasar (SD) 31 Unit yang tersebar di kampung-kampung di distrik, Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) 3 Unit, di Wasior dan Windesi, dan Rumberpon selain itu ada penambahan 1 unit yang menggunakan Dana Pembangunan Fasilitas Pendidikan Menengah Umum (SMU) Propinsi Papua Tahun anggaran 2003.

c. Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Teluk Wondama adalah Puskesmas 4 Unit, di Wasior, Distrik Windesi, Distrik Sabubar dan Distrik Rumberpon, selain ke-4 Puskesmas tersebut Kabupaten Teluk Wondama juga memiliki Puskesmas Pembantu sebanyak 10 Unit yang tersebar kampung –kampung di beberapa distrik.

Potensi Kabupaten Teluk Wondama

Potensi yang terdapat di kabupaten ini cukup banyak dan memiliki nilai financial, sejarah, dan budaya yang tinggi. Adapun potensi-potensi yang terdapat di Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai berikut :

a. Potensi Lahan

Dengan luasan wilayah yang berukuran 5.788 Km², Kabupaten Teluk Wondama memiliki kesempatan untuk mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk, selain itu adanya lahan perkebunan di dataran Wosimi yang telah tersedia seluas 40.000 Ha menjadi potensi tersendiri yang dapat langsung dimanfaatkan.

b. Potensi Perikanan

Teluk Wondama memiliki potensi laut yang sangat kaya, seperti hamparan terumbu karang dan ikan-ikan yang hidup di dalamnya, seperti Ikan Tuna, Pelagis, Teripang, Bia Lola, Lobster, ikan Hiu dan lain-lain.

c. Potensi Kehutanan

Selain kekayaan laut, Kabupaten Teluk Wondama juga memiliki kekayaan sumber daya hutan yang sangat tinggi seperti jenis Kayu konstruksi (Merbau) dan jenis kayu Rimba

Campuran juga Hasil Hutan Non Kayu seperti minyak lawang, kayu masowi, dan lain sebagainya.

d. Potensi tambang dan Bahan Galian

Kandungan bumi teluk Cenderawasih merupakan satu bentuk modal diam yang dimiliki, salah satu yang menjadi perhatian besar dalam potensi bahan galian di kabupaten tersebut adalah adanya bahan tambang berupa Mika sebesar 90,11 Juta Metrik Ton, Maskovit sebesar 17,31 Juta Metrik Ton, Kuarsa dan Pragmatis dengan jumlah yang juga besar

e. Potensi Ekoturism dan wilayah Konservasi

Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Teluk Wondama adalah adanya Taman Nasional Laut yang disebut dengan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih. Taman nasional ini memiliki garis pantai dengan panjang 500 Km, Daratan seluas 68.200 Ha. Dan hamparan terumbu karang seluas 80.000 Ha dengan lautan seluas 12.400 Ha. Tingginya keanekaragaman dan terumbu karang yang indah menjadikan daerah ini sangat cocok dalam pengembangan wisata bahari

Aparat dan fasilitas pemerintah

Teluk Wondama dapat dikatakan sebagai kabupaten yang memiliki jumlah aparat dan fasilitas pemerintahan yang cukup minim, hal ini terlihat dari jumlah pegawai pemerintahan yang hanya berjumlah 197 Orang, dengan gedung Asset Pemda hanya Sebanyak 23 Unit, dan lahan milik pemerintah yang hanya 20 Hektar.

Profil Kampung Wilayah Assesment

a. Letak

Ke-enam kampung dimana assesment dilakukan pada dasarnya memiliki kondisi yang dapat mewakili daerah lain di dalam Kabupaten Teluk Wondama. Kampung-kampung tersebut merupakan bagian dari 3 Distrik yang pengambilannya sesuai dengan berbagai pertimbangan baik dalam efektifitas penggunaan waktu, biaya, kualitas informasi dan kemampuan dalam mewakili setiap gambaran kampung pada umumnya, ada yang berada di pulau-pulau kecil dan daratan baik itu di daerah pesisir maupun di perbukitan.

b. Kependudukan

Penduduk di 6 kampung dalam 3 Distrik, Kabupaten Teluk Wondama berjumlah 327 KK dan terbagi dalam 2 kategori berdasarkan jenis kelamin yaitu 761 orang laki-laki dan 941 perempuan, sehingga total keseluruhannya mencapai 1282 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk pada keenam kampung tersebut, ternyata Kampung Werabur memiliki jumlah jiwa terbanyak dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya yaitu 361 jiwa dengan 83 KK, dan yang paling sedikit adalah Kampung Mamisi dengan 117 jiwa atau 23 KK. Secara jelas komposisi penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

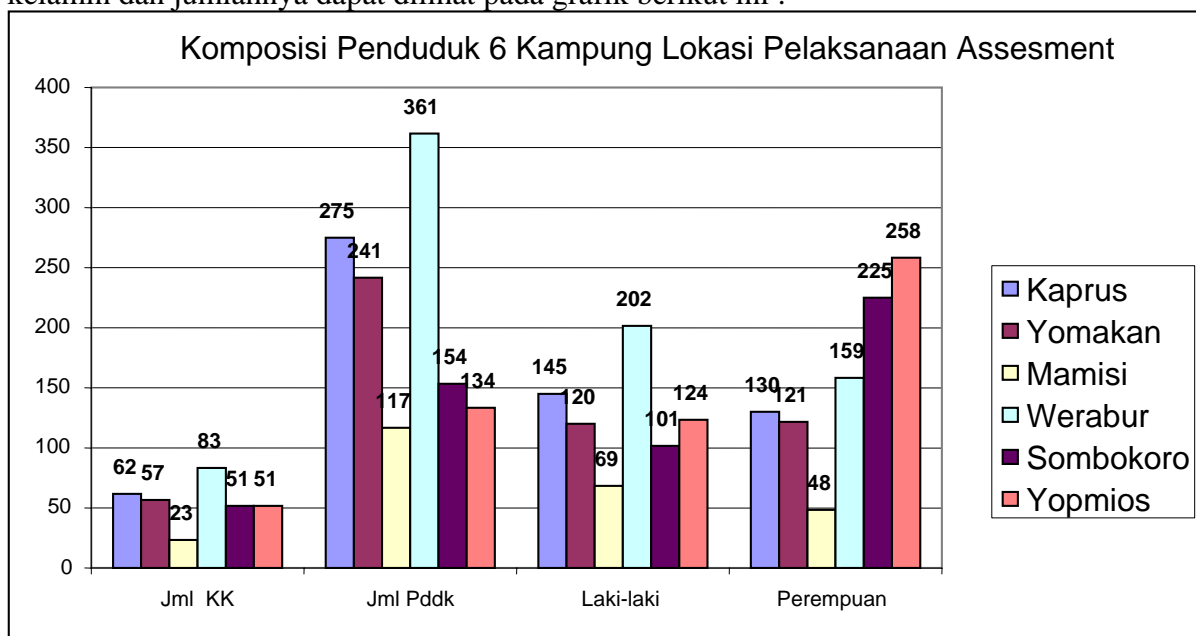
Tabel 3. Komposisi penduduk di 6 kampung dalam 3 Distrik wilayah Assesment di Kabupaten Teluk Wondama

No	Kampung	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	L	P
1	Kaprus	62	275	145	130
2	Yomakan	57	241	120	121
3	Mamisi	23	117	69	48
4	Werabur	83	361	202	159
5	Sombokoro	51	154	101	225
6	Yopmios	51	134	124	258
Jumlah		327	1282	761	941

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Dari enam (6) kampung yang dilakukan assesment, lima (5) berada di wilayah pesisir pantai dan satu (1) berada pada wilayah pegunungan yaitu: kampung Werabur, kampung ini tepat posisinya pada kawasan leher pulau Papua.

Kemudian untuk komposisi penduduk ke- enam kampung berdasarkan jenis kelamin dan jumlahnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada kondisi kampung diatas terdapat perbedaan mencolok yang berkaitan dengan ratio perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Untuk kampung-kampung dimana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki seperti Yopmios dan Sombokoro, terjadi karena memang pada kampung-kampung tersebut banyak angka kelahiran dengan jenis kelamin perempuan. Selain itu lebih banyak laki-laki yang keluar dari kampung terutama pada usia sekolah dan usia kerja. Sedangkan untuk kampung dengan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, seperti kampung Kaprus,

Werabur dan Mamisi, terjadi karena banyaknya kaum perempuan yang kawin keluar dan ikut suami kekampung lainnya.

c. Mata Pencaharian

Sesuai dengan hasil survey dan pengamatan secara visual dilapangan, pada umumnya mata pencaharian utama penduduk yang hidup di wilayah ini adalah nelayan secara khusus penduduk di kampung, Yomakan, Mamisi, Yopmios dan sombokoro. Besarnya jumlah masyarakat nelayan disebabkan oleh banyaknya penduduk yang berasal dari suku Wamesa, Wandamen, Serui, Biak, Buton dan Tanimbar yang kebiasaan hidup mereka memang nelayan.

Khusus untuk penduduk di kampung werabur yang terletak jauh di daratan yaitu kurang lebih 18 km dari garis pantai dengan ketinggian 650 m dpl, umumnya memiliki mata pencaharian dominan sebagai petani subsisten, peramu serta berburu. Namun ada sebagian masyarakat yang berupaya untuk turun ke pantai mencari ikan dengan cara membangun gubuk-gubuk / bevak¹, yang dipergunakan selama masa mencari di laut, gubuk ini juga digunakan pada saat panen hasil pala yang merupakan peninggalan Belanda. karena pemanenan biasanya membutuhkan waktu hingga 3 minggu, kegiatan memanen Pala ini umumnya hanya terbatas pada marga Kandami yang memiliki wilayah ulayat di daerah ini.

Lain halnya dengan masyarakat kaprus yang juga lebih dominan pada mata pencaharian sebagai petani subsisten dan peramu, karena masyarakat yang tinggal di Kaprus umumnya berasal dari suku soub yang asal mula mereka merupakan penduduk yang berasal dari pedalaman pegunungan Arfak.

d. Kehidupan sosial budaya

1. Keekerabatan dan kepemimpinan adat/kampung

Sistem kekerabatan yang berlaku di kampung-kampung di Wondama umumnya dan dikampung dimana assesment dilakukan pada khususnya sangat terstruktur melalui dua suku besar yaitu Wamesa dan Soub pemilik hak ulayat. Didalam masing masing marga tersebut terbagi kedalam beberapa klan/marga yang diyakini sama-sama memiliki satu nenek moyang seperti marga Mokiri, Sayori dan Bikiayi di dalam Masyarakat adat Soub. Adanya perkawinan kedalam dan keluar² selama bertahun-tahun belakangan ini mengindikasikan bahwa kedua masyarakat adat ini mulai menerima dengan baik perkawinan campur. Dalam hal kepemimpinan di dalam suku ataupun marga, biasanya masyarakat suku Wamesa memberikan hak ini kepada seorang kepala suku yang telah dipilih oleh masyarakat. Dan kenyataan ini berbeda pada masyarakat adat Soub yang sistem kepemimpinannya diberikan secara turun temurun. Sedangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin di dalam suku adalah mengatur keharmonisan dan menyelesaikan berbagai persoalan baik yang menyangkut eksternal maupun internal seperti contoh dalam hal perkawinan adat dan penyelesaian konflik

¹ Rumah darurat, sebagai tempat nginap selama mereka ada pada wilayah pesisir pantai untuk melaut.

² Perkawinan Keluar dan kedalam : Keluar artinya pihak laki-laki atau perempuan dengan suku lain; Perkawinan kedalam artinya perkawinan yang dilakukan dalam suku tersebut.

baik antar keluarga, marga, kampung, bahkan suku. Namun selain kepala suku, kepala kampung juga memiliki andil kepemimpinan di dalam kampung, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan kampung dan pengorganisasian masyarakat

2. Sistem Perkawinan adat

Adanya 2 budaya masyarakat adat yang berbeda yaitu suku wamesa dan suku Soub menjadikan tata cara adat perkawinan di wilayah tersebut menjadi lebih kompleks. Karena di dalam suku soub perkawinan antara satu marga dapat dilakukan, seperti perkawinan pria bermarga Iba dengan perempuan bermarga Iba sepanjang kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah. Sedangkan pada suku wamesa hal ini tidak dapat dilakukan tetapi harus mencari marga yang berbeda.

Di masyarakat soub paham patrilinear menjadi bagian dari budaya mereka sehingga laki-laki memiliki kekuasaan, dan berhak atas hak waris. Begitu juga dalam hal mengambil keputusan dimana laki-laki menjadi kunci pemegang keputusan. Hal-hal ini berdampak pada tingginya mas kawin yang dibebankan kepada kaum laki-laki untuk membayar/meminang seorang perempuan yang akan dijadikan istrinya.

3. Pembagian kerja dalam keluarga

Di dalam masyarakat adat wamesa, pembagian kerja di dalam keluarga antar suami, istri serta anak-anak. Hal ini sesuai dengan pandangan mereka bahwa seorang perempuan itu harus dijunjung dan dihargai. Penghargaan terhadap perempuan merupakan pandangan hidup yang secara turun temurun di wariskan kepada anak cucu. Perempuan merupakan simbol burung Cenderawasih yang harus dilindungi dan dijaga keelokannya, karena dari sistem adat biasanya burung cenderawasih dipakai sebagai lambang mahkota dikepala oleh seorang pria yang berwibawa, itu menandakan perlindungan kepada perempuan yang akan melahirkan generasi-generasi mereka dan gambaran lain di kampung Kaprus berbeda cara pandangnya dari suku Soub, dimana seorang perempuan diharuskan melakukan seluruh pekerjaan karena dianggap telah lunas dibayar dengan mas kawin, maka kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab kematian ibu dan bayi cukup tinggi.

e. Kesenian dan kebudayaan

Masyarakat adat Wamesa yang mendiami Teluk Wondama dan sebagian Teluk Bintuni memiliki persamaan budaya dan pola hidup sosial. Hal-hal yang paling menonjol adalah pertunjukan budaya dalam bentuk tarian dan musik tradisional suling bambu. Kegiatan ini pada umumnya dipertunjukkan dalam suatu kegiatan-kegiatan penyambutan seperti pejabat pemerintahan, acara pernikahan, atau acara-acara ritual adat lain di kampung.

1. Kerajinan

Kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat adalah pembuatan kantong yang terbuat dari bahan kulit-kayu yang disebut dengan "noken". Benda ini biasanya digunakan untuk mengisi hasil kebun atau lainnya selain noken masyarakat dapat membuat perahu yang biasanya dipergunakan untuk memancing dilaut atau sebagai alat transportasi jarak pendek.

Perahu bagi masyarakat adat wamesa merupakan simbol kebersamaan dalam melakukan suatu pekerjaan, karena untuk naik perahu biasanya 2- 4 orang tergantung besarnya dan untuk mencapai suatu tujuan mereka akan mendayung secara bersama-sama yang dikemudi oleh salah satu diantaranya.

2. *Tarian*

Tarian adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Wamesa adalah balengan. Tarian ini biasa dilakukan oleh pemuda-pemudi atau anak-anak remaja di kampung, dimainkan mengikuti irama musik tradisional yang dimainkan oleh sekelompok orang. Secara visual tarian ini tidak berbeda jauh dengan yosim pancar yang biasa kita kenal dimana setiap bentuk tarian dimainkan secara berpasangan.

Alat musik yang digunakan adalah gitar bolong, gitar kecil (ukulele), gitar besar menggunakan dua (2) snar nelon ukuran besar atau disebut stand bass, suling bambu dan alat musik tabuh yang disebut dengan tifa atau tambur. Permainan ini dilakukan dengan irama sedang hingga cepat atau sesuai dengan lagu yang dilantunkan. Hingga saat ini balengan masih dikenal dan dimainkan oleh masyarakat, akan tetapi frekuensinya sudah semakin kurang. Hal ini terjadi karena adanya intervensi budaya luar baik dari luar papua maupun luar indonesia. Lagu-lagu daerah yang merupakan hasil karya orangtua maupun nenek moyang telah banyak dilupakan, sehingga sering digunakan lagu-lagu baru yang mengiring tarian balengan telah terkontaminasi dengan jenis-jenis musik luar yang memang secara umum memiliki kombinasi nada yang lebih variatif.

3. *Musik tradisional suling bambu*

Suling bambu menjadi bagian dari budaya masyarakat adat Wamesa yang memang tidak berbeda dengan kampung-kampung di teluk Wondama, pada awalnya alat musik ini dimainkan dalam berbagai kegiatan tradisional seperti musik latar tarian tradisional atau dapat juga dipakai untuk menyambut kedatangan orang luar yang disegani atau dihargai, akan tetapi pada perkembangannya suling bambu banyak digunakan untuk peringatan hari besar keagamaan, karena lagu-lagu yang dimainkan sudah banyak menggunakan lagu-lagu atau instrumen gerejawi. Suling bambu dapat dimainkan jika pemain berjumlah tidak kurang dari 6 (enam) orang yang antara lain empat orang memainkan suling bambu dimana masing-masing orang memainkan suling dengan nada yang berbeda yang memang telah diatur sedemikian rupa hingga menghasilkan nada yang serasi yaitu dari nada suara satu (Sopran), suara dua (Alto), suara tiga (Tenor) dan suara empat (Bass) dan dua orang bertugas sebagai penabuh tifa atau tambur dengan diameter tifa atau tambur yang berbeda.

4. *Larangan dan Mitos kepercayaan*

Sekalipun masyarakat telah memegang/memeluk agama sejak lama akan tetapi adat kepercayaan akan sesuatu hal yang dianggap sakral (Pamali) masih tetap dipertahankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keyakinan masyarakat akan resiko yang diterima jika melanggar larangan-larangan tersebut. Adapun larangan-larangan (pamali) akan tempat tempat sakral tersebut seperti : tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh

buang air sembarangan, tidak boleh memikirkan atau membayangkan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. Adapun tempat-tempat dan aturan larangan tersebut adalah, Tanjung Wasambin, Larangan tentang menyapa orang yang berburu, Gunung Sarwaki, Larangan menghardik anjing, Konyusu (Tanjung bersin), Pantai Aiwuki, Ambersibui, Numanderi.

f. Kegiatan Adat/ Tradisi

Selain aturan-aturan dan kepercayaan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam masyarakatpun memiliki upacara adat yang masih sering dilakukan oleh masyarakat, antara lain : Tikam telinga, gunting rambut anak pertama, bawa keluar anak pertama dari rumah sejak kelahirannya, antar anak perempuan, buat kajang rumah kubur, nikah Adat, tertawa bayi (yang dimaksud dengan tertawa bayi adalah pemberian nama kakek atau nenek kepada cucunya yang diikuti dengan penyerahan benda adat seperti piring dulu secara timbal balik antara keduanya), buka pintu rumah baru, perahu baru, perempuan tidak boleh memegang alat-alat mencari dari laki-laki/bapak, anak mantu tidak boleh menyebut nama kafir bapak mantunya sedangkan nama kafir (*nama yang diberikan berdasarkan alam tempat dimana ia dilahirkan seperti nama gunung*). dimana nama inilah yang tidak boleh disebut, penyus tidak boleh dimakan oleh ibu hamil karena akan menderita lebih lama saat melahirkan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap tradisi-tradisi ini biasanya dikenakan sanksi berupa denda atau terkena sakit.

g. Perekonomian

Masyarakat adat wamesa yang kaya akan hasil laut dan juga hasil yang terdapat di darat. Dari kedua hasil tersebut membuat para pedagang dan pembeli yang berdatangan ke kampung-kampung untuk membeli hasil-hasil yang terdapat disana. Potensi laut adalah : Teripang, Bia lola, Ikan garam, Ikan segar, Sirip Magewan, Udang, Lobster, dan Bia garu. Potensi hasil lain yang terdapat di darat, mulai dari hewan dan tumbuhan. Hasil darat adalah: Dendeng, Tanduk Rusa, Bunga Pala, Biji Pala, Kayu Gaharu, dan kayu masoi.

Tabel 4. Komoditi Dan Rata-Rata Jumlah Hasil Panen Dan Perkiraan Nilai Riil Hasil Panen Dalam Satu Tahun, Tahun 2004.

No.	Jenis komoditi	Panen		Harga/ satuan (Rp)	Sub Total (Rp)
		Frek/thn	Jml/panen		
1.	Ikan asin	12	10 kg	8.000,-	960.000,-
2.	Ikan segar	100	1 ikat	5.000,-	500.000,-
2.	Dendeng	8	10 kg	10.000,-	800.000,-
3.	Pala bunga	1	10 kg	15.000,-	150.000,-
4.	Biji pala	1	50 kg	5.000,-	250.000,-
5.	Masowi	4	100 kg	7.000,-	2.800.000,-
6.	Gaharu	4	2 kg	50.000,-	400.000,-
7.	Sirip Hiu	3	12 kg	65.000,-	7.800.000,-
8.	Bia lola	6	20-50 kg	35.000,-	700.000,-
9.	Taripan	8	15-30 kg	15.000,-	2.250.000,-
10.	Tanduk rusa	5	5-10 kg	15.000,-	75.000,-

11.	Udang Lobsfter	7	10- 20 kg	70.000,-	7.000.000,-
Jumlah. Total		159	245 kg	2.920.000	20.913.000,-

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Dari data diatas dapat diketahui bahwa nilai pendapatan rata-rata keluarga dalam satu tahun adalah Rp. 20.913.000,- dengan perkiraan pendapatan perbulan berkisar Rp. 1.742.750,-/Kepala Keluarga. Namun nilai ini merupakan nilai tertinggi pendapatan keluarga karena nilai ini tidak konsisten, dan biasanya lebih sedikit dari apa yang tercatat tersebut. Jika dilihat dari keadaan perekonomian dan nilai kemahalan barang saat ini didaerah tersebut, maka nilai tersebut masih tergolong sangat kecil dan pembelian harga hasil-hasil tersebut juga kadang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. kurangnya motifasi masyarakat dalam usaha mengelolah lahan pertanian dan laut yang ada, menyebabkan rendahnya pendapatan per keluarga, namun faktor lain yang sangat mempengaruhi adalah tidak adanya sarana pemasaran atau akses pasar yang baik sehingga masyarakat seakan-akan merasa sia-sia jika melakukan suatu kegiatan dengan tingkat produksi yang tinggi, karena mereka tidak tahu harus menjual kemana. Sedang masalah lain yaitu modal dan peralatan kerja. Banyak masyarakat yang mendapatkan modal dari pengusaha dan bila mereka mendapatkan hasil harus di jual kepada pemberi modal dengan harga yang rendah dan ada juga pemotongan dalam mengembalikan modal kepada pengusaha, sehingga nilai pendapatan perbulan perkeluarga itu hanya nilai nominalnya tetapi sesungguhnya tidak ada.

Selain sagu, masyarakat memperoleh penghasilan lain yaitu dari penyulingan minyak lawang, biji dan bunga pala. Untuk penyulingan minyak lawang masyarakat werabur dapat menghasilkan rata-rata 3 liter dalam satu bulan penyulingan dengan nilai per liter mencapai Rp. 75.000,-. kegiatan ini biasanya dilakukan dalam kelompok dimana setiap kelompok terdiri antara 10 – 15 orang. Penyulingan ini tidak kontinyu dilakukan setiap bulan tetapi ada waktu-waktu tertentu untuk istirahat sehingga dalam satu tahun penyulingan hanya dapat dilakukan 4 kali. Begitu juga dengan panen pala, mengingat pala hanya sekali musim dalam satu tahun maka pemanenanpun hanya sakali dalam satu tahun dengan. Harga biji pala antara berkisar Rp. 7.500 per kg, bunga pala Rp. 12.500 per kg. Dalam sekali musim masyarakat dapat memanen 50 kg biji pala, 12,5 kg bunga pala. Kondisi syarakat yang jauh dari lokasi pemasaran hasil bumi dan transportasi antar kecamatan dan pulau menjadikan hasil-hasil bumi yang sekiranya memiliki nilai ekonomis tinggi menjadi kurang bernilai,.

h. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor dalam kehidupan masyarakat yang belum mendapat perhatian serius pemerintah. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah pengembangan dan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan di kampung. Pada tabel dibawah ini terdapat gambaran tentang seberapa besar kontribusi pemerintah terhadap kesehatan di kampung-kampung dimana assesment dilakukan.

Tabel 5. Tenaga kesehatan di Distrik Kampung-kampung dimana assesment dilakukan.

No	Nama kampung	Dokter	Mantri.	Suster	Dukun. b	Kader	Posyandu
1	Kaprus	-	-	-	1	1	1
2	Yomakan	-	-	-	2	-	-
3	Mamisi	-	-	-	1	2	2
4	Werabur	-	-	-	3	2	2
5	Sombokoro	-	-	-	7	1	1
6	Yopmiosmios	-	1	-	2	2	2

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Data diatas menunjukkan bahwa secara kuantitatif sarana kesehatan yang terdapat pada Kampung/Dusun di pesisir 3 distrik belum terpenuhi. Khususnya bagi penduduk yang tinggal di kampung-kampung harus menunggu pelayanan keliling dari petugas kesehatan harus ke ibukota distrik Rumberpon atau Ransiki dan ibu kota distrik Windesi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan sangat dibutuhkan demi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di masing-masing kampung.

Tabel 6. Petugas Kesehatan yang berada di Puskesmas Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama.

No	Perawat/ Jenjang pendidikan	Jumlah		Total	Tt/Ptt.
		L	P		
1.	Mantri dan suster	6 Org	9. Org.	15.Org.	PT
2.	Bidan	-	3 .Org.	3 .Org.	PTT
3	Bidan A	-	3. Org.	3 . Org.	PTT
4	Bidan Desa C	-	4. Org.	4 . Org.	PTT.
5	Dukung Beranak	-	6. Org	6. Org	PTT.
6	Jumlah Total	-	25. Org	31. Org.	PT/PTT

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Keterangan : PT : Pegawai Negeri Tetap.; PTT : Pegawai Tidak Tetap.

Melihat petugas kesehatan yang ada diatas untuk melayani masyarakat di enam kampung memang akan mengalami kendala, karena untuk menjangkau enam kampung baik yang berada di pesisir dan yang berada di bagian darat. Sebarang penduduk juga bervariasi sehingga dalam hal pelayanan kita juga membutuhkan beberapa tenaga untuk melayani tiap kampung dan harus bermalam untuk beberapa hari, itupun bagi kampung yang penduduknya berjumlah banyak dan kalau penduduk yang jumlah penduduk nya sedikit petugas harus pulang kembali ke Distrik Windesi.

i. Pendidikan

Pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu program utama pemerintah karena hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, tidak terkecuali siapapun dan dimanapun, semua berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil yang susah di jangkau oleh

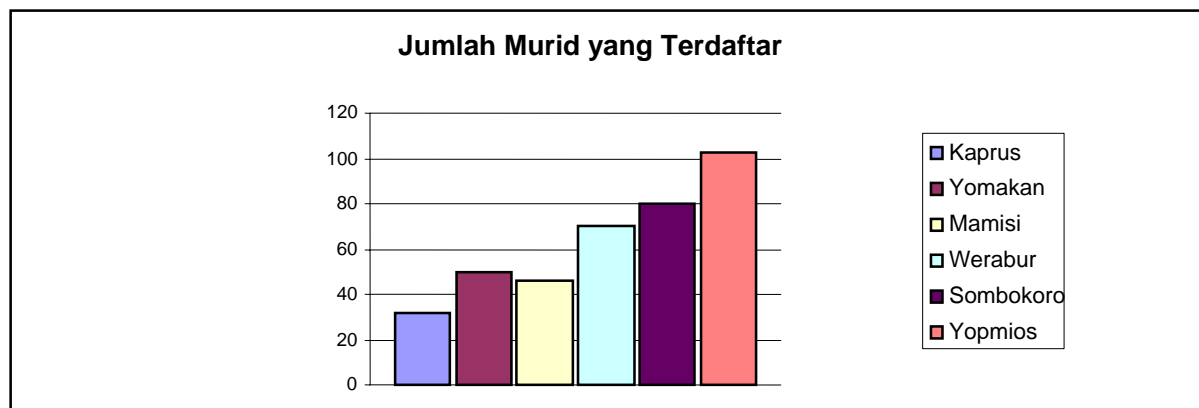
para petugas guru, namun pada kenyataannya masyarakat yang berada pada wilayah tersebut sering kali tidak diperhatikan hal ini karena tidak adanya tenaga pendidik yang memadai atau karena tenaga pendidik yang seringkali tidak berada ditempat dimana mereka ditugaskan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti tidak tersedianya rumah Guru, letak kampung yang cukup jauh dari pusat kota, transportasi yang cukup sulit untuk menjangkau tempat tugas, serta kesejahteraan Guru dikampung-kampung yang kurang diperhatikan.

Di wilayah Teluk Wondama, pendidikan formal adalah salah satu yang seharusnya mendapat perhatian penting dari pemerintah, terutama dalam hal penyadaran orang tua akan pentingnya sekolah dan pengevektifan kembali guru-guru yang meninggalkan tanggungjawabnya. Untuk melihat fasilitas dan sejauh mana pendidikan berjalan di dalam kampung dapat dilihat dari tabel berikut dibawah ini :

Tabel 7. Keberadaan sekolah, jumlah ruang kelas, guru, dan murid yang terdapat di 6 kampung dimana assesment dilakukan.

No.	Nama Kampung	Jenjang Sekolah	Jumlah		
			Ruang	Guru	Murid
1	Kaprus	SD	3 kelas	2	32
2	Yomakan	SD	3 kelas	2	50
3	Mamisi	SD	3 kelas	3	46
4	Werabur	SD	3 Kelas	4	70
5	Sombokoro	SD	3 Kelas	5	80
6	Yopmiosmios	SD	3 Kelas	1	103

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, *YALHIMO*



Dari grafik dan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah murid tertinggi berada di kampung Yopmiosmios, dan terendah di kampung Kaprus.

i. Sarana dan Prasarana Umum

Sebagai bukti perhatian pemerintah akan kebutuhan masyarakat secara umum untuk hal-hal yang sifatnya layanan umum maka seiring dengan pembangunan kampung memperoleh sarana melalui bantuan-bantuan sosial atau pengadaan-pengadaan bentuk lain,

adapun sarana-sarana yang terdapat di Kampung adalah pembuatan MCK, Sarana Air bersih, Sarana Kesehatan berupa pembangunan Pusat Pembantu Kesehatan Masyarakat (PUSTU), dan Listrik Masuk Desa.

Sarana Air Bersih

Fasilitas Air bersih ini biasanya dapat berupa sumur atau distribusi air bersih kedalam kampung dengan memanfaatkan pipa dan kran-kran distribusi untuk sumur, dapat dilihat di kampung Yomakan dan Kaprus, sedangkan untuk pipa-pipa distribusi seperti di kampung Werabur, dan Kaprus yang kondisinya telah rusak untuk menanggulangi kebutuhan air bersih dan MCK biasanya masyarakat membuat sumur swadaya atau memanfaatkan kali/sungai yang berada di sekitar kampung

Sarana kesehatan

Kampung-kampung yang memiliki sarana Puskesmas Pembantu (PUSTU) adalah kampung Werabur, Kaprus, dan Yopmiosmios namun hingga saat ini fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan karena tidak adanya tenaga medis Hal ini memaksa masyarakat untuk datang berobat di Ransiki atau di Distrik Rumberpon maupun distrik Windesi. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak seperti pelayanan Posyandu sangat jarang dilakukan bahkan dalam satu tahun hanya dilakukan sebanyak 1 kali saja. Yaitu tepatnya pada kampung Werabur dan Mamisi.

Sarana Perumahan

Umumnya rumah-rumah masyarakat yang terdapat di kampung kaprus adalah rumah non permanen yang sangat sederhana dan merupakan swadaya/pribadi. Namun ada juga kampung yang mendapatkan rumah bantuan sosial seperti kampung Mamisi, Werabur, dan Yopmios, pada tahun 2005 ini direncanakan akan dibangun lagi di kampung Yomakan, sedangkan rumah-rumah bantuan pemerintah yang terdapat dikampung Kaprus bukanlah bantuan dengan program yang sama dengan kampung yang lain, tetapi perumahan tersebut adalah bantuan atas bencana alam gempa bumi yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

Sarana Penerangan

Untuk memenuhi kebutuhan penerangan di dalam kampung umumnya masyarakat menggunakan lampu pelita atau petromaks (lampu gas) namun akhir-akhir ini dengan adanya bantuan pemerintah dan sumbangan dari pengusaha pengelola kayu masyarakat mulai menikmati lampu neon maupun lampu pijar dengan menggunakan genzet berkekuatan 1000 watt, terkecuali werabur yang hingga saat ini masih menggunakan lampu pelita atau lampu gas. Untuk membiayai bahan bakar yang dibutuhkan maka masyarakat secara kolektif akan memberikan sumbangan setiap bulannya. Tetapi di beberapa kampung ada juga masyarakat yang mampu membeli dan menggunakan genzet pribadi sebagai alat penerangan keluarga, walaupun dalam hal ini mereka terkendala pada masalah pembiayaan dan ketersediaan bahan bakarnya.

Sarana Pemerintahan kampung

Sarana pemerintahan kampung yang dimaksud adalah segala fasilitas yang mendukung berjalannya pemerintahan kampung, sarana tersebut berupa kantor kepala kampung dan

balai pertemuan kampung, fasilitas ini hanya terdapat di kampung Yomakan dan Kaprus sedangkan empat kampung lainnya belum memilikinya.

Sarana dan prasaran pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di kampung-kampung lokasi assesment sangat memprihatinkan karena rata-rata tidak pernah di rehab, dan selain itu fasilitas belajar sangat minim, dan bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki buku paket seperti SD Mamisi, Werabur, dan Kaprus. Masalah lain adalah tenaga guru yang mengajar di sekolah tersebut karena guru-guru yang ditugaskan lebih banyak menghabiskan waktunya di kota.

Analisis PKB Kampung-Kampung Kabutan Teluk Wondama

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah penduduk yang terdiri dari 327 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 1282 (Jiwa orang) merupakan sebuah modal besar yang ada di wilayah Kabupaten Teluk Wondama. selain itu dengan adanya masyarakat yang telah mengecap pendidikan hingga kelevel pasca sarjana menjadi suatu pegangan modal yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama. selain pendidikan formal, pendidikan non formal/informal juga dimiliki oleh masyarakat, seperti keterampilan dan keahlian dalam membuat kerajinan seperti noken, membuat perahu, membangun rumah/gedung, dan keterampilan lain yang tidak dapat diperoleh di pendidikan formal. Namun dalam kenyataannya sering sekali orang kota atau orang luar menganggap masyarakat tidak mengetahui apa-apa atau kasarnya dibilang bodoh tanpa jelas dari sisi mana kebodohan tersebut dapat dibenarkan. Karena selain memiliki kemampuan membuat berbagai keterampilan dan kerajinan, masyarakatpun mengetahui bagaimana cara mengelola alamnya yang melimpah agar dapat dipergunakan secara berkelanjutan karena biasanya mereka memiliki kearifan lokal yang sangat menarik efektif dan efisien dijalankan.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Kabupaten Teluk Wondama Khususnya Wilayah dimana Assesment dilakukan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi, baik di daratan maupun di laut. Adapun potensi tersebut adalah :

- Potensi biologis daratan. Kaya dengan berbagai jenis flora tumbuhan komersil seperti kelapa(Anggadi), palem (Dui), sagu (Anarawo), matoa (Ari), kayu besi/merbau(Bosi), dan rotan (Waibita), dengan fauna antara lain rusa/*Cervus timorensis*(Mandiana), babi(Pimuna) dan kuskus(Aniei).
- Habitat mangrove dan padang lamun. Pencegah erosi garis pantai; kaya dengan berbagai jenis kepiting, mollusca dan ikan-ikan muda; sebagai tempat ikan bertelur dan berkembang, juga merupakan habitat bagi jenis duyung, penyu laut dan burung laut.
- Habitat pantai pasir. Dengan pantai pasir putih yang bertopografi landai; kaya dengan dengan berbagai jenis umang, kepiting dan udang.
- Habitat terumbu karang. Hamparan terumbu karang hampir tersebar merata mengelilingi bagian pulau Rumberpon.

c. Sumber Daya Sosial

Kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam bidang sosial budaya adalah adanya kekerabatan dan persatuan, kerja sama/gotong royong yang masih terus dipertahankan dan dipelihara, masih adanya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan dan menghargai nilai-nilai adat, berjalannya lembaga pemerintahan kampung yang dipimpin langsung oleh seorang kepala suku, adanya budaya kesepakatan dalam pengambilan keputusan, dan adanya Pergeseran tradisi menuju konsumtif

d. Potensi Fisik

Jika melihat dan membandingkan Kekayaan fisik yang dimiliki oleh Kabupaten Teluk Wondama secara umum dan wilayah pelaksanaan assesment secara khusus dengan Kabupaten Manokwari, maka dapat dikatakan bahwa kabupaten tersebut masih memiliki sarana dan prasaran yang masih minim. Hal ini cukup dimengerti karena kabupaten tersebut masih sangat muda, akan tetapi jika ditinjau dari latar belakang kabupaten manokwari sebagai kabupaten induk yang pada awalnya menangani daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa selama ini pembangunan sarana dan prasarana di dalam kampung sangat kurang dan bahkan hampir tidak ada perubahan yang mendasar. masyarakat hanya memiliki beberapa sarana prasarana fisik baik bantuan maupun swadaya masyarakat. Seperti perumahan masyarakat, gedung gereja, Sarana air bersih, sarana kesehatan berupa bangunan PUSTU, sarana MCK, sarana komunikasi berupa telepon satelite, sarana pemerintahan kampung, sarana pendidikan, dan sarana penerangan. Untuk sarana peribadatan dan sarana perumahan umumnya masyarakat mengadakannya dengan swadaya, seperti rumah misalnya, walaupun ada kampung yang mendapatkan bantuan perumahan dalam jumlah yang sangat terbatas.

Tabel 8. Keberadaan sarana dan Prasarana kampung di Kabupaten Teluk Wondama

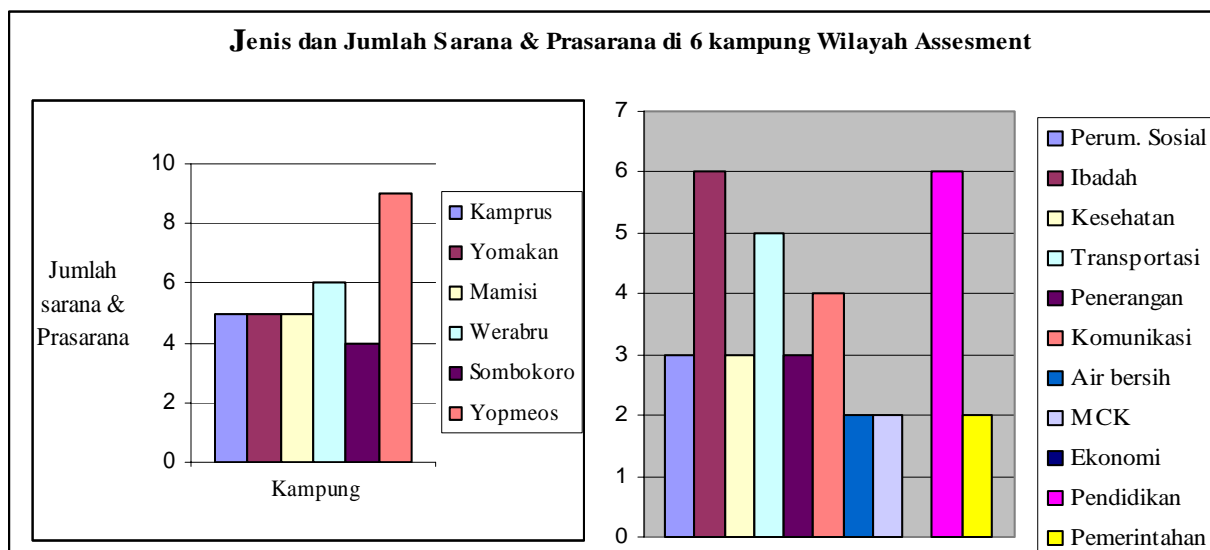
Sarana	Nama Kampung					
	Kamprus	Yomakan	Mamisi	Werabru	Sombokoro	Yopmios
Perum. Sosial			✓	✓		✓
Ibadah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kesehatan	✓			✓		✓
Transportasi	✓	✓	✓		✓	✓
Penerangan		✓			✓	✓
Komunikasi	✓	✓		✓		✓
Air bersih			✓			✓
MCK				✓		✓
Ekonomi						
Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pemerintahan	✓	✓				

Sumber : Studi Assesment YALHIMO, 2005

Dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk sarana ibadah umumnya dibuat masyarakat secara mandiri, yaitu dengan bahu membahu menggalang dana, sedangkan sarana transportasi biasanya dimiliki masyarakat secara pribadi maupun berkelompok

dengan cara swadaya. yang menjadi perhatian adalah tidak adanya sarana pemasaran hasil, sehingga berapapun jumlah produksi pertanian maupun perikanan masyarakat hasilnya tetap susah untuk dipasarkan. Untuk memperoleh uang biasanya masyarakat hanya mengharapkan pedagang pengumpul yang datang membeli hasil mereka, namun saat ini di hampir semua kampung sudah ditinggali oleh pedagang pengumpul, karena dengan hidup dan bersama dengan masyarakat pedagang pengumpul akan mengurangi biaya transportasi dan biaya lain-lain, selain itu adanya gejala sifat monopoli pada pedagang dalam artian hasil masyarakat akan secara otomatis dijual kepadanya, walaupun harga lebih murah dibandingkan dengan pedagang yang baru datang tersebut, namun adanya pedagang pengumpul yang tinggal di kampung juga secara tidak langsung mempermudah masyarakat menjual hasil sepanjang komoditi itu di perdagangkan oleh pedagang,

hal yang kurang baik dalam kenyataan ini adalah tidak adanya kekuatan harga pada masyarakat selaku penjual, sehingga mereka hanya mengikuti patokan harga yang ditetapkan pedagang pengumpul.



e. Potensi Keuangan

Budaya menyimpan telah lama ada di dalam masyarakat adat di Kabupaten Teluk Wondama, walaupun tidak secara jelas terlihat, salah satu contoh dalam budaya menyimpan adalah pengelolaan harta mas kawin yang memiliki nilai yang tinggi secara adat. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya pengarahan dan sosialisasi di tingkat kampung tentang arti dan manfaat menabung, selain itu tidak adanya bank yang tertarik untuk turun ke kampung sebagai bukti pelayanan secara murni ke masyarakat, akses masyarakat ke bank atau lembaga penyimpan lain sangat susah karena jalur turut mempengaruhi karena banyak masyarakat yang menganggap bank sebagai tempat untuk orang yang ber uang banyak. Selain masalah tersebut, masyarakat yang tinggal di kampung harus ke kota kabupaten dulu baru dapat menyimpan uang. Kampung Werabur juga memiliki tabungan/simpanan seperti simpanan kelompok ibu-ibu (PKK), namun menurut

ibu-ibu disana mereka tidak pernah memegangnya karenanya dana tersebut belum pernah dimiliki atau digunakan sebagaimana mestinya, bahkan yang didengar hanya jumlah uangnya saja tanpa adanya bukti nyata dalam bentuk uang. Sedangkan Kelompok usaha jemaat sedikit lebih baik, dimana motifasi yang sama dalam upaya pembangunan Gereja menjadikan masyarakat mau bahu-membahu mencari dana, biasanya dan motifasi seperti inilah yang belum ditemui pada kegiatan-kegiatan pengumpulan dan pengelolaan dana yang lain, seperti kelompok pengolah ikan asin, kelompok budidaya teripang, dan lain-lain.

B. KABUPATEN SORONG

Letak dan luas wilayah

Kabupaten Sorong dengan luas wilayah $\pm 17.084,50 \text{ Km}^2$ yang termasuk dalam gugusan 610 pulau besar dan secara geografis berada pada koordinat 130^0 BT , dan 133^0 BB , 2^0 LU , 1^0 LS sampai ke selatan. Luas daratan kabupaten Sorong sekitar 72,40 % atau 2.311.634,54 hektar dengan luas hutan produksi sebesar 1,85 juta hektar. Secara administratif pemerintahan wilayah Kabupaten Sorong berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Pasifik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sorong selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Raja Ampat
- Sebelah Timur : Kabupaten Manokwari

Kabupaten Sorong secara umum berada di wilayah Malamoi (suku Moi) yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sorong, seluruh wilayah Kota Sorong dan sebagian Kabupaten Sorong Selatan (kampung Malabolo dan Kalamet).

Kondisi geografis

Secara umum daerah Kepala Burung terbagi menjadi tiga wilayah utama atau Kabupaten yaitu, wilayah kepulauan, yang disebut Kabupaten Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya di pesisir Selatan dan Utara, serta wilayah daratan atau *tanah besar*. Wilayah daratan terdiri dari wilayah administratif Kota, dan Sorong Kabupaten, serta Kabupaten Sorong Selatan. Di bagian utara terdapat sebuah gunung yang tingginya 3000 m^2 di atas permukaan laut, yaitu puncak Tamrau, sementara di bagian selatan umumnya didominasi daerah datar dan ber-rawa (hutan bakau). Jenis tanahnya pun bervariasi, mulai dari organosol, aluvial, lotosal, podsolik merah kuning dan podsolik coklat kelabu. Sorong Daratan adalah salah satu wilayah di Tanah besar ini.

Wilayah di ujung barat Papua ini kaya akan sumber daya alam, 87% dari luas daratannya berupa hutan yang tersebar merata di 17 kecamatan. Hasil hutan memberikan banyak pemasukan bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), misalnya pada tahun 2000 mencapai Rp 116,7 milyar. Namun penjarahan hutan dalam kurun waktu setengah tahun terakhir telah meraibkan harta senilai Rp 265 milyar, setara dengan 140 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sorong tahun 2001.

Sumber Daya Alam

Kandungan tambang yang ada di perut bumi Sorong didominasi oleh minyak bumi, dan kekayaan ini telah mengundang beberapa perusahaan tambang untuk melakukan eksploitasi. Di antara perusahaan-perusahaan itu tercatat yang terbesar adalah Pertamina dan Petrocina (PMA dari Cina). Eksploitasi tambang di Sorong pada tahun 2000 menyumbang 34,93 persen dari total kegiatan ekonomi di daerah ini yang mencapai Rp 1,06 trilyun. Topografi wilayah Kabupaten Sorong yang sebagian besar berupa perbukitan tandus di bagian utara dan rawa-rawa di sisi selatan menjadi persoalan tersendiri bagi pengembangan pertanian, terutama tanaman pangan. Pertanian memang menjadi penyumbang terbesar, namun bukan dari tanaman pangan, melainkan dari perikanan dan kehutanan. Karena itu beras sebagai makanan pokok yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, harus didatangkan dari Depot Logistik (Dolog) di Makasar. Ketergantungan terhadap wilayah lain ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak menanam padi, mereka lebih banyak mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok sehari-hari.

Sarana dan Prasarana

Di Sorong terdapat fasilitas 2 lapangan terbang, Jeffman dan Osok yang didarati oleh 3 penerbangan komersial nasional. Bandara Osok dibangun dengan dana pinjaman bank dunia sebesar 36 juta dollar AS pada tahun 2002. Diproyeksikan bandara ini akan menjadi bandar udara terlengkap dan terbesar di Papua, serta diharapkan mampu menunjang Sorong Daratan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu di Papua. Selain itu terdapat juga satu buah pelabuhan laut yang disandari 9 kapal penumpang besar.

Keadaan Umum Kampung di Wilayah Assesment

Kampung Maladofok

a. Sejarah kampung dan batas administratif

Sejarah kampung maladofok dimulai pada Pada tahun 1951 yang ditandai dengan seorang Guru injil yang pertama sampai di maladofok untuk bertugas adalah *Matius Klaibin* setelah itu dilanjutkan oleh Guru injil *Pilipus Asmuruf* dan *Barens Malibela* pada tahun 1967. Pada tahun 1982, perkembangan jumlah penduduk semakin meningkat maka masyarakat mulai membuka lahan (menebang hutan) untuk areal pemukiman namun maladofok masih tetap sebagai dusun atau Rukun Keluarga (RK) dari kampung Sayosa (sekarang Ibu kota Distrik). Kampung Maladofok merupakan salah satu kampung yang terletak di pedalaman Kabupaten Sorong dan masih termasuk dalam wilayah masyarakat adat *Mala Moi*. Kampung ini berada di bagian selatan dari kota Sorong, Maladofok termasuk dalam wilayah pemerintahan Distrik Sayosa.

Secara administratif kampung Maladofok memiliki batas-batas wilayah pemerintahan kampung sebagai berikut:

- Bagian Timur : Distrik sayosa
- Bagian Barat : Klamono
- Bagian Utara : Kali klasafet
- Bagian Selatan : Disfra (Hilir kali Klawilis)

Aksesibilitas yang biasanya digunakan adalah menggunakan transportasi darat (taxi) melalui jalur jalan Sorong-Ayamuru. Untuk dapat sampai ke kampung Maladofok dapat digunakan transportasi darat melalui jalan Sorong – Ayamaru.

Namun yang menjadi kendala bagi masyarakat kampung ini adalah armada angkutan (taxi) untuk melayani kebutuhan masyarakat tidak ada, sehingga masyarakat ini jika ingin ke kota Sorong harus menumpang Truck atau menunggu taxi yang kembali dari ayamaru (jka dalam keadaan tanpa penumpang).

Kampung Malaumkarta

Kampung Malaumkarta merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam pemerintahan Distrik Makbon dan terletak dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong bagian Utara.

Pada awalnya masyarakat kampung Malaumkarta hidup secara terpisah di dua kampung yang letaknya tidak terlalu berjauhan dimana jarak antara kedua kampung tersebut kurang lebih 4 kilo meter. Kedua kampung ini sudah ada sekitar tahun 1930 – an dimana dan disebut sebagai akhir masa pengembaraan masyarakat malaumkarta di hutan dan mulai hidup menetap di suatu tempat dan kemudian membentuk kampung yaitu kampung Swatuk dan Swatolo. Pada tahun 1947 tanggal 14 desember Injil pertama kali masuk di kampung Swatuk dan Swatolo yang di bawah seorang Guru injil yang bernama Bertus kalami maka masyarakat yang hidup di kedua kampung ini mulai di persatukan dan membentuk satu kampung tetap di Swatuk, dimana arti dari nama kedua kampung ini terdiri dari dua kata yaitu Swa berarti palabuhan sedangkan Tuk berarti Kayu kemenyaan dan Tolo berarti Kayu Gayang. Sehingga arti nama sebenarnya dari kedua kampung ini adalah pelabuhan kayu kemenyaan dan kayu Gayang.

Sejak tahun 1947 ini masyarakat sudah mulai mengenal injil dan hidup dalam suatu wilayah secara bersama. Kemudian sampai pada tahun 1968 terjadi peristiwa OPM dan peristiwa ini cukup meresahkan Masyarakat, sehingga masyarakat kembali mengungsikan diri, ada yang kembali lari dan bersembunyi di hutan, ada pula yang lari dan menetap di kampung-kampung lain seperti Mega, Sausapor dan Werur. Untuk berlindung sampai pada tahun 1969 situasi mulai membaik (aman) setelah pendaratan pasukan Brawijaya dari Pulau Jawa yang dikirim untuk tugas operasi penumpasan OPM sekaligus pemulihan keamanan. Setelah operasi pemulihan keamanan ini maka masyarakat sebagian ada yang kembali ke kampungnya namun ada pula yang memilih untuk tetap tinggal.

Tahun 1971 masyarakat yang telah kembali ke kampung ini mulai memilih kepala kampung, dimana pada saat itu ada tiga (3) kepala kampung yaitu Korneles Kalami, Aleks

Magablo, dan Abdul Mirin. Saat itu kampung ini masih berupa RK (dusun) dan masuk dalam wilayah pemerintahan Kampung (desa) Makbon. Pada tahun 1972 terbentuklah kampung yang pada saat itu belum memiliki SK (belum definitif). Tahun 1983 oleh dinas kependudukan diadakan penyuluhan sosial tentang abrasi, tanah longsor dan kemungkinan penambahan penduduk yang nantinya akan terjadi sehingga masyarakat yang bermukim di kampung lama (kampung Swatuk) mulai mencari tempat yang cocok untuk di jadikan sebagai daerah pemukiman dan akhirnya pada tahun 1984 oleh masyarakat di adakan "Timai" (upacara adat) untuk pembukaan tempat pemukiman penduduk yang baru di malaumkarta. Dimana arti nama dari malaumkarta sendiri terdiri dari dua kata yaitu Mala artinya Gunung dan Um artinya Pulau sedangkan karta adalah merupakan kependekan dari Jakarta sebagai sebutan yang di berikan oleh tentara Brawijaya waktu itu.

Terbentuknya kampung Malaumkarta ini melalui SK pemerintah tanggal 1 April 1992 dengan batas-batas pemerintahan administratif sebagai berikut :

- Bagian Timur : Kampung Asbaken
- Bagian Barat : Dusun Kawadas
- Bagian Utara : Samudra Pasifik
- Bagian Selatan : Kampung Klalu.

Aksesibilitas yang biasanya digunakan adalah menggunakan transportasi darat dan dilanjutkan menggunakan transportasi laut untuk mencapai kampung Malaumkarta. Untuk dapat mencapai kampung Malaumkarta yang termasuk dalam pemerintahan Distrik makbon ini kita dapat menggunakan jalur transportasi darat dari pasar Remu ke Makbon dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit. Setelah itu di lanjutkan dengan menyeberang menggunakan perahu jhonson dengan waktu tempuh sekitar 15 menit karena kampung malaumkarta terletak di tepi pantai pada bagian utara dari Kabupaten Sorong.

Kampung Baingkete

Kampung Baingkete pada awal berdirinya kampung pada tahun 1929 atau sebelum perang Jepang dimana masyarakat kampung ini mengenal zaman ini sebagai zaman burung kuning (Tidore). Bapak Yipulum Mubalen merupakan salah satu orang yang pertama membuka dan mendirikan kampung yang selanjutnya ditunjuk sebagai kepala Kampung.

Setelah kepemimpinan Yipulum berakhir di gantikan oleh Piter Mubalen sebagai kepala kampung berikutnya selama dua (2) periode sampai pada perang sekutu tahun 1942. ketika saat kependudukan tentara Jepang (perang sekutu) kampung kembali di kosongkan karena masyarakat kembali melarikan diri ke hutan, Sausapor dan Werur sebagai pangkalan tentara sekutu utuk menyelamatkan diri dan berlindung. Setelah tahun 1945 atau tepat saat diproklamirkan kemerdekaan RI dan berakhirnya masa kependudukan tentara Jepang maka masyarakat kampung Baingkete mulai berkumpul kembali dikampung oleh Marthinus Mubalen sebagai kepala kampung yang baru bersama dengan Gustaf Ulim. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1957 Gereja Elim Baingkete di dirikan oleh masyarakat kampung.

Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1964 seorang Guru Injil yang pertama bernama Lukas Raharusun sampai ke kampung Baingkete yang kemudian di susul oleh dua orang Guru Injil berikutnya yang masing-masing bernama Petrus Latunussa pada dan Guru Mambraku pada tahun 1965, dan pada saat itu (1965) kampung Baingkete masih terbagi menjadi dua (2) kampung yaitu kampung Kwake dan Kampung Baingkete. Pada tahun 1966 bulan desember sampai bulan januari 1967 masyarakat yang berada di kampung ini banyak korban (meninggal) karena teteruga (Penyu) beracun yang menyebabkan sampai mereka hampir punah. Kemudian tepatnya tanggal 21 januari 1968 masyarakat kampung Baingkete kembali untuk kedua kalinya mengungsikan diri ke Makbon dan ada yang hutan karena peristiwa OPM. Sampai dengan tanggal 15 februari tahun 1971 penduduk yang mengungsi ke hutan kembali ke kampung dan langsung ke Makbon untuk menetap sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2003 atau selama 38 tahun. Kampung Baingkete secara resmi terbentuk pada tanggal 18 maret 2003 dan secara administratif pemerintahan kampung Baingkete memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Bagian Timur : Kampung Malaumkarta
- Bagian Barat : Kampung Malawor
- Bagian Utara : Kampung Makbon
- Bagian Selatan : Kampung Klaili.

Aksesibilitas yang biasanya digunakan adalah transportasi darat (Taxi) dari Terminal Pasar Remu (Sorong) - Makbon dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit sampai di dermaga Makbon, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu jonson dari Kampung Makbon sekitar 10 menit untuk sampai ke Kampung Baingkete yang terletak sekitar 1 kilo meter dari tepi pantai pada bagian utara dari Kabupaten Sorong.

b. Kependudukan

Secara garis besar penduduk di wilayah assesment khususnya di Distrik Makbon dan Sayosa dapat dibedakan menjadi dua yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Berdasarkan hasil survey di lokasi Assesment yang meliputi 3 kampung di wilayah Kabupaten Sorong, jumlah penduduk yang mendominasi adalah penduduk asli (Suku Moi). Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk pendatang adalah penduduk yang bukan asli Sorong, dimana penduduk tersebut berasal dari Maluku, Biak, dan Jawa yang bekerja baik sebagai guru sekolah maupun swasta.

Tabel 9. Jumlah KK dan jumlah Penduduk berdasarkan Agama di kampung-Kabupaten Sorong

Distrik	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kristen Protestan (%)
Sayosa	Maladofok	78	317	100
Makbon	Malaumkarta	86	312	100
	Baingkete	38	134	100

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

c. Kekeabatan

Sistim kekerabatan yang berlaku di wilayah masyarakat adat Moi di kampung Maladofok, Malaumkarta, dan Baingkete terstruktur berdasarkan marga di mana garis keturunan marga ini di wariskan mengikuti garis keturunan ayah (Patrilineal).

Selain itu ada suatu sistem kekerabatan yang di miliki oleh masyarakat Moi, yaitu sistem makan bersama, artinya dari marga yang ada ini mempunyai kebebasan untuk menokok sagu dan berburu di dusun milik marga yang lainnya. Hal ini merupakan suatu kebiasaan mereka yang sejak dahulu hingga kini masih di pegang oleh masyarakat adat Moi. Demikian pula dengan kebiasaan komunikasi sehari – hari masyarakat Moi di samping menggunakan bahasa daerah, juga menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga untuk berkomunikasi dengan orang luar tidak sulit, dan juga masyarakat adat Moi sangat mudah untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang luar atau etnis yang lain.

Untuk mengetahui marga – marga yang ada di ke dua Distrik dan ketiga kampung tersebut dapat di lihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 10. Penyebaran marga di kampung-kampung di Kabupaten Sorong

WILAYAH DISTRIK	NAMA KAMPUNG	MARGA
Sayosa	Maladofok	Klin, Galus, Hu, Yempolo, Malak, Funus, Mderfak, Satemes, Lobat, Gisim, Seden, Blon, Knali, Urini, Safisa, Klasibin, Sekalabu, Ulimpa, Ulala, dan Kokmala
Makbon	Malaumkarta	Kalami, Magablo, Mobalen, Sapisa, Su, Malasamuk, Ulimpa, Do, Salamala, Paa, Ulala, dan Malak
	Baingkete	Mobalen, Ulimpa, Ulim, Kwatolo

Sumber: Hasil Survei tahun 2005, *YALHIMO*

Pada umumnya, sistim kepemimpinan adat tidak jauh berbeda atau memiliki kesamaan dimana dari marga - marga yang ada di ketiga kampung ini tidak semua marga memiliki kepala suku. Namun yang menjadi kepala suku adalah dari marga yang mempunyai hak ulayat seperti di kampung di Maladofok yang menjadi kepala suku dari marga Klin, kampung Malaumkarta yang menjadi kepala suku dari marga Mobalen, dan kampung Baingkete dari marga Ulimpa dan Ulim. Sedangkan yang berperan sebagai pengatur tatanan nilai sosial dan budaya (tradisi) dalam kehidupan masyarakat adalah dewan adat yang dipilih oleh masyarakat adat yang ada di kampung itu sendiri melalui musyawarah adat masyarakat kampung.

d. Adat dan Istiadat

Ada banyak rahasia adat yang tidak boleh diketahui orang luar, bahkan oleh orang Moi yang dianggap tidak pantas mengetahuinya. Mereka menyebut rahasia adat dan tempat-tempat keramat itu sebagai “hal-hal yang tidak boleh diketahui perempuan”. Karena itu, kelompok masyarakat suku Moi dibagi dalam 4 struktur yang telah ada sejak jaman dimana masyarakat moi belum mengenal peradaban teknologi atau pengaruh-pengaruh yang datang dari luar komunitas masyarakat adat moi waktu itu), Seperti.

- Tokoh-tokoh adat, yang terdiri dari para Nedla meliputi; *neliging* (orang yang berbahasa baik), *nefulus* (orang sejarah), *ne kook* (orang kaya), *nefoos* (orang suci). Serta pejabat-pejabat adat: *usmas*, *tukang*, *finise* (pimpinan pelaksana rumah adat, terdiri dari marga ulimpa, sapisa, dan do), *tulukma*, *untlan* (guru yang mengajar di kambik), dan *kmaben*. Kelompok ini yang berhak mendapatkan pangkat sebagai kepala suku dan panglima perang yang berwenang melakukan sidang-sidang dan acara adat.
- Alumni Pendidikan Adat (Wiliwi), adalah kelompok dalam struktur adat yang terdiri dari anak laki-laki yang telah mengikuti pendidikan adat di Kambik dan telah diwisuda secara adat. Kelompok ini dibina untuk menjadi pemimpin seperti kelompok pertama, mereka akan diajarkan tentang filosofi kepemimpinan dan seluk beluk adat-istiadat suku Moi secara lengkap.
- Kelompok laki-laki (nedla) yang dikategorikan sebagai nelagi (perempuan), kelompok ini terdiri dari anak laki-laki, pemuda, dan laki-laki dewasa yang belum pernah mengikuti pendidikan adat di Kambik, sehingga dalam struktur adat Moi dikategorikan sebagai Nelagi
- Kelompok Nelagi murni, adalah kelompok yang terdiri dari para perempuan Moi, kelompok ini juga memiliki pemimpin dan tokoh, sebab mereka juga mengetahui fulus (ilmu-ilmu yang dapat dikuasai perempuan). Perempuan juga memiliki tugas dalam acara adat.

Dalam 4 struktur adat di atas, suku Moi percaya bahwa mereka telah menemukan banyak hal yang telah digunakan saat ini dan mereka "tidak merasa kaget" yang dimaksudkan adalah masyarakat moi tidak terlalu terpengaruh dengan perkembangan yang ada saat ini karena menurut, mereka dalam rumah adat inilah segala hal yang menyangkut suku Moi diatur seperti :

1. Sistem Perkawinan

Suku moi pada jaman dulu tidak mengenal kata pacaran, segala sesuatu yang menyangkut perjodohan diatur oleh orang tua. Perempuan hanya tinggal di rumah menunggu kedatangan orang tua pihak laki-laki yang akan datang memintanya dari orang tuanya. Namun sebelumnya ada beberapa syarat bagi keduanya; perempuan harus mampu: menokok sagu, berkebun, mengetahui berbagai ramuan obat, membuat *iviok* (tempat remas sagu), membuat *noken*, memasak *papeda*, dan membuat sagu. Sedangkan laki-laki harus mampu: membuat rumah, berkebun, membuat perahu, berburu, dan berharta.

Jika kedua pihak memenuhi syarat-syarat di atas, maka kedua orang tua akan mengikat dengan tanda penyerahan mas kawin (sebelum mengenal kain, mereka memakai mas kawin botol-botol kuno buatan jaman dulu). Sejak masuknya VOC suku Moi mulai mengenal kain dan piring karena saat itu terjadi pertukaran barang atau barter secara besar-besaran dalam perdagangan. Sehingga saat itu orang Moi sudah memakai kain teba dan kain dari putri air namanya *agmai* yang khusus dibuat dari kulit kayu dan dimiliki oleh orang-orang tertentu. Namun kini kain-kain itu hampir tidak ada lagi karena pemiliknya telah meninggal dunia. Di samping kain dan piring mas kawin yang diberikan juga berupa uang.

Setelah ada kesepakatan bersama maka ditentukan waktu tertentu untuk membayarkan harta. Di sini kedua muda-mudi yang akan dikawinkan belum saling mengenal. Mereka akan saling kenal pada saat "guling rokok sebagai tanda mas kawin laki-laki yang ada di bilik kudus (ruang khusus tempat taruh barang) akan dilihat oleh orang tua pihak perempuan. Jikalau lengkap sesuai dengan apa yang diminta, barulah si laki-laki dan perempuan bisa dipertemukan". Sebelum mas kawin dibayarkan mereka belum bisa saling ketemu, karena pada jaman dulu laki-laki tidak bisa sembarang melihat perempuan. Sengaja mengintip perempuan dari jendela saja, laki-laki bisa didenda. Denda juga diterapkan untuk orang yang menyebut nama kemaluan. Jika seorang perempuan berjalan maka laki-laki harus di belakang, tidak boleh mendahului. Adat-istiadat itu dipegang teguh, bahkan bunuh bisa menjadi hukuman bagi yang melanggar. Tetapi kini semua aturan dan istiadat itu telah terurai sedikit demi sedikit, tak ada sangsi apapun bagi pelanggarnya.

2. Sistem Pembagian Harta/warisan

Dalam struktur adat suku Moi, anak laki-laki menduduki posisi yang penting dan terutama. Hal ini karena anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan/marga dari orang tuanya. Sedangkan anak perempuan akan kawin dengan marga yang lain. Berkaitan dengan warisan, hak sepenuhnya ada pada anak laki-laki. Jika ada upacara pesta mencari ikan, upacara membuka dusun sagu, upacara membuka kebun, dan upacara yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA di atas lahan adat marga maka saudara laki-laki harus mengundang semua saudara perempuan untuk hadir. Anak perempuan juga mempunyai hak namun tidak sebesar anak laki-laki.

3. Sistem Mengatur Perempuan Moi

Dalam kehidupan keluarga suku Moi, perempuan menduduki posisi kedua dalam keputusan akhir. Segala sesuatu ditentukan oleh suami atau nedla, misalnya keputusan untuk menebang sagu, menokok sagu, atau membuat tempat ramas sagu. Perempuan (nelagi) perannya ikut membantu aktivitas menokok sagu dan membuat tempat ramas sagu, menyiapkan makanan, melakukan pemeliharaan dan menanam di kebun. Pembuatan pagar kebun dilakukan oleh nedla, demikian juga mencari ikan dan berburu binatang. Sedangkan yang mengolah sampai siap untuk dimakan dikerjakan oleh nelagi. Namun jika memasak dalam jumlah besar, biasanya nedla akan turun membantu. Pemeliharaan dan pembinaan anak-anak dikelompokkan sebagai berikut :

☞ *Anak perempuan (myelagi)*

Dari lahir sampai dipinang sebagian besar pemeliharaan anak perempuan dilakukan oleh nelagi, sedangkan pihak laki-laki melakukan hanya seperlunya saja. Keputusan untuk kawin dapat ditempuh melalui cara; keputusan mutlak dari bapa, atau keputusan mutlak dari mama; atau keputusan antara pihak bapa dan mama. Kadang-kadang anak perempuan diberi kesempatan untuk menentukan keputusan. Sedangkan pihak orang tua laki-laki hanya terlibat dalam mengurus anak perempuan jika anak perempuan sakit.

☞ *Anak laki-laki (myedla)*

Dari lahir sampai menginjak usia yang dianggap layak untuk mengikuti pendidikan adat (kambik), pemeliharaan myedla lebih banyak didominasi oleh perempuan

(nelagi), namun sejak mengikuti pendidikan adat di Kambik sampai berkeluarga anak lelaki lebih banyak dibina oleh nedla.

Perkembangan jaman saat ini telah merubah cara dan pola keluarga untuk mendidik anak. Kini kedua orang tua mempunyai tanggung-jawab yang sama untuk mengurus, mengasuh, dan membina anak-anaknya.

4. Sistem Pendidikan

Orang Moi percaya bahwa segala apa yang ada sekarang, misalnya bahan peledak, obat-obatan, merekayasa hujan, menyembuhkan orang sakit, membunuh orang dengan kekuatan magis secara massal, sampai menghilangkan diri dan menghilangkan orang lain, telah ada dan sudah dibuat oleh masyarakat suku Moi sejak dulu. Mereka mengajarkan secara turun temurun semua unsur di atas dalam sekolah adat bernama *Kambik*. Masa pendidikan bervariasi, menurut jenis ilmu yang dipelajari, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12, 16, dan 24 bulan. Pendidikan adat ini dilakukan di rumah adat, bersifat tertutup dan rahasia, dan hanya boleh diikuti oleh Nedla (laki-laki). Perempuan tidak diperbolehkan ikut karena dikawatirkan jika perempuan ikut serta, maka kelak jika ia menikah ia akan menceritakan tentang rahasia Kambik kepada suami atau orang luar lainnya. Orang Moi percaya bahwa Nedla³ benar-benar menjadi laki-laki apabila telah mengikuti sekolah adat Kambik, karena dalam Kambik semua kekuatan Moi akan diturunkan oleh para guru adat. Setiap Nedla yang tidak mengikuti pendidikan maka dalam struktur adat-istiadat ia disebut sebagai “masih perempuan atau masih telanjang”. Walaupun seseorang pintar tapi jika belum melewati struktur sekolah adat ini maka ia disebut masih bodoh atau telanjang atau perempuan.

Rumah adat tempat pendidikan berlangsung, dulu dibangun di wilayah Tamrau. Pada masa sebelum tahun 60-an, sekolah ini dipakai sebagai motor pergerakan Papua merdeka, dan fungsi ini membuat Kambik diminati banyak orang dan memiliki banyak murid. Memasuki tahun 60-an Kambik dianggap sebagai kelompok/organisasi yang menentang pemerintah sehingga dilarang penyelenggaraannya. Jika diketahui ada Kambik dibuka, maka segera pemerintah memerintahkan militer untuk membongkar sekolah adat tersebut. Pada masa setelah 70-an Kambik tidak diselenggarakan lagi, dan rakyat Moi, terutama para pejabat adat, memiliki obsesi sekolah ini akan dibuka lagi jika Papua merdeka. Saat ini hanya tinggal alumni-alumni Kambik yang masih tersisa yang di kampung dan diangkat sebagai tokoh adat yang dihormati dan ditakuti karena memiliki kekuatan gaib.

Selain pendidikan adat, masyarakat Moi juga menempatkan pendidikan formal sebagai hal penting. Pada jaman dahulu, anak perempuan tidak diijinkan pergi ke sekolah karena dianggap hanya membuat rugi keluarga. Kelak jika dewasa anak perempuan akan dikawinkan dan menjadi milik keluarga pihak laki-laki. Anak perempuan dalam keluarga Moi bisa dianggap sebagai harta karena kelak jika menikah, orang tuanya akan menerima pembayaran harta dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Namun sekarang anak perempuan mulai diijinkan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sejajar

³ Nedla adalah sebutan bagi laki-laki Moi, sedangkan untuk perempuan disebut Nelagi

dengan laki-laki. Kini banyak perempuan Moi yang menjadi sarjana, pendeta, pegawai negeri, guru, dan posisi-posisi publik lainnya.

5. Sistem adat dalam hak ulayat tanah

Suku Moi percaya bahwa tanah adalah Perempuan. Berbicara tanah berarti berbicara tentang perempuan. Menurut orang Moi tanah sama dengan ibu sehingga menjual tanah sama artinya dengan menjual ibu mereka. Tanah dianggap sebagai sumber kehidupan, bagai ibu yang menyusui anaknya. Seiring dengan perkembangan jaman falsafah itu kini mulai luntur pada diri orang Moi. Jual beli tanah semakin banyak terjadi, meski demikian jual beli tanah bukanlah hal yang mudah. Sistem adat mengharuskan orang Moi yang ingin menjual tanah harus memanggil muwe (saudara-saudara perempuan) jika tidak ingin terkena kutukan. Sebaliknya, jika seorang perempuan ingin menjual tanah warisannya maka ia harus memanggil para saudara lelaki, jika tidak ingin dimasuki roh. Artinya, dalam setiap pengambilan keputusan masing-masing orang terikat oleh tali kekerabatan yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Dalam suku Moi hak ulayat atas tanah adat itu telah diatur dalam lembaga adat mereka sejak zaman dulu. Hukum adat ini dipakai untuk membagi wilayah tanah adat kepada marga-marga yang ada di suku Moi. Batas-batas wilayah kepemilikan tanah marga ditandai dengan berbagai benda alam, semacam pohon kayu, sungai, batu, gunung, dan sebagainya. Seluruh marga yang ada di suku moi telah mengetahui batas tanah mereka, sehingga mereka tidak bisa sembarangan masuk ke dusun atau tanah marga lain. Setiap marga biasanya memiliki wilayah atau benda keramat masing-masing yang menjadi tanda tak terbantahkan atas kepemilikan tanah tersebut. Di antara beberapa marga yang ada, ada marga yang memiliki tanah besar (luas atau di beberapa wilayah), biasanya mereka ini adalah keturunan anak raja atau kepala suku pada masa lampau. Marga-marga yang memiliki tanah luas ini secara otomatis akan menempati kelas yang penting, berpengaruh, dan dihormati dalam lembaga adat (mereka disebut sebagai orang kaya). Batas-batas tanah milik marga-marga dalam suku Moi yang kini telah berubah fungsi dan berkembang menjadi kota serta tidak jelas lagi status kepemilikannya, adalah:

- Dari kawasan Tanjung Kasuari, Pulau Buaya, Pulau Sop, Pulau Duum, Kampung Salak, Kampung Baru sampai dengan pelabuhan adalah tanah adat milik marga Bewela
- Dari Klademak, HBM, dan Remu pantai sampai ke gunung Malanu adalah tanah adat milik marga Kalami, Kwaktolo, dan Ulim Klagison
- Dari Kampung Baru sampai Malanu adalah tanah adat milik marga Osok dan Malasinsa
- Dari kilo 9, sekitar PLTD sampai dengan sungai Kalagison adalah tanah adat marga Klagison dan Mubalus.
- Daerah Aimas adalah milik marga Malaseme Klabilim, Malaseme Klaum, Malibela Ginala, Osok Klasaman, dan Osok Klabilim

6. Penyelesaian konflik tanah antar suku dan marga

Hukum adat Suku Moi yang paling keras adalah soal batas wilayah tanah adat. Jika ada pelanggaran batas wilayah bisa terjadi perang suku. Demikian juga antar marga, konflik besar bisa terjadi jika marga yang satu melakukan klaim terhadap tanah milik marga

lain. Konflik antar marga biasanya diselesaikan dengan cara mengundang para orang tua adat yang paham tentang hukum adat dan sejarah tanah. Struktur kekerabatan dan sejarah pewarisan selalu digunakan sebagai cara untuk menelusuri siapa pemilik sah atas tanah. Namun jika para orang tua yang turun tetap tidak bisa menyelesaikan, karena masing-masing marga yang bertikai tetap mempertahankan keyakinannya, maka jalan terakhir adalah masing-masing diminta menunjukkan benda keramat sebagai bukti sah kepemilikan tanah yang tidak bisa ditawar lagi. Jalan akhir ini pada jaman dulu biasanya hanya diterapkan dalam konflik tanah antar suku, dan dilakukan untuk mencegah pertumpahan darah dan perang suku.

7. Sistem Pengobatan Tradisional

Sejak jaman dulu orang Moi telah mengenal berbagai jenis pengobatan untuk menolong masyarakat yang tertimpa kesakitan. Mereka memakai tali rotan, kulit kayu, daun-daunan, abu panas, air panas, dll, sebagai sarana penyembuhan. Selain itu, orang Moi jaman dulu juga memiliki sistem pengaturan kelahiran dengan baik. Saat istri hamil 3 bulan, sang suami akan memisahkan diri ke kampung lain sampai si anak lahir dan berumur 4 tahun. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan sekaligus mengatur jarak kelahiran anak. Namun hal-hal seperti ini tinggal cerita saja karena telah hilang dimakan zaman.

8. Sistem Pembayaran Adat bagi yang meninggal

Dalam suku Moi, setiap orang yang telah berkeluarga akan dikenai sistem pembayaran adat jika salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia. Jika yang meninggal adalah istri, maka pihak suami diharuskan membayar secara adat. Pembayaran itu meliputi: ganti susu, mata, rambut, tulang belakang (dibayar dengan sebilah parang), tengkorak (dibayar dengan gong), pinggang (dibayar dengan piring), darah (dibayar dengan nemala), dll. Jika suami yang meninggal, maka pihak perempuan (diwakili oleh saudara laki-laki bapak) harus membayar piring dan gong. Sedangkan jika anak yang meninggal maka pihak perempuan yang harus membayar karena dianggap istri tidak menjaga anak dengan baik sehingga sakit dan meninggal.

Menurut salah seorang pemuda Moi, Toryanus Kalami “Beban mas kawin laki-laki Moi itu berat sekali, karena dilakukan tidak hanya sekali saat melamar, tapi terus menerus sampai akhir hidupnya”.

e. Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat Suku Moi di ketiga kampung ini memiliki mata pencaharian meramu/menokok sagu. Masyarakat Suku Moi hidupnya sangat dekat dan terikat dengan alam, terutama tanah dan hutan. Mereka tidak biasa berdagang, menjadi buruh industri, atau pegawai kantor, hal ini bukan berarti mereka tidak tahu berdagang, tidak ada yang menjadi buruh atau pegawai negeri, karena pada kenyataannya ada yang berdagang, buruh, maupun pegawai negeri namun menurut mereka sangat sedikit jumlahnya. bahkan jarang orang Moi menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi bukan berarti tidak ada yang menjadi nelayan. Cara mengelola tanahnya belum mengenal sistem pertanian modern. Mereka berkebun secara berputar dari lahan satu ke lahan lain, mencari kayu bakar, mencari ikan secara musiman, dan berburu. Hasilnya selain

untuk konsumsi keluarga, juga dijual ke kota atau kampung lain untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

f. Finansial

Pada umumnya sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat di ke 3 kampung lokasi Assesment ini berasal dari hasil meramu, berkebun (pertanian) dan juga dari hasil laut (nelayan) dan menangkap ikan di kali. Hasil ini selain untuk di konsumsi, ada juga yang di jual baik itu dalam kampung maupun ke pusat distrik. Untuk tingkat pendapatan masyarakat untuk tiap Kepala keluarga perbulannya untuk 3 lokasi assesment ini dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Tingkat Pendapatan Rata-rata Masyarakat di Kampung-kampung di Kabupaten Sorong

Distrik	Kampung	Jenis Komoditi yang di pasarkan	Harga/satuan (Rp)	Total/bulan (Rp)
Sayosa	Maladofok	Sayur-sayuran	1000	50.000
		Udang kali	5000	150.000
		Ikan	5000 – 10.000	50.000-75.000
		Hewan buruan	15.000 – 20.000	150.000-200.000
		Sagu tuman	10.000-25.000	
Makbon	Malaumkarta	Sayur-sayuran	1000	100.000
		Pisang	5000-10.000	50.000-100.000
		Ubi-ubian	5000	50.000
		Ikan	5000-10.000	50.000-100.000
		Hewan buruan	10.000-15.000	150.000
	Sagu tuman	10.000-20.000	100.000-200.000	
	Baingkete	Sayur-sayuran	1000	50.000
		Pisang	5000-10.000	100.000
		Ubi-ubian	2.500-5000	50.000
		Ikan	5000-10.000	50.000-100.000
Hewan buruan		10.000	100.000	
Sagu tuman	10.000-20.000	150.000-200.000		
		Total Pendapatan	102.500,00	1.400.0000

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Dari hasil pendapatan yang di peroleh ini sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kesehatan dan untuk biaya anak sekolah. Sedangkan untuk bentuk-bentuk kelompok usaha yang bentuk oleh masyarakat dikampung seperti koperasi atau kelompok usaha lainnya tidak ada.

g. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat untuk ketiga kampung ini sangat bervariasi dan dapat dikatakan cukup baik karena selain pendidikan formal yang di tekuni masyarakat di ketiga kampung ini juga memiliki pendidikan non formal di wariskan secara turun-

temurun. Pada umumnya hampir seluruhnya masyarakat di kampung ini menyelesaikan pendidikan mereka pada tingkat sekolah dasar (SD). Sedangkan mengenai jumlah anak sekolah yang berasal dari ketiga kampung ini yang di bagi dalam tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Gambaran Jumlah Penduduk yang Bersekolah di kampung Kabupaten Sorong

Wilayah Distrik	Nama Kampung	SD (Jiwa)	SLTP (Jiwa)	SLTA (Jiwa)	PT (Jiwa)	Total Jiwa
Sayosa	Maladofok	40	12	7	1	60
Makbon	Malaumkarta	68	71	32	28	199
	Baingkete	30	8	7	6	51

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, *YALHIMO*

Untuk jenjang perguruan tinggi ini tidak semuanya berada di tanah papua tetapi ada pula yang melanjutkan keluar papua seperti ke Manado, dan Jawa sedangkan untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA bersekolah di kampung, Distrik, dan Kota Sorong.

Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada 3 kampung yang menjadi lokasi assesment berupa sekolah dasar (SD) negeri dan Inpres. Sarana dan prasarana pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 13. Kondisi Fasilitas Pendidikan di Kampung-kampung Kabupaten Sorong

Wilayah Distrik	Nama Kampung	Sekolah Dasar	Fasilitas Pendidikan		Guru
			Ruang	kelas	
Sayosa	Maladofok	1	6	6	3
Makbon	Malaumkarta	1	6	6	3
	Baingkete	1	3	6	2

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, *YALHIMO*

h. Kesehatan

Secara umum kualitas kesehatan masyarakat di lokasi Assesment masih sangat rendah karena kurangnya sumber air bersih, belum adanya sarana MCK dan juga belum adanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita (posyandu). Gejala kurang gizi untuk lokasi Assesment tidak ditemui terutama pada balita dan anak, namun yang permasalahan bagi masyarakat adalah tingkat serangan penyakit malaria untuk ke 3 kampung ini cukup tinggi sehingga menyebabkan ada yang sampai meninggal dunia.

i. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Potensi sumber daya alam yang terdapat di kampung Maladofok cukup beragam dimana untuk poetnsi sumber daya alam berupa hutan, kali dan Gunung. Disamping ada pula hasil tambang yang bersifat material seperti pasir, batu kerikil dan juga non material seperti migas yang sudah di kelola sekitar tahun 1930 an oleh pemerintah belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah RI hingga saat ini. Potensi lainnya yang tidak kalah menarik adalah sektor perikanan darat dimana untuk kampung Maladofok perikanan air tawar

seperti udang dan ikan di kali-kali yang ada cukup melimpah sehingga oleh masyarakat Maladofok ada yang memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan.

Tanaman-tanaman lokal yang dimiliki masyarakat di kampung antara lain kelapa, langsung, cempedak, rambutan, durian dan pinang yang di tanam di halaman rumah mereka dengan jumlah pohon untuk tiap halaman rumah milik masyarakat ini sekitar 5–10 pohon. Disamping itu ada pula tanaman ubi-ubian dan sayuran yang di tanam untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan pula yang di jual ke Klamono.

Potensi sumber daya hutan masyarakat kampung Maladofok memiliki hutan yang sangat luas namun sudah tidak utuh lagi, hal ini terlihat dimana di temui lahan kritis dan juga semakin sulitnya masyarakat untuk memperoleh hewan buruan dan sumber air bersih karena perusahaan HPH PT. Intipura Timber yang beroperasi di wilayah adat masyarakat kampung Maladofok sedangkan hasil hutan yang di miliki oleh masyarakat berupa Kayu, rotan, damar, bambu, dan satwa liar lainnya seperti babi hutan, rusa, kasuari, burung Maleo, burung mambruk, burung Cenderawsih, dan buaya kali (air tawar). Yang sudah semakin sulit untuk ditemukan.

Salah satu dampak yang sangat terasa oleh masyarakat kampung Maladofok adalah semakin sulitnya lahan untuk berkebun dekat dengan kampung, sehingga masyarakat harus membuat kebun yang letaknya jauh dari kampung. Jika di dibandingkan dengan waktu sebelum ada perusahaan kayu HPH PT. Inti Pura Timber masyarakat uang hidupnya hanya meramu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya keluarga ini sangat mengahrgai alam sehingga baik itu menokok sagu, berburu atau menangkap ikan kali hanya untuk keperluan konsumsi hari itu, sehingga ketersediaannya di alam selalu melimpah dan mudah di peroleh.

Potensi sumber daya alam yang terdapat di kampung Malaumkarta dan Baingkete adalah dua kampung yang letaknya di pesisir pantai bagian utara dari Kabupaten Sorong ini memiliki potensi SDA cukup beragam dan hampir sama, dimana untuk potensi sumber daya alam pesisir (pantai) dan laut terdapat pulau Um yang cukup indah dan pantai berupa hamparan pasir putih, reep (hamparan terumbu karang) yang cukup menarik sebagai tempat rekreasi.

Sedangkan untuk sumber laut berupa potensi perikanan masih cukup melimpah. Ada pula kegiatan budidaya rumput laut dan agar-agar yang dilakukan oleh masyarakat. Tanaman-tanaman lokal yang dimiliki masyarakat di kampung antara lain kelapa, langsung, cempedak, rambutan, durian dan pinang yang di tanam di kebun-kebun mereka. Disamping itu ada pula tanaman ubi-ubian dan sayuran yang di tanam untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan untuk di jual.

Potensi sumber daya hutan masyarakat kampung malumkarta dan Baingkete memiliki hutan yang sangat luas dan masih utuh terpelihara hal ini terlihat dimana tidak di temui lahan kritis atau perusahaan HPH yang beroperasi di wilayah adat masyarakat kampung malumkarta dan Baingkete, sedangkan hasil hutan yang di miliki oleh masyarakat berupa Kayu, rotan, damar, bambu, dan satwa liar lainnya. Masih sangat mudah di peroleh.

i. Sarana Dan Prasarana

Pelayanan umum yang terdapat di kampung Malaumkarta dan Baingkete berupa sarana kesehatan, sarana transportasi laut berupa longboat, Balai Desa, sarana MCK, sarana peribadatan (Gereja), sarana penerangan motor lampu (Genset), dan jalan darat Sorong – Manokwari. Sarana umum yang terdapat di tiga kampung ini di rasakan masih sangat kurang dalam melayani kebutuhan. Lokasi Assesment yang terdiri dari 3 kampung yang terletak di 2 distrik ini dapat dijangkau melalui transportasi darat dan laut. Akses kampung Maladofok ke pusat distrik Sayosa ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 13 Km dengan waktu tempuh 3 jam – 4 jam perjalanan, sedangkan untuk kampung Malaumkarta dan Baingkete akses dari kampung ke pusat distrik di makbon di tempuh dengan menggunakan perahu jhonson (longboat) dengan waktu tempuh 15 menit perjalanan.

Tabel 14. Sarana Prasarana yang terdapat di ke 3 kampung wilayah assesment di Kabupaten Sorong

Sarana Prasarana	Nama Kampung		
	Maladofok	Malaumkarta	Baingkete
Rumah penduduk	105 unit	115 unit	45 unit
Balai desa	1 unit	1 unit	1 unit
Puskesmas Pembantu (Pustu)	1 unit	1 unit	-
Bangunan SD	1 unit 6 ruang	1 unit 6 ruang	1 unit 3 ruang
Gedung Gereja	1 unit	1 unit	1 unit
Sumber air bersih	2 unit	1 unit bak	3 unit
Jalan	1 unit	1 unit	1 unit
penerangan	1 unit diesel	1 unit diesel	-
MCK	-	-	3 unit

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Sarana dan prasarana yang terdapat di ke 3 lokasi Assesment ini tidak semuanya merupakan bantuan dari pemerintah, tetapi ada yang merupakan hasil swadaya masyarakat kampung. Dari sarana dan prasarana yang ada di ke 3 kampung ini pun tidak semuanya dalam kondisi baik karena ada beberapa sarana dan prasarana tersebut yang kondisinya sudah rusak seperti sumber air bersih berupa 2 unit sumur di kampung Maladofok dan 1 unit bak penampungan air bersih di kampung Malaumkarta sudah tidak dapat di gunakan lagi oleh masyarakat. 1 unit bangunan puskesmas di kampung Maladofok dan Malaumkarta yang sudah mulai rusak karena tidak digunakan. Jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Sorong dengan Ayamaru dan Sorong dengan Manokwari yang terletak tepat di tengah dan tepi kampung yang di jadikan sebagai lokasi Assesment.

k. Gender

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga sudah cukup merata misalnya hasil kebun yang di panen oleh bapak maka yang menjualnya adalah mama demikian pula sebaliknya. Sedangkan peran perempuan sendiri baik dalam musyawarah tingkat kampung maupun untuk mengikuti

pelatihan–pelatihan yang di adakan diluar seperti ke distrik maupun kabupaten kurang dilibatkan bahkan hampir tidak diikutsertakan. walaupun ada jumlahnya sangat minim dan frekuensinyapun kecil. Hal ini merupakan informasi yang di peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa ibu–ibu dan bapak–bapak juga nampak dari aktifitas ibu–ibu yang kesehariannya berada di kampung untuk ke kebun dan dusun sagu untuk menokok (pangkur) bersama keluarga atau aktifas lainnya di kampung. Sedangkan untuk organisasi ibu–ibu (PKK) di kampung tidak berjalan dengan baik.

Analisis PKB di 3 Kampung di Kabupaten Sorong

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah penduduk dari ketiga kampung assesment adalah 202 KK dengan 763 jiwa dengan berbagai kriteria pendidikan dan keahlian, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu pada ketiga kampung tersebut terdapat Adanya 35 orang masyarakat yang telah mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi menjadi satu sumber daya manusia yang tidak dapat diremehkan. Khusus untuk orang Moi biasanya mereka akan saling bekerjasama untuk memberikan bantuan kepada seorang anak agar dapat bersekolah hingga perguruan tinggi. Biasanya yang dapat memberikan bantuan adalah pihak keluarga baik dari bapak atau mama dari anak tersebut.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Kabupaten Sorong memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi, baik sumber daya alam yang bersifat yang dapat diperbaharui maupun sumber dayaalam yang tidak dapat diperbaharui (biasanya sumber daya alam mineral dan tambang), adapun sumber daya tersebut adalah :

- Potensi SDA berupa berbagai jenis flora tumbuhan komersil seperti kelapa, palem, sagu, matoa, berbagai jenis kayu produksi, dan berbagai jenis hewan buruan
- Hampan hutan mangrove yang merupakan tempat berkembang Biaknya berbagai jenis ikan dan hewan air lainnya.
- Sumber daya alam mineral berupa bahan galian dan tambang minyak yang hingga saat ini masih terus berproduksi.

c. Sumber Daya Sosial

Adanya sistem gotong royong dan saling membantu di dalam kampung terutama dalam hal pendidikan generasi muda, menjadi satu point penting mengapa masyarakat ini memiliki prestasi yang tinggi dalam upaya pendidikan anak. Selain itu adanya ikatan dan peraturan adat yang walaupun tidak tertulis secara nyata, tetapi masih tetap dipertahankan keberadaanya.

d. Potensi Fisik

Masyarakat di tiga kampung ini memiliki beberapa sarana prasarana fisik baik bantuan maupun swadaya masyarakat. Seperti perumahan masyarakat, Gedung gereja, Sarana air bersih, sarana kesehatan berupa bangunan PUSTU, sarana MCK, sarana komunikasi berupa telepon satelite, sarana pemerintahan kampung, sarana pendidikan, dan sarana penerangan. Untuk sarana peribadatan dan sarana perumahan umumnya masyarakat

mengadakannya dengan swadaya, seperti rumah misalnya, walaupun ada kampung yang mendapatkan bantuan perumahan dalam jumlah yang sangat terbatas.

e. Potensi Keuangan

Masalah financial, kondisi masyarakat di Kabupaten ini ternyata memiliki kemiripan dengan masyarakat di kampung-kampung Kabupaten Teluk Wondama, dimana dalam budaya menyimpan pada dasarnya mereka juga telah memilikinya, terutama dalam pengelolaan harta mas kawin yang memiliki nilai yang tinggi secara adat. permasalahannya, akses masyarakat di daerah ini terhadap Bank atau lembaga penyimpanan lain sangat susah karena jalur turut mempengaruhi karena banyak masyarakat yang menganggap bank sebagai tempat untuk orang yang ber uang banyak.

C. KABUPATEN BIAK NUMFOR DAN SUPIORI

Letak Geografis

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua, sebelum pemekaran tahun 2003 berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Kabupaten ini merupakan kawasan kepulauan yang terdiri dari pulau Biak, Pulau Supiori dan pulau Numfor, serta lebih dari 42 buah pulau sangat kecil termasuk kepulauan Padaido yang dikenal dengan sebutan *Schouten Eilanden* pada zaman Belanda. Kepulauan Cenderawasih ini menjadi primadona pengembangan kegiatan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, termasuk LSM/NGO/CSO Lokal, Nasional dan Internasional, setelah adanya pemekaran pulau Supiori memisahkan diri menjadi kabupaten tersendiri yang disebut dengan Kabupaten Supiori.

Kabupaten Biak Numfor terletak di Teluk Cenderawasih pada titik 0°21` - 1°31` LS dan 134°47` - 136°48` BT dengan ketinggian 0 - 1000 meter di atas permukaan laut (dpl). Luas keseluruhan Kabupaten Biak Numfor 21.572 km² yang terdiri dari luas daratan 3.130 km² dan luas lautan 18.442 km² atau sekitar 5,11 % dari luas wilayah provinsi Papua. Sedangkan Kabupaten Supiori berada pada 125°,30' - 127°,21' Bujur Timur dan 20°, 25 ' - 30°, 55' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar 1,121,81 km² dan luas daratan sekitar 242 km². Wilayah Kabupaten Supiori berbatasan dengan Distrik Distrik Warsa di sebelah utara; Kabupaten Biak Numfor di sebelah Timur; Kabupaten Yapen Waropen di sebelah selatan dan Lautan Pasifik di sebelah barat. Dalam assesment ini akan dilakukan di kampung-kampung di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

Jenis Tanah dan Batuan

Pulau-pulau yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor terdiri dari batu karang metamorfik (filit, kuartit dan chrit) sebagai bagian dari lempengan Pasifik yang terdesak tanggul-tanggul Baltik. Sebagian besar jenis tanah di daerah ini adalah renzina dan mediteran, dan sebagian kecil regosol di daerah pantai. Hampir sebagian besar di daerah ini terbentuk dari bahan induk batuan kapur.

Di daerah pantai terdapat jenis tanah regosol/alluvial dan litosol. Tanah tersebut tidak memiliki tingkat kesuburan yang baik, karena didominasi oleh tekstur pasir dengan solum tanah yang relatif dangkal. Tanah regosol kebanyakan ditumbuhi tanaman kelapa. Di daerah perbukitan terdapat jenis tanah litosol dan mediteran coklat merah dan merah kuning. Tanah ini memiliki kesuburan rendah, karena memiliki solum dangkal dan kandungan unsur hara rendah. Tanah mediteran terdapat hanya di bagian cekung dan agak datar. Daerah dataran tinggi umumnya terdapat jenis renzina, sebagian kecil mediteran merah kuning dan regosol. Tanah renzina memiliki tingkat kesuburan yang baik dan kaya akan kandungan organik.

Kondisi Alam dan Sumberdaya Wisata

Sumberdaya alam dan laut di Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi untuk pariwisata. Namun, sampai dengan sekarang wilayah yang terdiri dari gugusan kepulauan ini belum dimanfaatkan untuk dikelola menjadi sarana pendukung yang mendatangkan keuntungan bagi baik pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat setempat. Keadaan flora dan fauna di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori umumnya terdiri dari hutan hujan campuran (hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan dataran tinggi). Hal ini dimungkinkan oleh letaknya yang berada di Lautan Samudera Pasifik. Daerah tropis ditepi pantai dan daerah rendah umumnya hutan untuk kepentingan perladangan penduduk. Di muara sungai dan pantai terdapat hutan sagu yang dimanfaatkan penduduk sebagai bahan makanan.

Salah satu pembudidayaan flora dan fauna di Kabupaten Biak adalah adanya Taman Anggrek yang sudah cukup dikenal oleh orang banyak. Tempat ini juga difungsikan oleh para peneliti untuk mengamati aneka ragam tanaman anggrek yang dibudidayakan dan memiliki potensi wisata yang cukup tinggi. Dari data yang diperoleh dalam assesment (2005), pada tahun 2004 terdapat 423 pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Potensi Fauna juga dibudidayakan seperti bangsa burung yang dipelihara di Taman Burung. Sangat potensial untuk wisata ilmuwan. Pada tahun 2004 terdapat 167 pengunjung dari dalam dan luar negeri. Ada berbagai jenis unggas seperti merpati, kakatua, nuri, dan lain-lain yang mempunyai kemiripan dengan fauna Australia. Sedangkan jenis reptil seperti buaya, ular, penyu, biawak, kura-kura serta berbagai jenis ikan laut.

Di daerah pedalaman umumnya terdiri dari hutan alam yang menghasilkan kayu keras yang sangat baik untuk industri perkayuan seperti matoa, bintangur, agathis dan lain-lain.

Kependudukan

Kependudukan di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori ini secara umum memiliki jumlah sekitar 28,254 jiwa, yang sebagian besar penduduk sekitar 78% merupakan orang asli Papua dari suku Biak Numfor. Sementara 22% merupakan penduduk yang berasal dari luar Tanah Papua seperti Jawa, Batak, Bugis, Makasar, Buton, Maluku dan Timor. Komposisi penduduk baik struktur dan jumlah maupun kualitasnya merupakan salah satu modal utama dalam upaya mengembangkan kawasan wilayah kabupaten ini. Disisi lain Pemekaran wilayah Kabupaten Supiori Numfor dari Kabupaten Biak Padaido (*Sebutan*

Baru untuk Kabupaten Biak Numfor pada pasca pemekaran) telah mempengaruhi jumlah penduduk di kabupaten. Penduduk Kabupaten Biak merupakan komunitas heterogen dimana selain penduduk asli Biak Numfor dan orang asli Papua dari Tanah Besar Papua, juga terdapat suku-suku imigran dari luar Papua seperti orang Jawa, Batak, Bugis, Buton, Makasar, Manado, Maluku, Timor, Flores dan lain sebagainya.

Kependudukan yang heterogen ini tersebar di seluruh kepulauan Schouten (Biak Numfor), tetapi pada akhir-akhir ini justru sangat terlihat bahwa orang “*amber*” (sebutan untuk orang luar yang bukan asli Papua/Biak, ‘amber’ artinya pendatang) yang menguasai Kota Biak hingga pulau-pulau kecil. Karena itu menurut etnis, jumlah kependudukan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori merupakan orang asli Biak Numfor. Orang Non Papua yang berada di wilayah kabupaten ini pada umumnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil/PNS, pedangan, TNI dan POLRI. Marga-marga (keret) Biak yang ada di Kabupaten Supiori seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Marga-marga asli penduduk Biak Numfor dan Sekitarnya berdasarkan sejarah adat dan kependudukan

Nama Pulau	Nama Marga
Supiori	Yeninar, Rumere, Wabdaron, Infandi, Rumbara, Myusefer, Pariaribo, Rumbino, Maninem, Ruminum, Sanadi, Rumbiapuk, Kapisa, Yarangga, Infaindi, Korwa, Baab, Rumaseb, Rumkorem, Rumabar, Warpur, Fairnap, Inarkomb, Kafiar, Wambrauw, Sawen, Sarawan, Mandosir, Rumbewas, Rejau, , Sauwias, Manufandu, Kmurawa
Rani	Kafiar, Manufandu, Rumbekwan, Rumkabu, Arwakon, Ap, Kawer, Mirino, Womsiwor, Wanma, Rumere, Kaisiepo, Korwa, Mansawan
Insumbabi	Manufandu, Kafiar, Mansawan, Rumkabu, Wambraw, Sarawan, Sawor
Sowek	Mansawan, Rumbekwan, Kafiar, Mandosir, Manufandu, Kawer, Kurni, Sawor, Sawen, Sarawan, Wambrauw, Awom, Fainsenem, Yarangga, Wabdaron
Numfor	Prawar, Bukorpioper, Orisu, Baransano, Mandowen, Wambrauw, Krey, Wanma, Bukorsiom, Mampioper, Kapisa, Mirino, Rumaseb, Sroyer, Rumbino, Mambrasar, Ap, Yembise, Manggara, Dimara, Amsamsyum, yarangga, Prawar, Rumbewas, Inggamer, Yeun, Rumansara, Rumkorem, Wamafma, Infandi, Kamer, Mayor, Rumbrawer, Mofu, Padwa, Awom,
Biak	Sroyer, Bukorpioper, Baransano, Mandowen, Wambrauw, Krey, Wanma, Bukorsiom, Mampioper, Orisu, Kapisa, Mirino, Rumaseb, Rumbino, Mambrasar, Ap, Yembise, Dimara, Manggara, Amsamsyum, yarangga, Prawar, Krey, ,

Sumber: Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Mata Pencaharian

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan aktivitas penduduk dalam memenuhi kehidupannya. Aktivitas tersebut seperti petani, nelayan, pedagang, jasa, PNS, pegawai swasta, buruh dan lain sebagainya. Mata pencaharian utama penduduk yang bermukim di perdesaan (masyarakat adat Biak Numfor) adalah petani dan nelayan, sedangkan yang di kota lebih beragam antara lain sebagai PNS, pegawai swasta dan pedagang.

Struktur Sosial.

Kesatuan sosial dan tempat tinggal yang paling penting bagi masyarakat adat Biak Numfor adalah KERET atau KLAN kecil. Suatu keret terdiri dari keluarga batih yang disebut *SIM*. Pada masa sekarang masing-masing keluarga batih (*sim*) mempunyai rumah sendiri, tetapi biasanya mereka berkelompok menurut keret dan Mnu. Di sebuah kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut dengan *Mananwin mnu*. Kebijakan adat diatur oleh kepala marga yang sekarang dijadikan sebutan untuk kepala kampung yakni mananwir mnu. Untuk mengambil keputusan bersama mengenai pembangunan kampung, biasanya melalui musyawarah kampung.

Kontak Dengan Dunia Luar

Kontak orang Biak dengan orang luar pada zaman dulu terjadi terutama melalui hubungan perdagangan dan ekspedisi-ekspedisi perang. Bukti terlihat pada adanya pemukiman-pemukiman orang Biak yang sampai sekarang dapat dijumpai di berbagai tempat dengan cerita yang berbeda-beda seperti, baik menurut ceritera lisan tentang tokoh-tokoh legendaris *Fakoki* dan *Pasrefi* maupun sumber keterangan dari Tidore diketahui bahwa kontak dengan dunia luar itu telah terjadi jauh sebelum kedatangan orang Eropa pertama di daerah Papua pada awal abad ke-16, (Kamma 1953:151). Hubungan tersebut terjadi dengan penduduk di daerah pesisir utara Kepala Burung, Kepulauan Raja Ampat dan dengan penduduk di Kepulauan Maluku. Bahkan de facto di wilayah Kepala Burung Tanah Papua, terdapat penamaan tempat atau wilayah dengan bahasa Biak Numfor seperti Saubeba, Saukorem, Samfarmun, Warsnembri yang merupakan penamaan sejak Pulau Mansinam dikuasai oleh orang Biak Numfor yang kini menamakan diri sebagai Orang Doreri di Kabupaten Manokwari.

Sarana Infrastruktur Kabupaten Biak Numfor

Pada umumnya sarana infrastruktur di Kabupaten Biak cukup tersedia untuk kepentingan masyarakat banyak. Misalnya, jalan raya dan sarana transportasinya, telekomunikasi, pos dan giro, pasar, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, rumah sakit, gedung pendidikan dan perbankan, serta perhotelan dan pertokoan. Namun, semuanya masih terpusat di Biak Kota.

a. Pendidikan

Berbagai permasalahan substansial menyangkut bidang pendidikan di Kabupaten Supiori Numfor adalah pemerataan pendidikan, kualitas pelayanan, manajemen sistem pendidikan, partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan penduduk dan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia (SDM) di suatu daerah. Dengan melihat tingkat pendidikan di masing-masing kampung di Kabupaten Supiori, maka dapat diperoleh gambaran bahwa

mereka bisa menjadi pelaku pembangunan di daerahnya sendiri, walaupun rata-rata masyarakat yang tinggal di desa atau kampung hanya berpendidikan tingkat dasar (SD), pendidikan sekolah menengah (SLTP dan SLTA).

Kurangnya perhatian dari pemerintah dapat dilihat dari gedung yang semakin tidak diperhatikan, selain itu banyaknya guru yang meninggalkan kampung menjadi salah satu faktor kurangnya kesejahteraan para guru. Kondisi ini hampir terjadi di seluruh kampung dimana assesment itu dilakukan.

b. Kesehatan

Pada umumnya Puskesmas hanya ada di pusat-pusat distrik, sehingga merupakan salah satu kesulitan utama bagi masyarakat untuk menjalani perawatan intensif di sektor kesehatan. Hal ini karena keterbatasan persediaan obat-obatan dan tenaga medis. Karena keterbatasan-keterbatasan ini maka masyarakat adat setempat lebih cenderung mengkonsumsi obat-obat tradisional yang biasa dipungut dari hutan. Pada umumnya peran dokter umum dapat melayani pasien di Puskesmas hanya tiga bulan sekali jika memungkinkan, tetapi lebih banyak tidak terjadi kunjungan dokter umum di Kabupaten Supiori, karena semuanya masih terpusat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak di Kota Biak.

c. Air bersih dan MCK

Sebenarnya masyarakat setempat tidak mempunyai masalah mengenai persediaan air bersih, karena cukup banyak sumur galian dan sungai-sungai yang bersumber dari gunung. Tetapi permasalahannya, karena sebagian besar pemukiman rakyat itu berada di pesisir-pesisir pantai laut, maka ketersediaan air bersih juga sangat tergantung pada pasang-surut air laut. Air sumur pun mengandung kadar garam yang cukup tinggi, sehingga sangat tidak cocok untuk difungsikan sebagai air minum, sehingga biasanya air sumur hanya digunakan untuk keperluan MCK (Mandi, Cuci, kakus), sedangkan untuk air minum, masyarakat mengkonsumsi air hujan.

d. Transportasi

Aktivitas penduduk di Kabupaten Supiori, terutama penduduk di pulau Rani, pulau Soweke dan pulau Inumbabi sangat bergantung pada perahu johnson atau motor tempel. Sedangkan di Korido, selain motor tempel, mereka juga menggunakan jasa kapal perintis milik PT. Pelni yang singgah di Korido dua minggu sekali namun yang sering menjadi kendala adalah apabila bahan bakar menjadi susah dan mahal maka masyarakat akan semakin susah untuk melakukan perjalanan ke kota untuk melakukan perdagangan. Sementara penduduk di Korido dan Supiori Utara (Yenggarbun) jika berhubungan dengan kota Biak, mereka menggunakan sara transportasi darat (mobil) angkutan pedesaan. Karena jalan rayanya sudah beraspal. Sehingga untuk masalah transportasi kedua kampung ini dapat dikatakan tidak buruk, namun yang menjadi perhatian adalah minimnya jam aktif transportasi, dimana pada umumnya taksi atau angkutan kota hanya dapat beraktifitas hingga sam 07.00 sore, sehingga jika ada kepentingan mendesak ke kota seperti mengantar orang sakit, maka akan menjadi masalah tersendiri.

Pembagian kerja dalam rumah tangga (GENDER)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bersama dengan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan untuk wilayah kampung-kampung tempat dilakukannya assement masih sangat berat kepada kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 16. Pembagian beban kerja berbasis GENDER dalam kehidupan Masyarakat Adat Biak Numfor dan Supiori

Beban Kerja	Laki-laki	Perempuan	KET
Masak (pagi, siang, sore) untuk keluarga		✓	FAKTOR BUDAYA (ADAT) "MASKAWIN"
Siapkan makanan untuk keluarga		✓	
Cuci piring, pakaian		✓	
Mengumpulkan kayu api		✓	
Menimba air minum		✓	
Mandikan anak		✓	
Mengurus anak sekolah	✓	✓	
Buka kebun baru (tebang, bersihkan)	✓	✓	
Tanam dan pelihara tanaman di kebun		✓	
Mengambil hasil kebun		✓	
Menokok sagu	✓	✓	
Bawa jualan ke pasar Biak Kota		✓	
Mencari ikan di laut	✓		
Mencari bia (kerang) dan kepiting		✓	
Membawa anak ke rumah sakit/posyandu		✓	
Mencari obat-obat tradisional di hutan		✓	
Ikut kegiatan kegerejaan		✓	
Ikut kegiatan adapt	✓		
Ikut kegiatan PKK		✓	
Ikut kegiatan pertemuan di Balai Kampung	✓		

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Profil Kampung Kabupaten Biak dan Supiori

a. Sejarah Kampung dan kependudukan

Kampung-kampung yang berada di Kabupaten Biak dan Supiori memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda, ada beberapa kampung yang lahir setelah adanya pengembangan kabupaten atau pemekaran kampung, dan biasanya kampung-kampung ini masih memiliki umur yang sangat muda, akan tetapi ada juga kampung yang telah lama melakukan aktivitas penting baik dimasa kemerdekaan indonesia maupun dizaman penjajahan Belanda, seperti pudori di kabupaten Pengembangan Supiori contohnya, kampung ini telah lama dikenal sebagai salah satu kampung yang ditinggali pemerintahan belanda untuk melakukan pemerintahan di tanah jajahannya. Namun secara jelas keterbentukan kampung-kampung tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Tahun pembentukan kampung-kampung wilayah Assesment di Kabupaten Biak Numfor

No.	Nama Kampung	Tahun Terbentuk	Keterangan
1	Soryar	2000	Pemekaran Kajasi
2	Wadibu	2000	Pemekaran dari kampung Kajasi
3	Yeruboy	1992	Berdasarkan SK
4	Komboy	1960	Berdasarkan SK
5	Pudori	1997	Berdasarkan SK

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

b. Kependudukan

Pemekaran kabupaten, distrik dan kampung ternyata sangat mempengaruhi data kependudukan di kampung-kampung dimana assesment dilakukan, karena adanya perubahan status suatu daerah memberikan imbas langsung kepada jumlah penduduk karena semakin tingginya mobilisasi masyarakat, contoh saja kampung soryar karena adanya pemekaran distrik kampung tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk karena penduduk Soryar dari marga Wader dan Faidiban yang menetap di pulau Nusi sudah menjadi warga distrik Padaido. Dengan demikian penduduk Soryar mengalami kekurangan akibat pemekaran. Untuk melihat jumlah penduduk di lima kampung tersebut dapat diamati pada tabel 15 .

Tabel 18. Jumlah Jiwa yang terdapat di Kampung-kampung Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori

No.	Nama Kampung	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Soryar	68	370
2	Wadibu	64	340
3	Yeruboy	54	234
4	Komboy	52	456
5	Pudori	64	340

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tertinggi berada pada kampung komboy dengan 456 jiwa, sedangkan terendah berada di kampung yeruboy dengan jumlah 234 jiwa. Jika ditinjau dari segi luasan lahan maka jumlah jiwa seperti ini masih termasuk jarang dan masih cukup sumber daya untuk dapat menopangnya. Namun yang lebih dipentingkan pada dasarnya adalah bagaimana jumlah jiwa seperti ini dapat mengelola luasan lahan yang dapat dikatakan cukup luas.

c. Mata Pencaharian Masyarakat

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat di kampung-kampung dimana assesment dilakukan adalah sama, dimana dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari biasanya masyarakat memenuhinya dengan cara bertani, meramu hasil hutan dan memburu hewan liar di hutan serta mencari ikan perairan laut sesuai kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur dengan peralatan yang sederhana (nelayan tradisional). Mereka memiliki kemampuan untuk beraktifitas di laut sekalipun dengan peralatan sederhana, seperti perahu

dayung, perahu motor, dan sarana tangkap ikan yang sederhana seperti jaring, pukut mini dan peralatan mancing, serta kalawai (sejenis tombak khusus untuk ikan) dan senapan menyelam/*molo* dari kayu). Sering mereka menyelam (*molo*) untuk menangkap udang lobster. Hasilnya kebanyakan untuk konsumsi keluarga dan selebihnya diperdagangkan di pasar kota untuk memperoleh uang demi kebutuhan anak sekolah. Hal ini di lihat dari kehidupan serta pemukiman masyarakat yang berada dekat dengan laut sehingga banyak juga masyarakat yang matapencariannya nelayan tradisional.

Ada juga masyarakat setempat yang berkebun dengan menanam seadanya. Luas kebun tidak mencapai ukuran hektar, tetapi mereka menanam sayur-sayuran, keladi, betatas, singkong dan kelapa, jeruk serta jenis buah-buahan lainnya. Mereka membuka kebun baru dengan cara membersihkan semak-semak (kondisi hutan tandus) lalu tanahnya yang bebatuan itu digembur sedikit untuk bisa ditanami. Biasanya kebun ini diolah sampai dengan empat tahun baru membuka kebun baru lagi, karena kondisi humus tanah menipis. Namun, karena kondisi tanahnya tandus berkapur, maka biasanya kesuburan tanah sebuah lahan baru hanya bertahan untuk dua (2) tahun, dan sesudahnya menipis, sehingga para petani atau pemilik kebun selalu melakukan pembersihan dan pembakaran pada musim panas untuk mengaktifkan kembali humus tanah, sambil mempersiapkan lahan kebun yang baru.

Dengan demikian, sekalipun pulau Biak sangat kecil dengan kondisi tanah tandus, masyarakat berkebun atau berladang dengan pola berpindah-pindah. Masyarakat mengelola tanah ulayatnya untuk berladang, khususnya untuk menanam bahan pangan seperti keladi, singkong, jagung, cabe/rica, sayur-mayur untuk kebutuhan keluarga. di setiap kebun, mereka menanam juga tanaman jangka panjang seperti kelapa, pisang, cempedak, buah merah, langsung, rambutan dan mangga. Tanaman jangka panjang ini dimaksudkan untuk menandai kepemilikan kebun keluarga.

Masyarakat pada umumnya mengaku sebagai petani dan nelayan, namun bertani bukan mata pencaharian utama, karena mereka juga masih meramu hasil hutan seperti menokok sagu, mencari sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan makanan keluarga.

d. Kehidupan Sosial - Budaya

1. Kekerabatan dan kepemimpinan adat/kampung

Kekerabatan masyarakat di kampung-kampung dari Biak Numfor sampai Supiori pada umumnya sangat mirip baik dalam sistem pola adat dan norma adat yang dilakoni dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat adat. Peraturan atau norma-norma yang dikenal hingga saat ini masih terpelihara. Hal ini nampak pada kebiasaan kerja sama antar suku maupun marga. Persatuan mereka cukup kuat sesuai dengan nilai-nilai adat yang masih dipertahankan sebagai pedoman hidup bagi mereka. Semuanya tunduk pada pemimpin adat dan orang yang di tuakan di kampung yang dikenal dengan sebutan *Mananwir Mnur*. Pemimpin adat ini mempunyai peran besar untuk mengatur kehidupan warganya, seperti mengatur sistem kepemilikan tanah ulayat dan mengatur proses-proses pengambilan keputusan mengenai akses-akses mereka terhadap sumberdaya alam yang ada pada tanah maupun hutan adat

mereka. Mereka belum terpengaruh untuk memperjual-belikan tanah ulayatnya kepada orang lain.

Tatatanan adat sekarang dilembagakan dengan sebutan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) pada pasca kongres rakyat Papua II pada tahun 2000. Namun, masyarakat umumnya tidak menerima pelembagaan adat secara permanen, karena jauh sebelumnya lembaga adat terorganisir secara tradisional dalam otoritas marga-marga, sehingga menurut mereka LMA tidak perlu terlembagakan secara permanen.

2. Sistem perkawinan adat

Masyarakat adat Biak menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu tidak boleh melakukan perkawinan antara marga yang sama. Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam marga yang sama yang biasanya terjadi, akan disetujui bila dari penghitungan silsilah keturunan sudah berjarak kurang lebih tujuh (7) turunan. Namun, Sehingga jarang terlihat perkawinan yang terjadi dalam marga yang sama.

Pada umumnya semua masyarakat di kampung-kampung di Biak dan Supiori menganut paham patrilineal, sehingga kaum laki-laki yang memiliki kekuasaan, mendapatkan hak waris. Sementara kaum perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Keputusan ada pada kaum laki-laki. Dampak dari hal ini adalah tingginya nilai maskawin yang dibebankan kepada kaum laki-laki untuk membayar/meminang seorang perempuan yang akan dijadikan sebagai isterinya.

Dalam tatanan adat yang berada di bagian Utara Biak untuk menjaga suatu perkawinan dalam keluarga biasanya kalau orang yang baru menikah biasanya di tabur dengan kapur. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan, keluarga tersebut dan sebagai jaminan secara psikologis bahwa keluarga mereka akan bahagia. Bukan saja dilakukan pada orang kawin, selain itu juga melindungi saudara mereka yang akan pergi merantau ke daerah lain agar dalam perjalanannya selalu dilindungi sampai kembali ke kampung halamannya. Penaburan kapur pada orang kawin atau orang yang akan melakukan perjalanan dilihat juga sebagai simbol penyertaan para leluhur, sesuai kepercayaan asli adat orang Biak Timur.

3. Peran Gender dalam keluarga

Umumnya masyarakat di kampung-kampung dimana assesment dilakukan memiliki pembagian kerja yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Pada umumnya kaum perempuan lebih banyak menanggung beban kerja dalam keluarga. Mereka mengurus kebun/ladang sampai mengambil hasilnya untuk dipasarkan dan mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarga. Kaum laki-laki pada umumnya hanya melakukan kegiatan seperti membangun rumah, menebang pohon/hutan kebun baru, dan melakukan kegiatan berburu serta melaut di sekitar kampung pada saat keadaan cuaca baik untuk mencari ikan di laut.

Kaum perempuan juga biasanya lebih banyak mengurus kebutuhan dalam keluarga, termasuk melakukan aktifitas di kebun, meramu di hutan, menokok sagu untuk kebutuhan makan keluarga dan memasarkannya di kota untuk memperoleh uang. Hal ini terlihat dari kesibukan mama-mama di kampung cukup tinggi jika

dibandingkan dengan kesibukan kaum laki-laki. Jika dilihat dari baik-buruknya cuaca, kaum laki-laki selalu menunggu cuaca yang baik untuk beraktifitas di laut, sementara kesibukan kaum perempuan justru tidak pernah mengenal cuaca. Sekalipun hujan, tetapi kebutuhan keluarga sangat menuntut mereka untuk mencari kebutuhan keluarga. Sementara di pasar (pasar inpres kota) menunjukkan fakta bahwa kaum perempuan yang duduk di pasar untuk memperjual-belikan hasil kebun dan hasil pencariannya di laut.

Kaum laki-laki jarang sekali berada di pasar, sekalipun laki-laki ikut ke pasar, biasanya hanya untuk membantu memikul barang jualan yang berukuran berat atau melampaui tenaga seorang perempuan. Bahkan di setiap taxi (angkutan pedesaan), lebih banyak nampak perempuan yang berangkat dari kampung ke kota untuk memasarkan jualan di pasar inpres Biak Kota. Mereka membawa materi jualan seadanya untuk memperoleh uang.

4. Kecenderungan masyarakat

Dalam kehidupannya masyarakat mulai melakukan berbagai pergeseran sebagai bentuk kecenderungan dari pola hidup produktif menjadi konsumtif. Hal ini terjadi sejak pasca gempa tsunami tahun 1996. Kemauan keras untuk mencari nafkah di laut sudah menurun, karena sebagai akibat dari bencana alam tersebut adalah rusaknya habitat laut seperti terumbu karang sehingga ikan dan udang bahkan kepiting jarang ditemukan. Contohnya adalah orang Soryar rata-rata mempunyai pohon kelapa dalam jumlah banyak, tetapi mereka sendiri tidak membuat minyak kelapa untuk kebutuhan konsumsi keluarga; mereka membeli minyak goreng bimoli dari pasar atau toko.

Adapun ketergantungan masyarakat pada ‘beras miskin (raskin)’, bahkan dana-dana bantuan pemerintah seperti dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bandes dari pemerintah setempat. Dana-dana bantuan ini biasanya dibagikan seluruhnya kepada setiap Kepala Keluarga, sehingga hal ini sudah diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pendapatan. Bahkan memori masyarakat akan pengalaman gempa tsunami tahun 1996 telah membuat mereka hidup bergantung pada bantuan-bantuan. “Kalau dulu waktu gempa boleh, itu kita dapat bantuan kebutuhan hidup cukup, sekarang hanya dana otsus saja; Dulu waktu gempa gampang dapat bantuan, sekarang sudah susah sekali dapat bantuan, apalagi cari uang di Biak ini sangat susah.”

e. Sumber ekonomi dan pendapatan masyarakat

Sebagai petani, peramu dan nelayan, masyarakat kampung bergantung pada hasil pertanian dan hasil mencarinya di hutan dan laut sesuai kearifan yang mereka miliki. Mereka membawa hasil ladang/kebun seperti jagung, keladi, singkong, sayur-sayuran dan buah-buahan ke pasar,

Hasil kebun yang biasanya mereka jual ke kota seperti, keladi, pisang, bete dan sayur-sayuran dengan harga bervariasi kalau keladi satu tumpukan biasanya dengan harga Rp.3000 – 5000 dan untuk sayuran biasanya dengan harga perikat Rp 1000 dan 2000 sesuai dengan ikatan sayur tersebut. Selain itu biasanya masyarakat adat setempat mengumpulkan buah-buah kelapa kering untuk dijual kepada pembeli yang datang dari pasar inpres di pusat kota kabupaten. Mereka sendiri mampu dan memiliki keterampilan untuk membuat

minyak kelapa, tetapi kesibukan mencari hasil laut dan hasil hutan lebih dominan sehingga mereka tidak memproduksi minyak kelapa.

Harga hasil laut seperti taripan ada beberapa jenis yang ada dengan harga yang berbeda pula misalnya taripan gosok biasanya di beli dengan harga 1 kg. 70.000 – 90.000 sedangkan udang Lobster harganya 1kg. 95.000 – 105.000 bila di jual ke kota sedangkan kalaju di beli di kampung biasanya 50.000 – 70.000 1. kg oleh tengkulak dan untuk siput laut seperti bialola harga 1 kg. 35.0000 bila di jual ke kota sedangkan di kampung hanya di beli dengan harga 10.000 – 15.000.

Kegiatan mencari di laut, biasanya tidak terlalu memberikan hasil, karena peralatan yang digunakan sangat sederhana. Mereka hanya bermodalkan perahu dayung yang dilengkapi dengan jaring dan pukat mini serta kalawai (sejenis tombak khusus untuk ikan). Namun, hasil mencari sekalipun sedikit jumlahnya, mereka berupaya untuk menjual sebagian untuk mendapatkan uang. Hasil jualan biasanya dibagi dua; yang sebagian untuk kebutuhan harian rumah tangga dan sebagian lainnya untuk dana pendidikan anak sekolah. Dana cadangan keluarga untuk biaya pendidikan anak sekolah ini biasanya disimpan oleh ibu rumah tangga (dompet keluarga); ada empat (4) keluarga yang berasal dari kampung Soryar yang sudah sejak tahun 1999 mulai menabung di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Biak di kota .

f. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat dikampung-kampung lokasi assesment dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 19. Sarana dan prasarana yang terdapat di kampung-kampung Kabupaten Biak Numfor dan Supiori

Sarana dan prasarana	Nama Kampung				
	Soryar	Wadibu	Yeruboy	Komboy	Pudori
Penerangan	✓	✓	✓	✓	✓
Air bersih & MCK			✓	✓	✓
Transportasi	✓	✓	✓	✓	✓
Kesehatan	✓	✓			
Pendidikan		✓		✓	
Telekomunikasi	✓				
Pemerintahan				✓	
Perumahan	✓	✓		✓	
Perekonomian					
Peribadatan	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Analisis PKB Kampung-kampung di Kabupaten Biakdan Supiori

a. Sumberdaya Alam

Sumber daya alam yang terdapat dikampung-kampung wilayah assesment Kabupaten Biak dan Supiori selatan sangat beragam yaitu : Hutan: hutan campuran, mangrove, obat tradisional (anurek, araripyo, aryobo, anas, aner, arwam), sagu (jenis markbon, snaafe, sworu insarek, sawer) dan aneka anggrek hutan yang berpotensi ekonomi. Sumber daya Laut berupa rumput laut, ikan, udang, gurita, kepiting, dan aneka jenis kerang. Di dalam sumber daya alam tersebut ada lagi sumber daya yang memiliki andil dalam modal perikehidupan masyarakat di kampung kampung tersebut yaitu sumber daya pertanian. Untuk sumber daya pertanian yang dimiliki oleh kampung-kampung tersebut baik yang berada di Kabupaten Biak Numfor, maupun kampung yang ada di Kabupaten Supiori relatif sama yaitu adanya tanaman Kelapa, Jeruk, Nangka, pisang, jagung, singkong, keladi, betatas, rica/cabe, sayur-mayur, bawang, kunyit, dan lain-lain.

b. Sumber daya ekonomi

Sumber daya ekonomi di semua kampung masih terbatas pada komoditi-komoditi bahan pokok baik yaitu industri minyak kelapa (usaha keluarga dan kelompok), industri ikan asin, gurita kering, teripang, udang lopster, kios sembako (kios jendela), simpan-pinjam kelompok, pasar umum dan pasar rakyat spontan (pasar kaget).

c. Sumber daya Manusia

Untuk sumber daya manusia kuantitasnya berbeda-beda antara kampung, baik yang ada di Kabupaten Biak Numfor, maupun yang ada di kabupaten Supiori, adapun kuantitas tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Potensi SDM yang terdapat di kampung-kampung wilayah assesment Kabupaten Biak Numfor dan Supiori

Kabupaten	Sarana dan Prasarana
Kampung Soryar	memiliki 2 guru, 1 bidan desa, 6 tukang bangunan, 2 sopir, 4 dukun bersalin kampung, 1 petugas gereja, 20 pemuda gereja.
Kampung Wadibu	memiliki 9 guru, 1 bidan desa, 7 tukang bangunan, 4 sopir, 5 dukun bersalin kampung, 1 petugas gereja, 27 pemuda gereja.
Kampung Komboy	memiliki 7 guru, 1 bidan desa, 8 tukang bangunan, 4 sopir, 3 dukun bersalin kampung, 1 petugas gereja, 24 pemuda gereja.
Kampung Yeruboy	memiliki 2 tenaga medis, 4 dukun kampung (perempuan), 4 guru SD, 1 guru SLTP, 10 tukang bangunan, 3 teknik sipil bangunan, 2 tenaga ekonomi dan akuntansi, 1 petugas gereja, 20 pemuda gereja
Kampung Pudori	9 orang tenaga tukang bangunan, 4 orang tenaga guru, 1 tenaga medis, 4 tenaga dukun kampung, 2 tenaga teknik sipil (tamatan STM), 1 tenaga ekonomi dan akuntansi (tamatan SMEA).

d. Sumberdaya Sosial Budaya

Sumber daya sosial budaya yang dimiliki oleh kampung-kampung di dua kabupaten ini pada umumnya hampir sama saja yaitu adanya Lembaga Masyarakat Adat (LMA), hukum dan nilai-nilai adat istiadat, Badan Pemerintahan Kampung (BAPERKAM), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Sistem Kerjasama KERET/marga (gotong royong), gereja dan sekolah.

e. Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Sarana dan prasarana yang terdapat di kampung-kampung lokasi assesment juga tidak banyak perbedaan yaitu adanya 1 unit posyandu, jalan beraspal, transportasi darat lancar, listrik PLN 24 jam, namun untuk sarana pendidikan dengan 6 ruang kelas hanya terdapat di kampung Wodibu dan Komboy.

D. TEMUAN-TEMUAN PENTING DI LAPANGAN

Temuan penting dalam hal ini adalah apa yang menjadi hal penting untuk disampaikan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat kampung di tiga kabupaten. Berdasarkan hasil survei Assesment tersebut ada beberapa hal penting yaitu :

Kabupaten Teluk Wondama

Kampung-kampung di wilayah Kabupaten Teluk Wondama memiliki potensi sumber daya alam tinggi, namun hingga saat ini pengembangan kampung kaitannya dengan peningkatan penghasilan dan kualitas hidup masyarakat sangat minim, hal ini terlihat dari tidak adanya saran transportasi menuju ibukota kabupaten untuk menjual hasil. Atau setidaknya ada akses penjualan hasil bumi dan hasil laut yang mereka miliki, namun yang datang adalah pedagang pengumpul yang lebih mirip lintah darat karena membeli hasil dengan harga yang sangat murah. Hal lain yang ditemui adalah :

1. Dikampung Kaprus, dan Werabur terdapat sarana kesehatan berupa PUSTU tetapi tidak digunakan karena tidak ada tenaga kesehatan yang tinggal disana
2. Di kampung Mamisi, pelabuhan menjadi hal yang paling mendapat keluhan masyarakat selain pendidikan, dan kesehatan karena pelabuhan ini berguna untuk meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat mengingat pantai yang ada di depan kampung tersebut sangat susah disinggahi kapal kecil karena arus air dan angin yang selalu bertiup kencang. Sehingga masyarakat sering mengeluh karena tidak dapat keluar menjual hasil dan membeli sembako di ibukota distrik.

Kabupaten Sorong

1. Tidak adanya sarana transportasi yang dapat mendukung masyarakat walaupun prasarana seperti jalan raya ataupun pelabuhan sudah ada. Kalaupun ada sangat sedikit jumlahnya dan biaya yang dikeluarkan sangat mahal
2. Kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk ibu dan anak (Balita) di kampung-kampung sangat minim bahkan ada beberapa kampung di wilayah Sorong yang beberapa tahun terakhir ini tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan bahkan kadang di tolak jika ada yang sakit dan ingin berobat ke Rumah Sakit di Kota.

3. Kurangnya perhatian pemerintah akan air bersih dan MCK terutama di Kabupaten Sorong yang memang sangat susah memperoleh air
4. Sebagai alat penerangan, masyarakat menggunakan genset yang sangat memakan biaya tinggi dalam pengoperasian dan perawatannya padahal penggunaan alternatif pembangkit energi lain dapat dilakukan cuman tidak digalakkan
5. Sarana dan prasarana pendidikan sangat memprihatinkan di hampir semua kampung walaupun ada kondisinya sangat buruk.
6. Hampir diseluruh kampung di 3 Kabupaten tempat dimana assesment dilakukan akses pasar sangat susah sehingga apa yang menjadi komoditi masyarakat yang sekiranya dapat meningkatkan perekonomian tidak dapat dijual.
7. Rendahnya akses informasi di bidang ekonomi dan sosial serta teknologi pertanian/kelautan.

Kabupaten Biak dan Supiori

1. Beberapa kampung di Kabupaten Biak dan Supiori terdapat hamparan kelapa dan pinang yang sangat yang luas, tetapi masyarakat jarang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai seperti minyak kelapa contohnya, masyarakat lebih dominan untuk membeli minyak goreng kemasan dibandingkan dengan membuat sendiri. Begitu juga dengan pinang, akan tetapi jika diamati lebih dalam ternyata yang mengakibatkan masyarakat malas menjual dan mengelolanya adalah karena tidak jelasnya pasar yang dapat menyerap komoditi tersebut dengan frekuensi yang tetap.
2. Biak Numfor terkenal dengan sebutan pulau karang, karena kondisi tanahnya yang bersolum dangkal dan lebih didominasi oleh batu karang. Kondisi ini menyebabkan penyerapan dan penyediaan air tanah menjadi terbatas, sehingga di Biak masalah air bersih masalah lama dan bersifat umum baik yang ada diperkotaan ataupun masyarakat dikampung, bahkan infiltrasi air laut untuk daerah pesisir telah menjadi satu kejadian alam yang banyak dikeluhkan masyarakat. Tapi yang mengherankan kurangnya sarana dan prasarana air bersih di hampir seluruh kampung terasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga tidak jarang masyarakat berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mendapatkan air yang sedikit lebih baik dan layak dikonsumsi.

BAB III. PERAN CSO/CBO

Perkembangan organisasi masyarakat sipil (CSO/CBO) di Papua beberapa tahun terakhir ini cukup signifikan. Dimana organisasi ini mengambil peran dalam memfasilitasi atau mendampingi masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mempercepat pembangunan masyarakat di Papua. Saat ini wilayah kepala Burung Papua menjadi primadona dan arena persaingan berbagai pihak yang berkepentingan. Wilayah ini menjadi sangat terkenal setelah dimulainya eksplorasi minyak dan gas (tambang Tangguh milik British Protelium (BP) di Bintuni). Selain itu, produk-produk dari hutan (termasuk kayu merbau yang terkenal mahal), tanah pertanian (khususnya untuk perkebunan kelapa sawit), dan sumber daya laut. Investasi korporasi secara besar-besaran kini dikonsentrasikan di daerah Kepala Burung.

Kolusi perusahaan-perusahaan besar melalui Program Tangung Jawab Sosial Perusahaan (Freeport, BP, Japan, Korea, USA, dll.) dengan aparat keamanan serta lembaga donor dari pemerintahan seperti USAID (Civil Society Strengthening Program (CSSP) , PERFORM Project, National Democratic Institute (NDI), Natural Resource Management-EPIQ, ACIDI-VOCA, dan Family Heatl International-ASA), JICA, SIDA, DFID juga memiliki agenda-agenda mereka sendiri di Papua. Lembaga donor non-pemerintah seperti Catholic Relief Services, Oxfam Australia, World Vision Australia, WWF, dll., juga memainkan peran yang cukup besar, dan juga beberapa LSM internasional (TNC, CI dan WWF) telah membuka kantor cabangnya dekat dengan daerah operasi perusahaan-perusahaan multinasional. Kedekatan lembaga-lembaga donor ke masyarakat dinilai sebagai sumber konflik diantara organisasi dan komunitas masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada pola pengaturan dana di Papua akan berubah sangat drastik, karena dana-dana tersebut akan menjadi subyek koordinasi/supervise dan memicu konflik.

A. KLASIFIKASI CSO/CBO

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang apa yang selama ini dilakukan oleh CSO/CBO maka terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi perbedaan mendasar antara CSO dan CBO. Organisasi CBO adalah organisasi masyarakat basis (lembaga agama, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan kelompok-kelompok tertentu masyarakat ditingkat basis (Kelompok Usaha Bersama “KUBE”) dan Koperasi Serba Usaha(KSU)), sedangkan CSO adalah organisasi masyarakat sipil (LSM =Lembaga Swadaya Masyarakat dan KSM = Kelompok Swadaya Masyarakat). Selain kedua organisasi ini terdapat juga organisasi yang sebenarnya bukan bagian dari CSO maupun CBO. Walaupun secara umum pekerjaannya banyak memiliki kemiripan dengan kedua bentuk organisasi tersebut. Umumnya lembaga-lembaga ini merupakan bentukan pemerintah, namun bekerja sebagaimana layaknya organisasi sipil lainnya.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan berhubungan dengan keberadaan CSO di ke-3 kabupaten, maka nampak sekali bahwa keseluruhannya masih berpusat di ibukota

kabupaten baik, di Manokwari, Biak dan Sorong. Sedangkan penyebaran CBO, baik lembaga agama, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Koperasi Usaha Bersama (KUBE) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) pada umumnya telah tersebar sampai pada tingkat Distrik (LMA Windesi) dan Kampung (Dewan Adat Kampung di Sorong), KUBE di Teluk Wondama).

B. CSO/CBO KABUPATEN TELUK WONDAMA

Perkembangan CSO/CBO

Masuknya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1907 ke Wasior juga menjadi indikator bahwa proses pendidikan rakyatpun telah dimulai, karena kedua biasanya saling mengikuti, pendidikan pertama berupa kegiatan Zending di bidang gerejani di yende (P. Roon) dan bersamaan dengan Pelaksanaan Pemerintahan yang berpusat di Aisandami, sehingga secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya proses pendidikan dan pengembangan SDM yang terjadi di berbagai kampung di papua secara umum dan di Kabupaten Teluk wondama khususnya, banyak dipengaruhi oleh sejarah pekabaran injil dalam hal ini missionaris dan zending. Salah satu contoh kampung yang telah lama dipengaruhi oleh zending di distrik windesi adalah kampung werabur. Dimana pada tugu gereja tua tertulis tahun 1940 yang berarti pada tahun itu juga proses masuknya pengetahuan dan pengembangan SDM sudah mulai berjalan, karena pendidikan yang dilakukan oleh missionaris dan zending bukan hanya mempengaruhi agama kepercayaan masyarakat umumnya, tetapi juga sendi-sendi kehidupan lainnya seperti adat, budaya dan pendidikan.

Masuknya Indonesia ke papua pada tahun 1963, ternyata membawa perubahan pada pengelolaan sarana pendidikan yang pada awalnya dilakukan oleh zending yang berbasis gerejawi ke pada Yayasan yang selama ini eksist di indonesia yaitu Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). Dalam programnya YPK tidak melakukan berbagai pendampingan dan pengorganisasian masyarakat, tetapi lebih pada upaya pelaksanaan pendidikan formal.

Jika melihat dinamika pemerintahan saat ini maka secara otomatis lembaga sosial yang terdaftar dan beraktifitas di kabupaten Teluk Wondama khususnya CSO, belum ada. Karena semua lembaga-lembaga Sosial yang biasanya bergerak di daerah tersebut berada atau masih memiliki sekretariat di Kabupaten Manokwari. Sedangkan kabupaten tersebut baru memiliki umur kurang lebih 2 tahun. Namun saat ini dapat dikatakan bahwa beberapa CSO/CBO telah berperan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Masuknya CSO/CBO ke Teluk Wondama diawali pada tahun 1970-an, yaitu Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), sedangkan dalam kurun waktu 1970 – 1992 tidak ada LSM lokal maupun internasional yang tercatat bekerja di wilayah ini, kemudian tahun 1993 lembaga pemerintah yaitu dari Departemen Kehutanan dalam pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil di kawasan Teluk Cenderawasih tepat pada Teluk Wondama dan Nabire, yang dibentuk suatu “Balai Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (BNTLTC) Surat Keputusannya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, menjadi kawasan konservasi karena dinilai memiliki plasma nutfah yang kaya serta unik yang perlu dilindungi untuk

kepentingan pembangunan, lalu di tahun 1995-sekarang WWF Indonesia (sekarang WWF bioregional Sahul) bekerja difokuskan pada riset-riset, kemudian diikuti oleh Yayasan Lingkungan Hidup Humeibou Manokwari (YALHIMO) tahun 2000, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Pribumi (YAPMI), Lembaga Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), pos kontak ELS-HAM Papua, Yayasan Usaha Sejahtera (YUSE), CCAD-UNDP, dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Bank Dunia.

Organisasi CSO/CBO Kabupaten Teluk Wondama

Organisasi CSO/CBO maupun lembaga lain yang selama ini dan pernah bekerja di Teluk Wondama sebagai berikut :

Tabel 21. Lembaga/organisasi yang pernah bekerja di Wilayah Kabupaten Teluk Wondama

No.	CSO	CBO	Lembaga Lain
1	LP3BH-Manokwari	KUBE Rumberpon	PKK
2	Pos kontak ELS-HAM	KUBE Werabur	BAPERKAM
3	YALHIMO	Koperasi Serba Usaha (KSU)* 1. KSU Samarai kampung werabur 2. KSU Latimojo Kampung Mamisi 3. KSU Maskeri I, dan II kampung Werianggi 4. KSU Mayosi, Kampung Senebuai 5. KSU Megapura, Kampung Kaprus	BTNTC
4	CCAD-UNDP	LA Windesi*	PPK
5	YUSE	Lembaga Agama	
6	WWF		
7	YPK		
8	YAPMI		

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Ket : * Merupakan buatan pemerintah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 8 organisasi klasifikasi CSO yang pernah bekerja di wilayah Kabupaten Teluk Wondama dalam mendorong keberdayaan masyarakat serta perlindungan hak-hak masyarakat adat, 5 organisasi klasifikasi CBO tetapi khusus lembaga adat ini difasilitasi oleh pemerintah sedangkan KSU (kopermas) dibentuk oleh masyarakat kampung untuk pengusaha bidang tertentu sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, dan 4 klasifikasi lembaga lain.

Dinamika Keberadaan CSO/CBO dan lembaga lain.

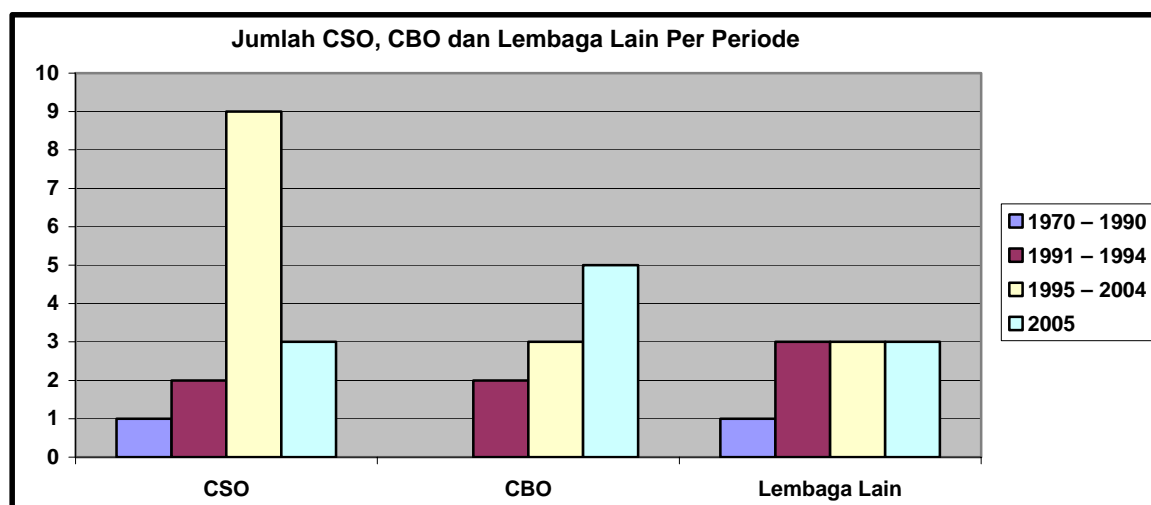
CSO maupun CBO merupakan suatu organisasi yang memiliki berbagai keterbatasan baik dalam hal kapasitas pembiayaan maupun sumberdaya manusia serta daya analisis dalam membaca kondisi tentang perubahan-perubahan ke arah pelemahan rakyat, sehingga terkadang eksistensinya sering tak dapat diperkirakan dalam suatu daerah. Kenyataan ini juga terjadi di dalam wilayah Teluk Wondama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 22. Jumlah CSO/CBO dan organisasi lain yang bekerja di Wilayah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan tahun pelaksanaan kegiatan

No.	Tahun	Jumlah		
		CSO	CBO	Lembaga Lain
1	1970 – 1990	1	-	1
2	1991 – 1994	2	2	3
3	1995 – 2004	8	3	3
4	2005	3	5	3

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada kurun waktu tahun 1970 hingga 1990 hanya terdapat 1 CSO di Kabupaten Teluk wondama, bahkan CBO belum ada atau belum tercatat. Pada kurun waktu tahun 1995 – 2004 terjadi pembengkakan jumlah CSO yang terdapat di sana yaitu 8 CSO. Hal ini dikarenakan adanya dinamika wilayah dan semakin terbukanya akses informasi tentang kondisi wilayah sehingga memberikan ruang untuk CSO melakukan aktivitas sesuai dengan visi-misi yang diemban. Namun pada tahun 2005 hanya terdapat 3 CSO yaitu YALHIMO, WWF, dan YPK. Sedangkan CSO yang lain telah menyelesaikan programnya, karena umumnya mereka hanya melaksanakan program jangka pendek. Untuk lebih jelas bagaimana dinamika keberadaan CSO/CBO dan lembaga lain dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Setelah melakukan survei tentang keberadaan CSO di Wilayah Teluk Wondama, ternyata dari 8 CSO yang bekerja di wilayah tersebut dan tidak ada satupun yang memiliki kantor sekretariat di Teluk Wondama, tetapi masih tetap berada di Manokwari. CBO terlebih pada KOPERMAS yang bergerak dibawah Koperasi Serba Usaha (KSU) yang dimiliki oleh masyarakat ternyata hampir keseluruhannya terbentuk bukan karena inisiatif masyarakat, tetapi cenderung karena pemenuhan suatu persyaratan dalam upaya pengelolaan hasil sumber daya alam misalkan potensi hutan dan laut. Kopermas yang dibentuk kadangkala menjadi sumber konflik antar masyarakat sendiri, contoh kasus yang terjadi di kampung Werabur, dan Mamisi yang mengeksploitasi hutan pada wilayah hak ulayat yang sama, sehingga ketika pembagian kompensasi tarik menarik antar masyarakat kampung pemilik hak ulayat tentang besar dana yang harus dimiliki. Bahkan yang lebih buruk lagi sebagian besar masyarakat tidak mengerti peran dan fungsi kopermas serta yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat.

Kemudian lembaga agama (kristen protestan) lebih berkonsentrasi pada kegiatan rutinitas keagamaan yakni pekabaran injil dan pelayanan anggota jemaat serta peran-peran rekonsiliasi. Selain itu juga terdapat organisasi ekonomi masyarakat yang terbentuk di tingkat kampung seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE ini terdapat dikampung Yomakan, dimana anggotanya adalah kaum perempuan yang difasilitasi oleh YALHIMO dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menampung hasil-hasil laut berupa ikan asin. Tujuan dari pembentukan KUBE ini adalah pada prinsipnya sebagai media saling bertukar fikiran dan berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang berkembang ditengah masyarakat dan persoalan mengenai pengelolaan SDA secara khususnya, dimana secara tidak langsung menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Lembaga Adat (LA) Windesi, dibentuk tahun 1998 pada prinsipnya dibentuk untuk pengelolaan aspirasi masyarakat adat, namun tidak pernah melakukan fungsinya secara nyata di dalam masyarakat, sebab sesungguhnya wadah ini difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kepentingannya sehingga yang menjadi harapan rakyat bahwa untuk menjadi DPR atau dapur kampung tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Perwakilan Kampung (BAPERKAM) terkesan hanya sebagai pelengkap struktur kampung, karena melalui hasil survei kedua lembaga ini tidak pernah berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan pembentukannya.

Program kerja CSO/CBO dan lembaga lain

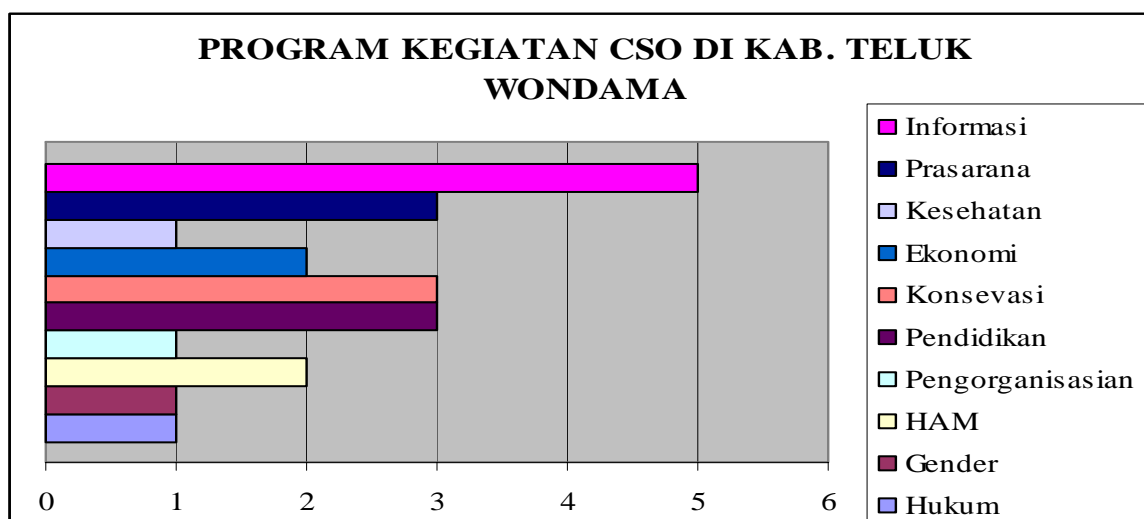
Pada umumnya CSO yang berada dan pernah bekerja di daerah Kabupaten teluk Wondama memiliki beberapa kegiatan utama yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan ekonomi kerakyatan, kesehatan ibu dan anak, dan advokasi HAM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 23. Bidang kerja CSO yang bekerja di Kabupaten Teluk Wondama

No.	Nama lembaga	Bidang kegiatan	Keterangan
1	LP3BH	- Pendidikan Hukum praktis - Advokasi HAM	Selesai
2	Pos kontak ELS-HAM	- advokasi HAM - penyebaran informasi	Selesai
3	YALHIMO	- Pendidikan Lingkungan Hidup - Pengorganisasian Masyarakat - Ekonomi kerakyatan - Kesehatan ibu & anak	Masih berlanjut
4	CCAD	Sarana perangkapan ikan	
5	YUSE	Pengadaan bibit tanaman perkebunan (reboisasi)	Selesai
6	WWF	- Pemetaan wilayah konservasi - Pendataan sumberdaya alam	Masih berlanjut
7	YPK	Pendidikan formal	Masih berlanjut
8	PPK	- Perekonomian rakyat - Sarana kampung	Selesai
9	YAPMI	Pengadaan sarana air bersih	Selesai

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, YALHIMO

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh berbagai CSO adalah penyebaran berbagai informasi melalui berbagai media, dimana tercatat 5 LSM yang melakukannya, dan hal ini dilakukan secara terus menerus, walaupun tidak teratur.



Posisi kedua ditempati oleh program pengadaan sarana dan prasarana di berbagai bidang, konservasi dan pendidikan secara bersamaan dimana tercatat ada 3 CSO yang

melakukannya di daerah Teluk Wondama, sedangkan untuk pendidikan Hukum Praktis, HAM, Gender dan pengorganisasian hanya dilakukan oleh masing-masing 2 CSO yaitu Yalhimo untuk program pengorganisasian masyarakat adat, dan YPK di bidang pendidikan Formal.

Jika melihat dari keberlanjutannya (Tabel 9) ditemukan hanya ada 3 CSO saja yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu WWF, YPK, dan YALHIMO. Sedangkan 5 CSO lain tidak dapat melanjutkannya dengan berbagai alasan seperti LP3BH dan pos kontak ELS-HAM Manokwari, kegiatan yang dilakukan hanya terbatas pada pelaksanaan Advokasi dan pendidikan hukum praktis yang kebutuhannya bersifat Urgent dimana, dilatarbelakangi oleh terjadinya peristiwa Wasior berdarah yang menelan banyak korban masyarakat sipil, PPK (program pengembangan Kecamatan), YUSE (Yayasan Upaya Sejahtera), YAPMI (Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Pribumi) dan CCAD hanya memiliki program jangka pendek dan umumnya terbatas pada pengadaan sarana.

Hubungan Kerjasama Kelembagaan

Hubungan kerjasama kelembagaan baik antara lembaga non-pemerintah maupun dengan lembaga pemerintah. Hal ini secara tidak langsung terlihat dari implementasi program kerja di tengah masyarakat kampung secara tidak langsung melibatkan pihak pemerintah maupun pihak lembaga adat dan agama yang mana disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selama implementasi program yang dilakukan baik oleh CSO/CBO maupun lembaga lain serta pemerintah belum seratus persen dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, finansial serta kondisi lapangan yang tidak menunjang.

Target keberhasilan dan permasalahan

Target keberhasilan dan permasalahan yang didapat didefinisikan sesuai dengan hasil ungkapan lisan dari masyarakat penerima manfaat, berkaitan dengan program yang tidak melibatkan masyarakat secara penuh dalam membangun proses pembelajaran secara partisipatif, proses belajarnya terputus karena mengikuti nuansa proyek semata, dan maksud dari proyek tidak tepat sasaran. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Kegiatan terbatas pada program yang telah direncanakan sesuai dengan waktu dan ketersediaan dana, setelah itu program tersebut tidak dilanjutkan jika tidak ada pendanaan lanjutan. Kenyataan ini hampir terjadi diseluruh NGO lokal di Wilayah tersebut. Jadi ketersediaan dana menjadi satu titik permasalahan utama. Kenyataan ini semakin jelas dengan adanya sifat ketergantungan NGO lokal terhadap funding atau donor luar.
2. Tidak sinergisnya program kerja antara CSO atau dengan lembaga lain seperti pemerintah. Pelaksanaan program yang berbeda kepada satu objek akan membuat situasi kebingungan dan minimnya dukungan masyarakat terhadap program.
3. Kurangnya kajian tentang potensi sumberdaya alam dan kebutuhan masyarakat secara mendasar sehingga mengakibatkan terjadinya implementasi program tanpa adanya

keberlanjutan program secara mandiri di dalam masyarakat. Hal seperti ini dapat memperburuk keadaan masyarakat dimana kemandirian yang diharapkan akan berubah menjadi ketergantungan yang semakin berkembang.

Selain itu berkaitan dengan kapasitas lembaga, seperti kapasitas pembiayaan dan sumberdaya manusia yang tersedia dalam menjalankan program sangat terbatas, tetapi jika memiliki staf yang mempunyai kapasitas dibidang tertentu diperhadapkan dengan permasalahan salary yang sangat rendah maka akan mencari peluang-peluang lain sesuai dengan keinginan pada lembaga yang dianggap mempunyai kapasitas pendanaan tetapi ada juga yang beralih ke pegawai negeri sipil.

C. KABUPATEN SORONG

Keberadaan dan Kapasitas CSO/CBO

Perkembangan CSO/CBO di wilayah Kepala Burung khususnya Sorong sangat terkait dengan sejarah masuknya penyebaran agama Kristen Protestan dan diikuti dengan agama Katolik yang pada saat itu masuk di wilayah Aifat (Sorong bagian selatan). Penyebaran agama Kristen Protestan dan Katolik secara langsung maupun tidak langsung merubah dan mempengaruhi budaya dan tradisi serta pola kehidupan masyarakat. Selain itu dalam perkembangannya, kedua institusi keagamaan ini membangun sarana dan prasarana pendidikan dasar yang pada awalnya diprioritaskan bagi anak-anak dari para penginjil dan pegawai pemerintahan Belanda. Setelah pengelolaan pendidikan, diserahkan pada yayasan baik Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), maka masyarakat umumnya dapat bersekolah pada sekolah-sekolah tersebut. Hal ini berjalan sampai dengan Papua berintegrasi ke NKRI dan berlanjut sampai dengan saat ini.

Perkembangan CSO/CBO di wilayah kabupaten Sorong dimulai sejak jatuhnya Rezim Orde Baru, dimana pada saat ini organisasi kemasyarakatan sangat terbatas yang disebabkan oleh besarnya tekanan pemerintah maupun militer terhadap masyarakat, khususnya orang Papua. Namun setelah adanya Reformasi (1998), banyak sekali organisasi masyarakat (NGO) yang tumbuh dan berkembang seiring dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan keinginan kepada sekelompok orang maupun organisasi internasional baik dari gereja kristen katolik dan protestan di dalam menyikapi permasalahan baik lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya. NGO lokal yang terbentuk dapat dilihat pada tabel 7. Disamping itu, adapula NGO internasional yang bekerja di wilayah Sorong khususnya kabupaten Sorong diantaranya WWF, CI (Conservation Internation) dan The Nature Consercation (TNC)

Kelembagaan dan Program Kerja

Pada dasarnya program-program kegiatan yang dilakukan oleh Civil Society Organisation (CSO) dan Community Base Organisation (CBO) pada tingkat kampung

masih bersifat temporer / semnetra sehingga dirasakan tidak efektif, hal ini menyebabkan posisi tawar masyarakat terhadap pengaruh dari luar serta para investor dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat lemah. Program-program NGO yang dilaksanakan melingkupi bidang Advokasi HAM, Konservasi sumberdaya alam, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Gender, Kesehatan dan penguatan masyarakat sipil dan pengembangan budaya.

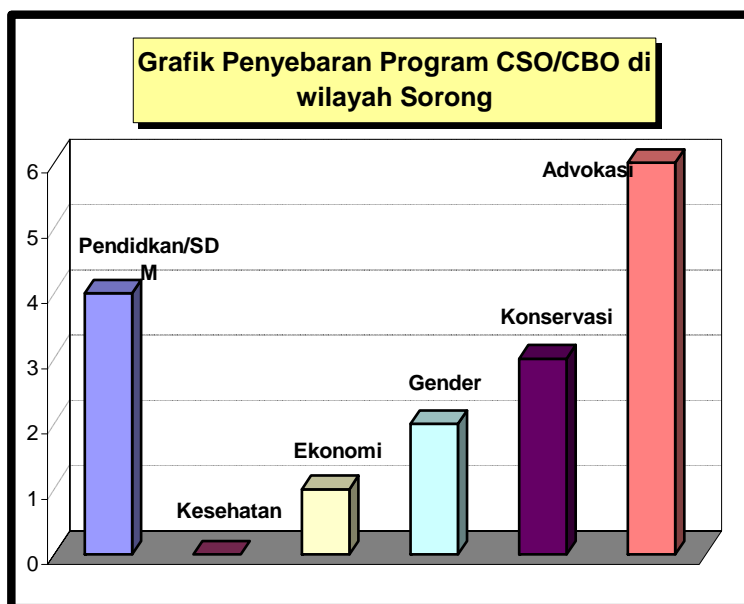
Tabel 24. Keberadaan dan Kapasitas CSO/CBO yang berada di Kabupaten Sorong serta bidang kerja dari masing-masing CSO tersebut.

No	Nama Lembaga	Status Hukum	Jumlah Staf	Bidang Program	Daerah Sasaran
1	SKP KMS , Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (1998)	Berbadan Hukum	3 Orang	Promosi Hak Asasi Manusia Riset Analisis Konflik	Desa dan Kota di Kab. Sorong Provinsi Papua
2	YAMKILI IRJA , Yayasan Amikili Irian Jaya (1998)	Berbadan Hukum	7 Orang	Promosi Hak Asasi Manusia Penguatan Masyarakat Sipil	Desa dan Kota di Kab. Sorong Papua
3	YAPALVO , Yayasan Pengkajian Adat dan Lingkungan Vogel Kop (1999)	Berbadan Hukum	7 Orang	Promosi Pemerintah yang berwibawa Demokratisasi, Penguatan Masyarakat Sipil Pluralisme Isu Gender	Aktifitas di dalam Kota yaitu di Kabupaten Sorong.
4	ELS- HAM (1998)	Berbadan Hukum	8 Orang dan Relawan 30 Orang	Promosi Hak Asasi Manusia Mendampingi Korban Trauma	Desa dan Kota di Kabupaten Sorong Provinsi Papua.
5	LMA – MS , Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong (1998)	Berbadan Hukum	27 Orang dan Relawan 3 Orang	Promosi Hak Asasi Manusia Penguatan Masyarakat Sipil	Desa dan Kota di Kabupaten Sorong Provinsi Papua.
6	ANIMO	Berbadan Hukum	5 Orang	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau – pulau di kepulauan Raja Ampat	Kab dan Kota Sorong, Sorong Selatan, dan Kab. Raja Ampat
7	Eco Papua Aliance Raja Ampat	Berbadan Hukum	6 Orang dan Relawan 6 Orang	Advokasi Illegal Logging Advokasi Pelanggaran HAM	Kota Sorong, Kab. Sorong, dan Kab. Raja Ampat

8	YNWS, Yayasan Nanimi Wabili Su (2002)	Berbadan Hukum	6 Orang	Advokasi, Penguatan Masyarakat Sipil Promosi HAM Isu Gender	Desa dan kota di wilayah Kab. Sorong dan Kota Madya
9	YPPK, Yayasan Pelayanan Pelangi Kasih (2002)	Berbadan Hukum	Staff 10 org Relawan 25 org	Promosi HAM Advokasi/lobi Rekonsolidasi/Negosiasi/ mediasi	Desa dan kota di wilayah Kab. Sorong dan Kota Madya
10	Triton (2000)	Berbadan Hukum	Staff 7 org Relawan 3 org	Pendidikan CO lokal Penelitian, Pengembangan SDA lokal, Capacity Building	Desa dan kota di wilayah Kab. Sorong

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, *YALHIMO*

Pada wilayah kampung yang menjadi lokasi Assesment, diperoleh data dan informasi bahwa organisasi kemasyarakatan yang bekerja di ketiga kampung tersebut adalah Triton dan Dewan Adat Kampung. Triton sebagai salah satu Civil Society Organisation (CSO) memfokuskan program lembaga melalui program pengorganisasian masyarakat dan advokasi pengelolaan sumberdaya alam (hutan) serta kegiatan penyadaran kritis bagi masyarakat. Keterlibatan



masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program lembaga terlihat pada adanya community organiser (CO) yang berasal dari kampung didalam menjalankan program pengorganisasian masyarakat di kampung masing-masing. Selain itu juga terdapat CBO yang bergerak dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat ditingkat kampung. Dimana CBO ini merupakan suatu bentuk struktur adat yang terbangun dari kalangan masyarakat adat Moi pada ketiga Kampung (lokasi Assesment) dalam bentuk sebuah wadah organisasi yang disebut Dewan Adat Kampung. Dewan ini mempunyai fungsi dan peran sebagai penengah didalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara masyarakat, menjalankan serta mengawasi tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat serta memfasilitasi pertemuan-pertemuan adat di kampung. Dewan Adat Kampung merupakan organisasi adat yang merupakan bagian dari Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Sorong (LMA MS) yang berpusat di ibukota kabupaten Sorong. Pada umumnya keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dalam hal pendidikan formal dan akses informasi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Dewan Adat dalam menjalankan program lembaga. Hubungan antara Dewan Adat kampung dan pemerintahan kampung sangat erat, dimana adanya kerjasama yang baik dalam menunjang program pembangunan serta menjaga dan mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat di kampung.

Kelembagaan

Pada umumnya kelembagaan kampung yang ada di ke 3 kampung lokasi Assesment ini sama yaitu: Badan Pemerintahan Kampung, dan kelompok ibu-ibu PKK; di mana masyarakat kampung merasa sangat dekat dengan kelembagaan kampung yang ada. Kedekatan masyarakat ini di karenakan masyarakat melihat adanya perkembangan dalam kampung yang menurut mereka sangat besar pengaruhnya, walaupun perkembangan tersebut masih terdapat banyak kekurangannya yang harus di benahi seperti program untuk kelompok PKK yang di akui oleh mereka masih sangat kurang. Selain itu masih ada lembaga-lembaga lain yang ada di ke 3 kampung ini seperti:

Gereja yang merupakan salah satu lembaga keagamaan di kampung. Peran gereja ditengah-tengah masyarakat di ke 3 kampung ini dirasakan sangat besar manfaatnya karena gereja yang mampu menghimpun dan persatukan mereka yang dulunya hidup terpisah dan tidak menetap, karena perang suku (honge). Selain itu di gereja terdapat organisasi dalam tingkat jemaat (gereja) yang memiliki peran cukup besar dalam membangun keswadayaan jemaat melalui kerja dalam upaya pembangunan gedung gereja, dan juga melalui ibadah rutin tiap unsur tersebut yang secara langsung mempererat hubungan kekerabatan. Unsur – unsur jemaat antara lain: unsur kaum bapak (PKB), unsur kaum wanita (PW), unsur pemuda (PAM), dan unsur anak dan remaja (PAR).

D. KABUPATEN BIAK DAN SUPIORI

Perkembangan dan Penyebaran CSO/CBO

Perkembangan organisasi masyarakat sipil (CSO/CBO) di Papua beberapa tahun terakhir ini cukup signifikan. Dimana organisasi ini mengambil peran dalam memfasilitasi atau mendampingi masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mempercepat pembangunan masyarakat di Papua.

Perkembangan CSO/CBO di wilayah kabupaten Biak-Supiori dimulai sejak adanya organisasian keagamaan baik kristen protestan maupun katolik yang bekerja dalam bidang pendidikan formal. Dimana penanganannya diserahkan kepada Yayasan untuk mengelola pendidikan formal yang dimaksud (SD, SMP dan SMA). Pada tahun 1990-an, Organisasi kemasyarakatan sipil mulai dibentuk yang ditandai dengan terbentuknya RUNSRAM. Namun dalam perjalanannya mengalami banyak tekanan baik dari pemerintah maupun militer. Namun setelah adanya Reformasi (1998), banyak sekali organisasi masyarakat (NGO) yang tumbuh dan berkembang seiring dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan keinginan kepada kelompok orang maupun organisasi internasional di dalam menyikapi permasalahan baik permasalahan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya yang dialami oleh masyarakat.

Kelembagaan dan Program Kerja

Pada dasarnya program-program kegiatan yang dilakukan oleh Civil Society Organisation (CSO) dan Community Base Organisation (CBO) pada tingkat kampung masih bersifat temporer/tidak berkelanjutan sehingga dirasakan tidak efektif, hal ini menyebabkan posisi tawar masyarakat terhadap pengaruh dari luar serta para infestor dalam pemanfaatan sumber daya alam sangat lemah. Program-program NGO yang dilaksanakan melingkupi bidang Advokasi HAM, Konservasi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Gender, Kesehatan dan penguatan masyarakat sipil dan pengembangan budaya. Kelembagaan dan program kerja dari CSO secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 25. Nama-nama lembaga CSO yang terdapat di kampung-kampung Kabupaten Biak Numfor dan Supiori

No	NAMA LEMBAGA	STATUS HUKUM	JUMLAH STAF	BIDANG/PROGRAM	WILAYAH KERJA
1	SP2CK2	Berbadan Hukum	25 Orang dan relawan 300 orang.	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi/lobi • Promosi hak-hak asasi Manusia • Rekonsiliasi, egosiasi dan mediasi. 	Desa dan Kota daerah Kab. Biak Numfor.
2	ECCW	Berbadan Hukum	13 orang dan relawan 42 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Hak-hak Asasi Manusia 	Desa dan Kota di Kab. Biak Numfor Papua.
3	KFLH-BIAK	Berbadan Hukum	9 orang staf dan 3 orang relawan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan masyarakat sipil. • Isu gender. • Promosi hak-hak asasi 	Bergerak di pedesaan di Kab. Biak Numfor Papua.

				manusia	
4	LPMUD “SUP ORISAL”	Berbadan Hukum	5 orang staf dan 3 orang relawan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan masyarakat sipil. • Memfasilitasi dialog 	Bergerak di pedesaan di kab. Bial Numfor Papua.
5	FIADURU Biak	Berbadan Hukum	24 orang staf dan 7 relawan	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi hak-hak asasi manusia. • Penguatan masyarakat sipil. 	Bergerak di desa dan kota di kab. Biak Numfor Papua.
6	PKBI Biak	Berbadan Hukum	17 orang staf dan 4 orang relawan.	<ul style="list-style-type: none"> • HIV/AIDS diseminasi isu Gender. • Pemberdayaan ekonomi masyarakat. 	Bergerak di pedesaan dan kota di kabupaten Biak Numfor Papua.
7	MIPP & HB Biak	Berbadan Hukum	11 Orang staf dan 8 orang relawan.	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi hak-hak asasi manusia. • Penguatan masyarakat Sipil. 	Bergerak di kota di kabupaten Biak Numfor Papua.
8	RUMSRA M BIAK	Berbadan Hukum	12 orang staf dan 13 relawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi masyarakat. • Penguatan masyarakat sipil • Isu gender 	Bergerak di perkotaan dan pedesaan di kab. Biak Numfor Papua.
9	ELS-HAM POS KONTAK BIAK	Berbadan Hukum	3 orang staf 15 relawan	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi hak-hak asasi manusia. • Penguatan masyarakat sipil 	Bergerak di perkotaan dan pedesaan di kab. Biak Numfor Papua.
10	YPK	Berbadan Hukum	Organisasi Gereja Protestan (GKI)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Formal (TK,SD,SLTP,SLTA) 	Bergerak di perkotaan dan pedesaan di kab. Biak Numfor Papua
11	YPPK	Berbadan hukum	Organisasi Gereja Katolik	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Formal (TK,SD,SLTP,SLTA) 	Bergerak di perkotaan dan pedesaan di kab. Biak Numfor Papua

Sumber : Hasil Survei tahun 2005, *YALHIMO*

Hubungan Kerjasama Kelembagaan

Di Kabupaten Biak Numfor terdapat 12 organisasi non pemerintah yang berbadan hukum. Ke-12 organisasi ini bergerak di bidang pembangunan yang berbeda-beda sesuai visi dan misi masing-masing organisasi. Artinya, bagi masyarakat adat Biak Numfor ini, lembaga-lembaga ini sudah dikenal, tetapi dari hasil kerjanya, seperti diungkapkan oleh masyarakat dalam kegiatan FGD bersama tiem assesmant bahwa, *“kami memang mendengar ada banyak LSM di Biak ini, tapi kami tidak lihat hasil kerja mereka, bahkan kami tidak tahu apa yang mereka buat di kota Biak. Karena selama ini, kami hanya mengenal yang berhubungan dengan gereja seperti yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dari Gereja Protestan dan Yayasan Pengelolaan Persekolahan Katolik (YPPK). Kedua*

lembaga ini yang sejak berdirinya kabupaten Biak Numfor bergerak di bidang pendidikan formal. Sedangkan LSM-LSM, memang mereka datang ambil data, tetapi kemudian pergi membawa data itu sampai tidak pulang-pulang bawa berita baik untuk masyarakat kampung.” Dari pernyataan masyarakat ini, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama antara lembaga dengan lembaga CSO/CBO atau hubungan CSO/CBO dengan organisasi pemerintah juga tidak ada. Namun, sejak tahun 2003, masyarakat adat Biak Numfor sudah mengenal PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang difasilitasi oleh World Bank melalui Pemerintah Provinsi Papua.

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Setelah melihat beberapa kenyataan-kenyataan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sarana dan prasarana yang terdapat di tiga Kabupaten secara umum, atau wilayah Assesment secara khusus masih terasa sangat minim, kenyataan terlihat jelas dilapangan dimana hampir keseluruhan masyarakat di tiap-tiap kampung menyatakan sangat membutuhkan sarana-prasarana tersebut. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian
2. Keseluruhan NGO lokal yang bekerja di Wilayah-wilayah di ketiga kabupaten masih memiliki sekretariat atau kantor di ibukota Kabupaten. CSO yang menggeluti kesehatan, pengorganisasian, dan gender masih sangat minim.
3. ada beberapa faktor yang ditemui dilapangan kaitannya dengan CSO/CBO yaitu :
 - Minimnya Kapasitas Staff NGO yang mampu menangani bidang yang dikerjakan oleh lembaganya/organisasinya
 - Ketergantungan pada dana bantuan menyebabkan keberlanjutan program di dalam masyarakat menjadi terputus
 - Ketergantungan masyarakat pada bantuan dana Otsus dan dana Bangdes dari pemerintah cukup tinggi sehingga kreativitas untuk mempertahankan hidup menjadi rendah
 - Kurangnya sinkronisasi program CSO/CBO dengan pihak pemerintah sehingga terkadang membingungkan rakyat.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat ditawarkan oleh tim assesment untuk ketiga daerah tersebut adalah Memberdayakan kelompok – kelompok rakyat dan penguatan organisasi masyarakat sipil dengan melakukan penataan produksi dan akumulasi modal ditingkat rakyat, dengan semangat non-violence, pruralisme, demokrasi dan terbuka, melalui strategi pengorganisasian rakyat. Selain itu juga diharapkan adanya :

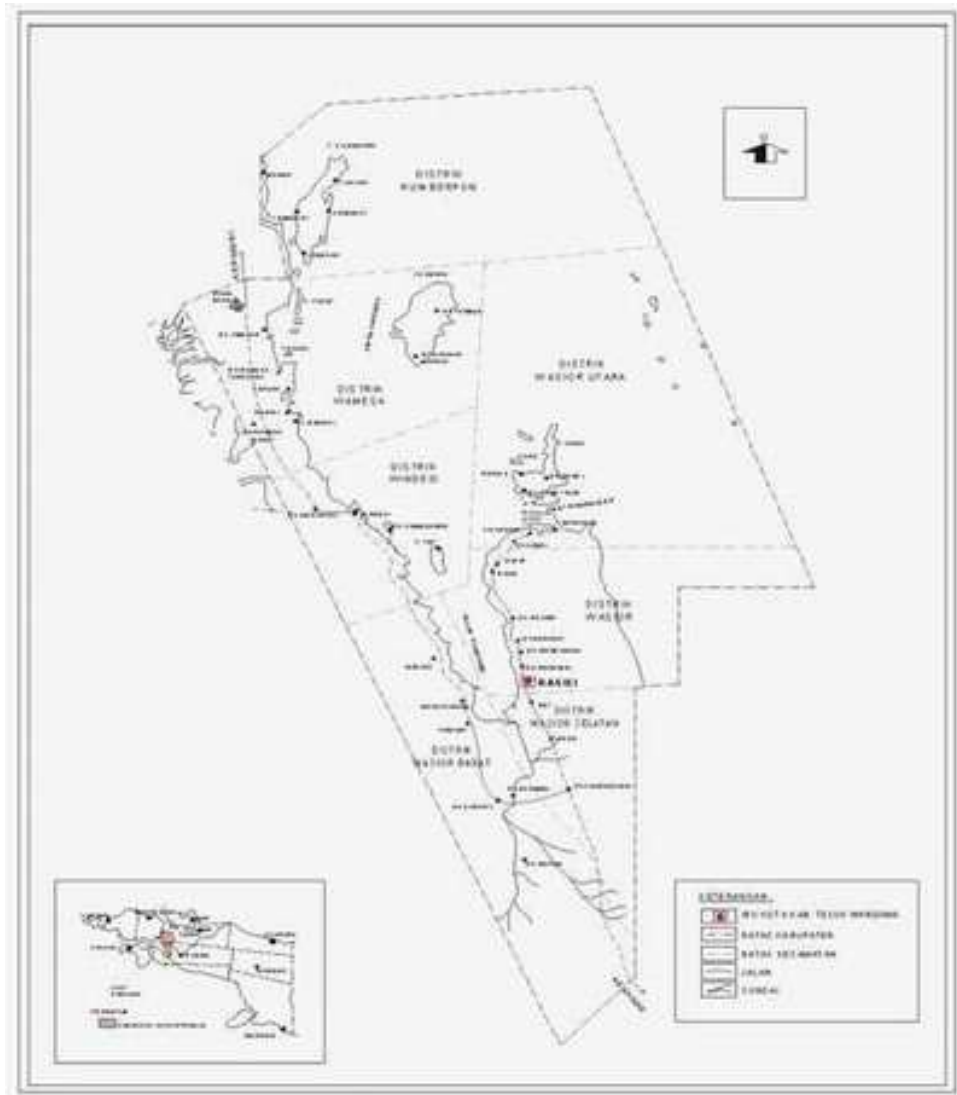
- Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat di tiga wilayah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berdasar pada kelestarian lingkungan,
- Pengembangan ekonomi Kerakyatan berbasis GENDER, seperti adanya kelompok kerjasama kaum perempuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Pengadaan berbagai fasilitas kampung yang bersifat urgent dan mendasar seperti sarana dan prasarana pemasaran hasil (pasar rakyat/pasar lokal), sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas pembantu atau klinik obat; pemanfaatan obat tradisional) serta sarana dan pra sarana pendidikan dasar (gedung sekolah dan perlengkapan pendukung; buku-buku bacaan/perpustakaan; tenaga pengajar)

- Perlu ada proses pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan pemberian dan penggunaan serta manfaat langsung maupun tidak langsung dari dana-dana bantuan seperti dana Otsus dan Bangdes.

***** YALHIMO's TEAM CSO / CBO Assessment *****

Lampiran 1. Foto-foto document assesment Kab. Teluk Wondama

Peta Kabupaten Teluk Wondama



Sarana Pelabuhan yang ada di kabupaten Teluk Wondama



Salah satu potensi pariwisata kabupaten Teluk Wondama



Sarana dan Prasarana Transportasi yang terdapat di Kabupaten Teluk Wondama

Lampiran 2 Kampung Kaprus



Bentuk perumahan milik masyarakat di kampung kaprus



Masyarakat dengan hasil tangkapannya di kampung Kaprus



Sumur bantuan YAPMI



Salah satu fasilitas air bersih yang telah lama rusak bantuan pemerintah

Lampiran 3. Kampung Yomakan



**Sarana
Transportasi di
kampung Yomakan**



**Sarana Pelabuhan
yang rusak di
kampung Yomakan**



**Sarana Pendidikan
di kampung
Yomakan**



**Suasana di
kampung Yomakan**



Ibu Yang sedang menjemur biji pala di kampung Werabur



Salah satu gubuk tempat penyulingan minyak lawang di kampung werabur



Sarana air bersih yang telah rusak di kampung Werabur



Sarana MCK yang tidak dapat dipergunakan di kampung Werabur

Lampiran 4. Kampung Werabur

Lampiran 5. Kampung Mamisi



**Gereja di
Kampung Mamisi**



**Sarana Pendidikan
(Sekolah Dasar)
di Kampung
Mamisi**



**Jalan Kampung di
Kampung Mamisi**



**Model kebun
pekarangan di
Kampung Mamisi**

Lampiran 6. Kampung Sombokoro



**Proyek reboisasi yang
terbengkalai di
kampung sombokoro**



**Suasana Kampung
Sombokoro**

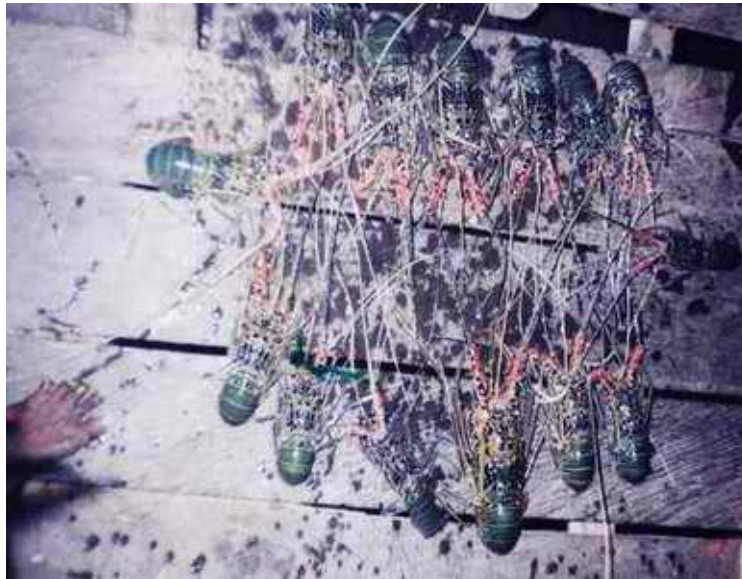


**Seorang Bapak sedang
membuat perahu
dayung**



**Suasana kampung
sombokoro tampak
dari depan**

Lampiran 7 kampung Yopmeos



Potensi Kampung di Yopmios



Suasana Kampung Yopmios

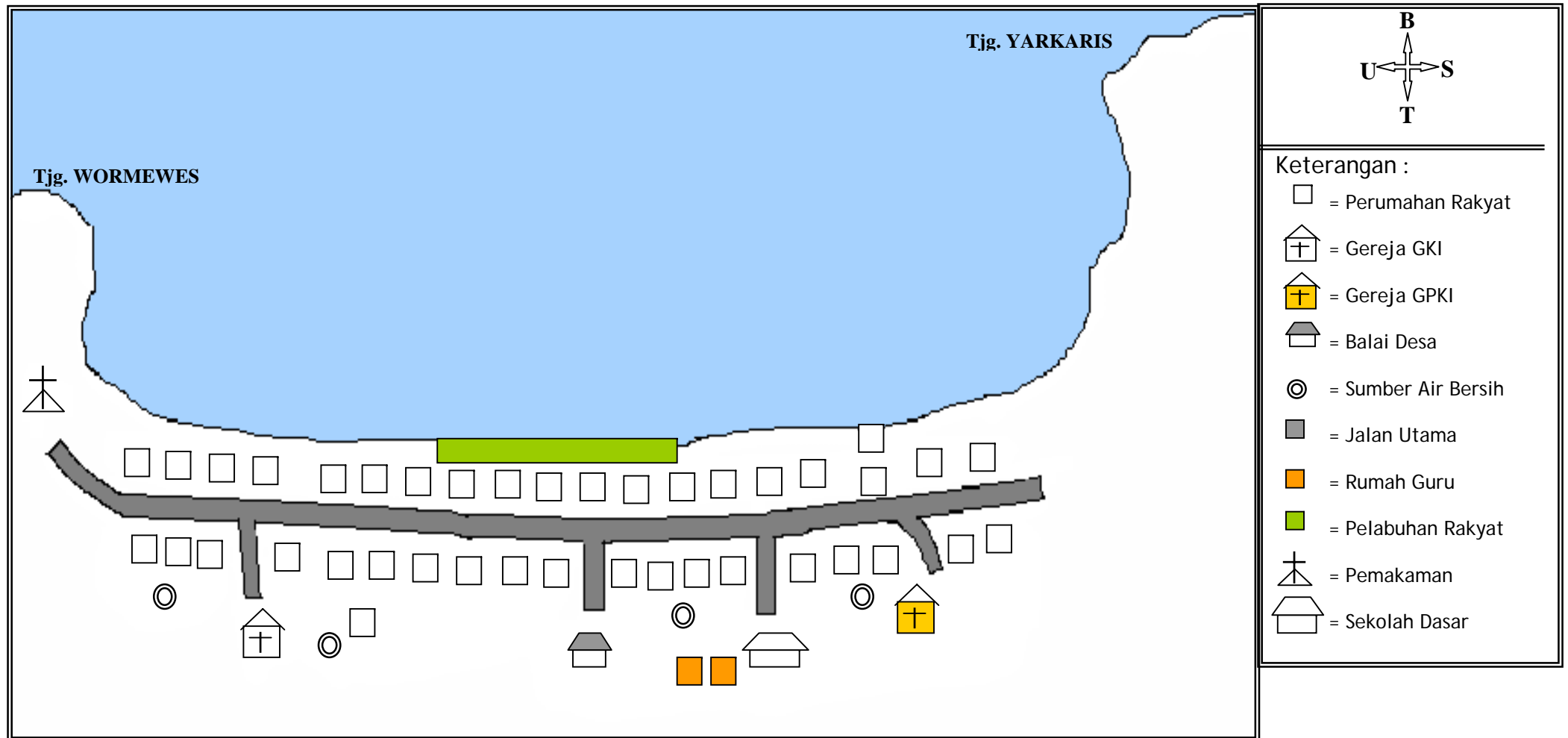


Pelabuhan laut di Kampung Yopmios

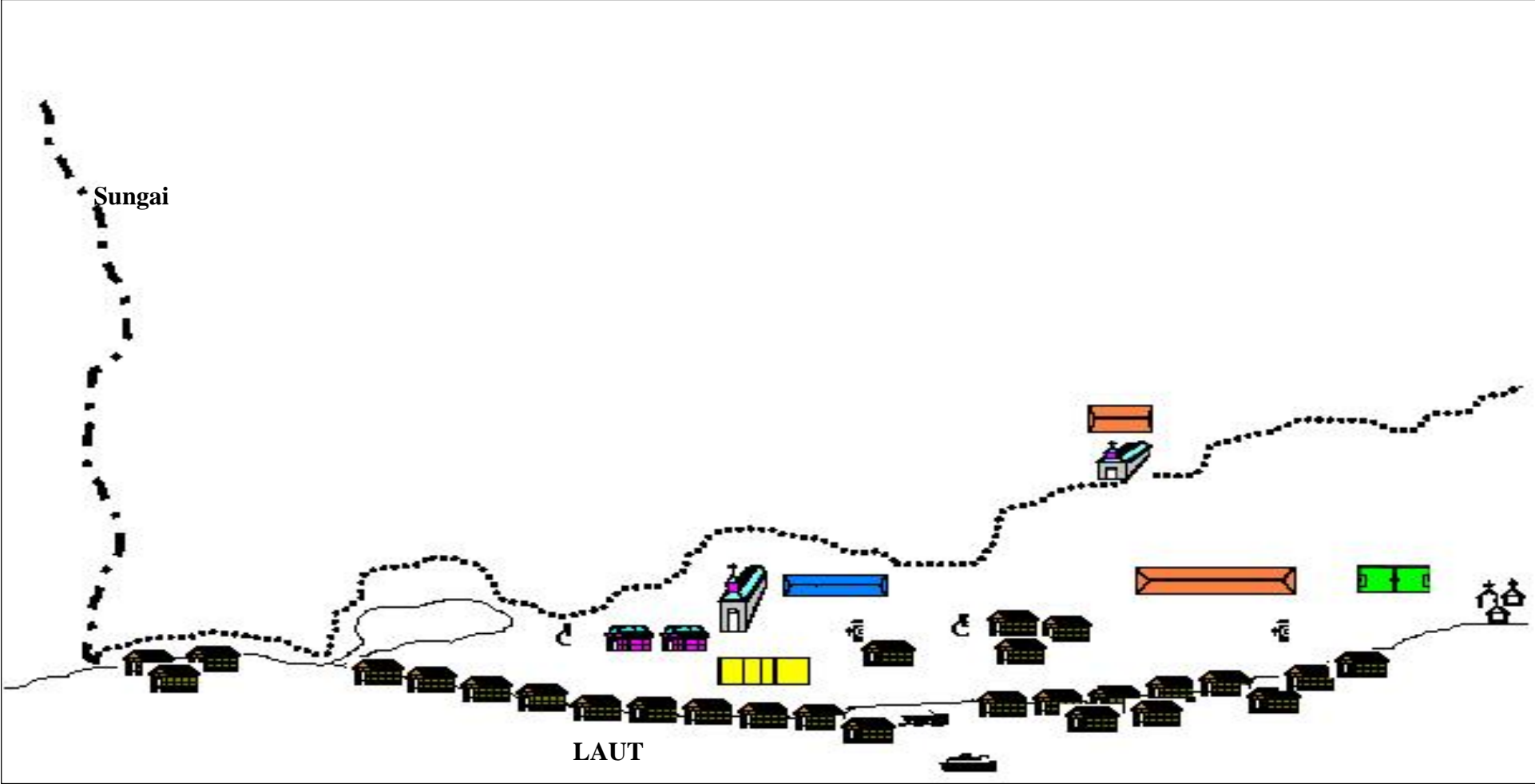


Seorang Guru dan muridnya dengan latar belakang sekolah

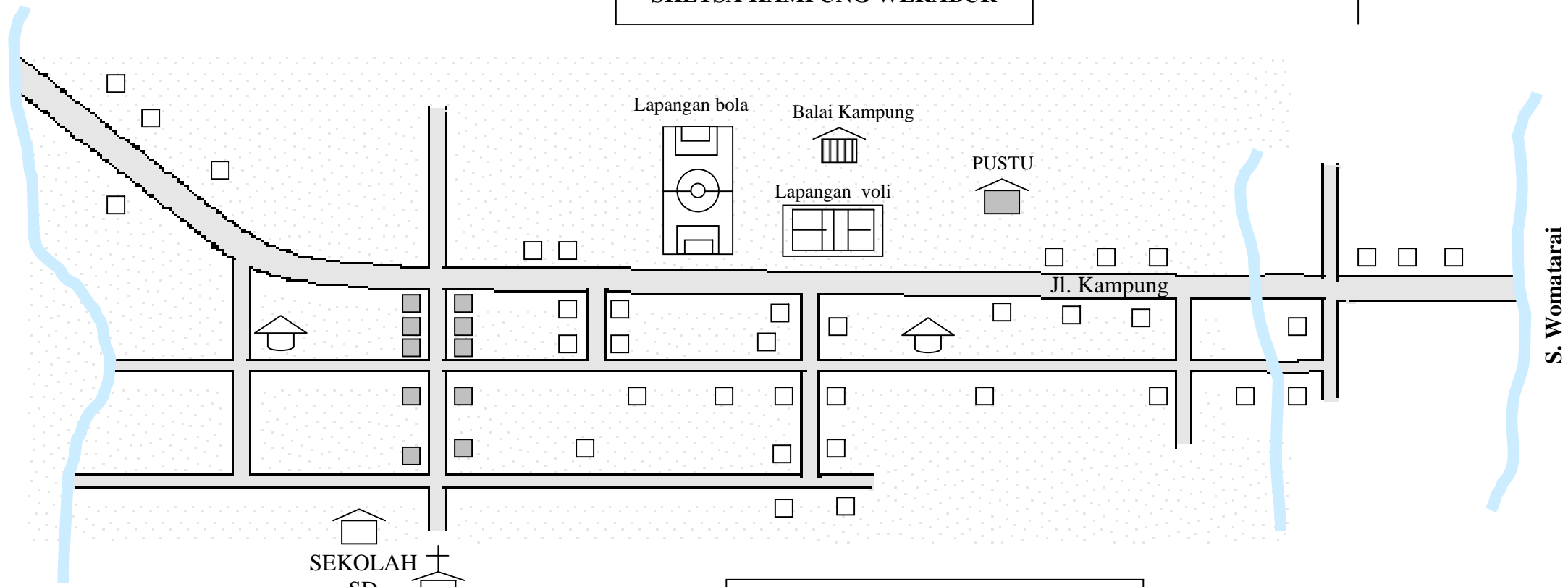
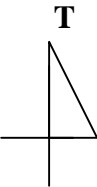
PETA SKETSA KAMPUNG KAPRUS







SKETSA KAMPUNG YOMAKAN

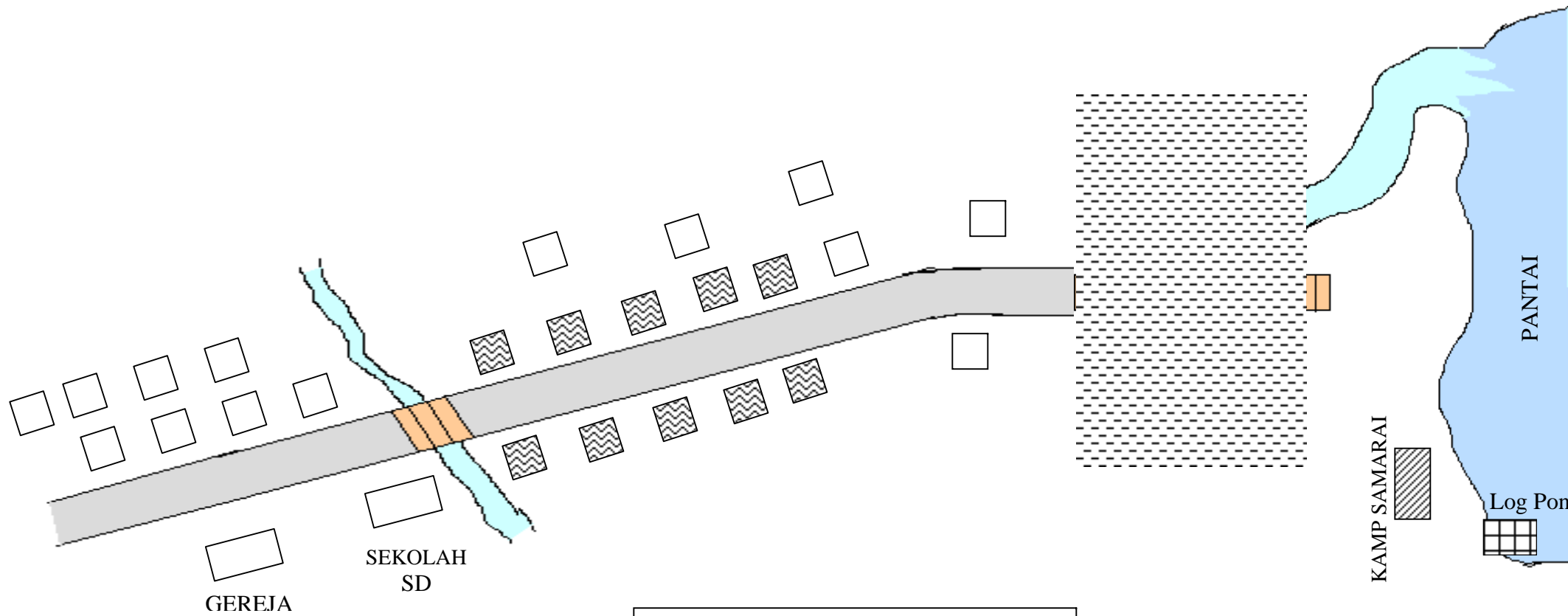


SKETSA KAMPUNG WERABUR



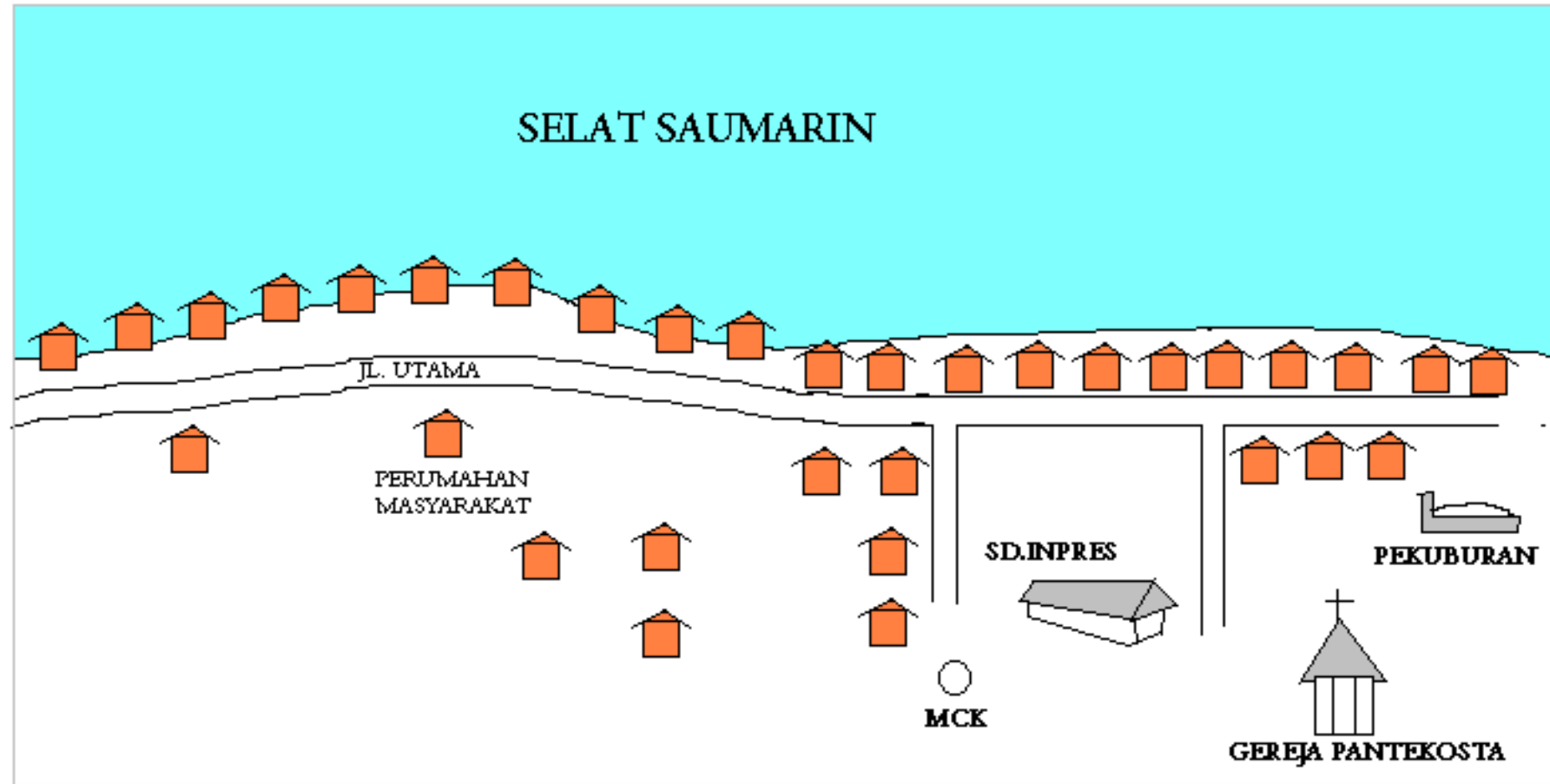
- Keterangan :
-  = MCK
 -  = Sungai / Kali
 -  = Perumahan Msy
 -  = Perumahan Msy (bantuan)

SKETSA LOKASI KAMPUNG MAMISI

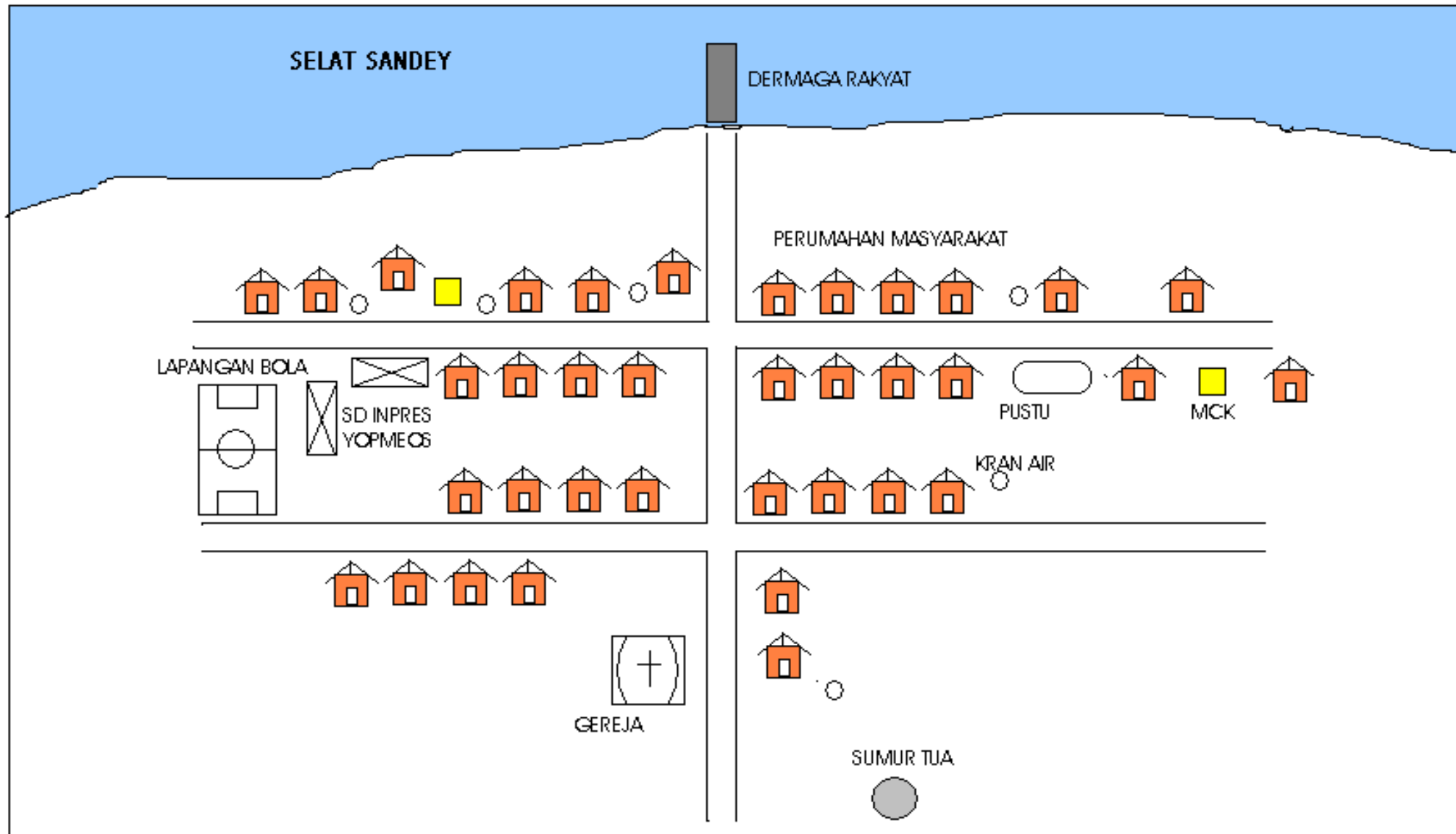


- Keterangan :
- = Perumahan Msy
 - ▨ = Perumahan Msy (Bantuan)
 - ▤ = Daerah mangrove
 - = Sungai/Kali

SKETSA KAMPUNG SOMBOKORO



sketsa kampung yop mios





**BALAI DESA
KAMPUNG
MALAUMKARTA**



**SARANA AIR
BERSIH KAMPUNG
MALAUMKARTA**



**BALAI DESA
KAMPUNG
MALADOFOK**



**RUMAH
PENDUDUK
KAMPUNG
MALADOFOK**



**PUSKESMAS DI
KAMPUNG
MALADOFOK**



**SARANA
PENDIDIKAN (SD) DI
KAMPUNG
BAINGKETE**



**SARANA
PENDIDIKAN
KAMPUNG
MALADOFOK**



**SARANA
PERIBADATAN
(GEREJA)
KAMPUNG
MALADOFOK)**